

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

I. Struktur Teks dalam Editorial *Kompas* dan *Media Indonesia*

Pendekatan analisis wacana kritis van Dijk didasarkan pada tiga dimensi: (i) dimensi teks; (ii) dimensi kognisi sosial; dan (iii) dimensi konteks sosial. Ketiga hal tersebut merupakan model yang digunakan untuk menganalisis suatu wacana. Penelitian ini difokuskan pada dimensi teks yang dikenal sebagai struktur teks. Struktur teks apabila ditinjau dengan model analisis wacana kritis van Dijk, memuat tiga konstruksi pokok, yaitu makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur. Secara singkat, makrostruktur merupakan bagian yang memuat topik makroglobal wacana, sedangkan superstruktur merupakan skema yang membentuk bangun wacana. Sementara itu, mikrostruktur merupakan pecahan dari makrostruktur yang memuat makna lokal, dengan elemen sintaksis, semantik, dan retorik berupa: bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, koherensi, praanggapan, paralelisme, perbandingan, dan metafora. Berikut merupakan hasil dan pembahasan ketiga konstruksi struktur teks wacana editorial normal baru dalam masa pandemi Covid-19 pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*.

A. Makrostruktur

Makrostruktur merupakan salah satu dimensi teks yang berperan sebagai representasi semantis dari suatu wacana, dengan kata lain, makrostruktur berisi topik makroglobal yang merepresentasikan keseluruhan isi wacana. Topik teks

selalu ada di dalam wacana sebagai substansi pokok yang memuat makna secara global. Selain itu, makrostruktur menjadi payung global bagi mikrostruktur atau makna lokal sehingga topik dapat dibentuk melalui struktur-struktur lokal yang tingkatannya lebih kecil.

Teks editorial merupakan salah satu jenis wacana. Oleh karena itu, teks editorial juga memiliki topik makroglobal dari setiap wacana yang dihasilkan. Penelitian wacana editorial tentang normal baru yang bersumber dari koran *Kompas* dan *Media Indonesia* ini menganalisis bentuk makrostruktur berupa topik teks. Berikut merupakan hasil dan pembahasan atasnya.

- (1) **Wacana normal baru mengemuka setelah sekitar tiga bulan dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Kesehatan harus menjadi pertimbangan utama.** (1/K/03062020/P1/K1-2/Makro)

Data sajian (1) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Kompas* edisi 3 Juni 2020 yang bertajuk *Menimbang Normal Baru*. Topik ditunjukkan pada proposisi pertama dengan didukung oleh proposisi kedua. Selain itu, topik makroglobal juga ditemukan pada paragraf pendukung dari paragraf pertama teks editorial *Menimbang Normal Baru*, yaitu paragraf 2–7 yang disertakan dalam **Lampiran 14**.

Data (1) tersebut menunjukkan bahwa redaktur menyampaikan perihal penancangan kehidupan normal baru di masa pandemi Covid-19 telah digaungkan setelah pemberlakuan PSBB. Atas analisis data (1), topik makroglobal dari teks editorial tersebut adalah perlu banyak pertimbangan sebelum benar-benar

melancarkan wacana normal baru di Indonesia, tetapi dari sekian aspek kehidupan, pertimbangan yang paling utama adalah ditinjau dari segi kesehatan.

Makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Kompas* berikut ini berkaitan dengan rencana pembelajaran tatap muka di masa awal pemberlakuan normal baru. Hal tersebut tampak pada data (2) berikut.

- (2) Secara keseluruhan, kita menggarisbawahi bahwa pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka hingga saat ini belum didukung oleh pijakan yang kuat. Kita berpandangan, yang bisa dilakukan adalah sekolah mempersiapkan segala fasilitas yang diperlukan untuk penegakan normal baru, termasuk protokol kesehatan yang akan diterapkan, dan pada sisi lain kita harus sabar menunggu angka penularan menurun hingga pada tingkat aman. Sekali lagi kita diingatkan agar menyangkut urusan penting, seperti pendidikan, jangan kita didikte oleh kemendesakan apa pun. (24/K/04062020/P10/K1-3/Makro)

Data sajian (2) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Kompas* edisi 4 Juni 2020 yang bertajuk *Dini, Normal Baru untuk Pendidikan*. Topik ditunjukkan pada keseluruhan paragraf, terutama pada proposisi pertama. Selain itu, topik makroglobal juga ditemukan pada paragraf pengantar dari paragraf terakhir teks editorial *Dini, Normal Baru untuk Pendidikan*, yaitu paragraf 1–4 dan 8–9 yang disertakan dalam **Lampiran 15**.

Pada data (2), tampak bahwa redaktur menjelaskan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka belum memiliki dasar yang jelas dan kuat. Selain itu, banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama mengenai kedisiplinan dalam menjunjung tinggi protokol kesehatan. Oleh karena itu, diketahui dari data (2), topik makroglobal tersebut perihal pembukaan sekolah sebagai langkah awal

menuju kenormalan baru di bidang pendidikan tidak diperkenankan untuk didesak dengan segera karena masih memerlukan persiapan yang matang.

Selanjutnya, makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Kompas* berikut ini berkaitan dengan peran pemerintah sebagai pemegang kendali dalam upaya pencegahan infeksi Covid-19. Hal tersebut tampak pada data (3) berikut.

- (3) **Surveilans dan pemeriksaan massal harus digalakkan ke sejumlah wilayah di Tanah Air, jangan lagi menunggu sampai terjadi ledakan kasus seperti hari-hari ini. Persiapkan infrastruktur dan sumber daya kesehatan, dengan segala sarana pendukungnya. Ingat, masa depan kita dipertaruhkan.**
(34/K/09062020/P9/K1-3/Makro)

Data sajian (3) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Kompas* edisi 09 Juni 2020 yang bertajuk *Menahan Ledakan di Daerah*. Topik dapat dilihat pada proposisi pertama, yaitu perlunya surveilans sebagai upaya pengawasan, juga pemeriksaan secara masif oleh pemerintah agar tidak terjadi ledakan kasus infeksi Covid-19. Didukung dengan adanya proposisi kedua, hal lain yang perlu dipersiapkan di antaranya adalah infrastruktur dan sumber daya kesehatan disertai sarana-prasarana pendukung. Hal tersebut merupakan upaya preventif agar kasus Covid-19 di daerah tidak mengalami lonjakan di masa awal memasuki tahap normal baru.

Selain itu, topik makroglobal juga ditemukan pada paragraf pengantar dari paragraf terakhir teks editorial *Menahan Ledakan di Daerah*, yaitu paragraf 6–8 yang disertakan dalam **Lampiran 16**. Topik teks pada data (3), adalah mengenai perlunya tindakan Pemerintah Indonesia selaku pusat pengendali, dalam upaya penekanan kasus Covid-19 di daerah melalui pengawasan dan pemeriksaan secara

ketat di wilayah-wilayah terdampak Covid-19. Selain itu, juga perlu didukung sarana dan infrastruktur yang memadai.

Kemudian, makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Kompas* berikut ini berkaitan dengan penanganan Covid-19 yang perlu diutamakan dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada tahun 2020. Hal tersebut tampak pada data (4) berikut.

- (4) Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya bijak membaca tren pandemi dan suara publik. Harus dikatakan, situasi di sejumlah kota belum normal. Persaingan politik pusat dan daerah, gubernur, bupati, serta wali kota hendaknya dikesampingkan. **Fokuslah pada keselamatan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19.** Menunda pilkada sampai situasi terkendali tetap lebih bijak daripada menggelar yang asal ada. Kecuali jika KPU dan daerah siap menggelar *electronic voting* dalam Pilkada 2020. (44/K/10062020/P8/K1-6/Makro)

Data sajian (4) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Kompas* edisi 10 Juni 2020 yang bertajuk ***Fokuslah pada Covid-19***. Topik dimunculkan pada proposisi keempat, yaitu redaktur menekankan bahwa perihal penanganan Covid-19 yang terus meningkat semenjak pelonggaran ekonomi di masa normal baru perlu menjadi fokus utama pemerintah. Berdasarkan konteks waktu, pelonggaran ekonomi yang sudah dilaksanakan, juga akan disusul gelar acara pelaksanaan pemilihan kepala daerah di bulan Desember 2020. Redaktur juga menyampaikan bahwa ada baiknya pilkada ditunda sampai situasi telah memasuki tahap normal dan terkendali.

Topik makroglobal yang ditemukan pada editorial ***Fokuslah pada Covid-19*** tidak hanya tertera di paragraf terakhir, tetapi juga didukung oleh paragraf pengantar, yaitu paragraf 4–7 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 17**. Topik

teks pada data (4) tersebut adalah perihal penanganan Covid-19 yang seharusnya menjadi perhatian utama dibandingkan dengan perihal ekonomi, khususnya mengenai pemilihan kepala daerah. *Kompas* menekankan bahwa kesehatan perlu didahulukan di atas kepentingan lain.

Makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Kompas* berikut ini berkaitan dengan perlunya penerapan protokol kesehatan di masa normal baru yang belum dipastikan aman. Hal tersebut tampak pada data (5) berikut.

- (5) Masyarakat harus diyakinkan dalam bahasa terang bahwa situasinya belum normal dan belum aman! Ketika pemerintah mengambil sikap beradaptasi dengan Covid-19, saatnya kita melindungi diri kita sendiri agar tidak tertular atau menulari orang lain. Kelompok paling berisiko tidak perlu ke luar rumah. Kalau terpaksa harus ke luar rumah, patuhilah protokol kesehatan. Disiplin menjadi kata kunci! (53/K/16062020/P8/K1-5/Makro)

Data sajian (5) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Kompas* edisi 16 Juni 2020 yang bertajuk ***Kuncinya adalah Disiplin***. Topik terletak pada keseluruhan paragraf, utamanya pada proposisi terakhir dan dapat dilihat sebagai kalimat induktif. Proposisi sebelumnya merupakan keterangan penjelas terkait perihal apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya penegakan kedisiplinan normal baru di masa pandemi Covid-19. Redaktur menyampaikan opini terkait penegakan kedisiplinan perlu dilakukan antarpihak, dalam konteks tersebut adalah pemerintah dan masyarakat.

Topik makroglobal yang ditemukan pada editorial ***Kuncinya adalah Disiplin*** tidak hanya tertera di paragraf terakhir, tetapi juga didukung oleh paragraf pengantar, yaitu paragraf 5–7 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 18**.

Topik teks dari data (5) adalah pengambilan putusan pemerintah terkait pelanggaran aktivitas ekonomi yang perlu diiringi dengan tindakan preventif, misalnya memberi peringatan pada masyarakat mengenai bahaya Covid-19. Sementara itu, masyarakat juga berperan penting dalam upaya mendukung putusan pemerintah dengan cara mendisiplinkan diri.

Selanjutnya, makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Kompas* berikut ini berkaitan dengan perlunya ketegasan pemerintah dalam penegakan kedisiplinan untuk menaati aturan. Hal tersebut tampak pada data (6) berikut.

- (6) Ketahanan fisik, ekonomi, dan tata sosial kemasyarakatan kita benar-benar diuji belakangan ini. **Pada titik inilah, baik pemerintah pusat maupun daerah harus tegas.** Beri sanksi mereka yang melanggar aturan. Dalam hal ini, para pengambil keputusan sebaiknya melibatkan para ahli ilmu sosial agar semua kebijakan pas dengan kondisi sosial masyarakat. (67/K/23062020/P10/K1-4/Makro)

Data sajian (6) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Kompas* edisi 23 Juni 2020 yang bertajuk *Saatnya Bertindak Tegas*. Topik dipaparkan pada proposisi kedua. Redaktur menyampaikan opini, dalam konteks pelaksanaan normal baru, bahwa pemberlakuan tatanan normal baru banyak dilanggar oleh masyarakat dan menyebabkan kasus naik secara signifikan. Selain itu, ditekankan juga terkait tindakan tegas bagi para pelanggar yang perlu ditempuh agar normal baru dapat berjalan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Sebagaimana teks editorial *Kompas* yang lain, topik makroglobal dari teks editorial *Saatnya Bertindak Tegas* juga ditemukan pada paragraf pengantar dari

paragraf terakhir, yaitu paragraf 5–9 yang terlampir pada **Lampiran 19**. Topik teks dari data (6) tersebut adalah perlunya penindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di masa normal baru.

Makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Media Indonesia* berikut ini berkaitan dengan keharusan penerapan tatanan hidup normal baru di masa pandemi Covid-19 dan pengutamaan keselamatan rakyat saat pilkada 2020 berlangsung. Hal tersebut tampak pada data (7) berikut.

- (7) **Normal baru akibat covid-19 mutlak dijalankan meski pilkada sebagai instrumen demokrasi membutuhkan partisipasi sebesar-besarnya pemilih.** Keselamatan nyawa pemilih tetap diutamakan di atas pelaksanaan demokrasi. (73/MI/11052020/P5/K1-2/Makro)

Data sajian (7) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Media Indonesia* edisi 11 Mei 2020 yang bertajuk ***Normal Baru Pilkada***. Topik teks editorial tersebut terletak pada proposisi pertama bahwa pelaksanaan pilkada di bulan Desember 2020 perlu tetap mengutamakan tatanan normal baru. Hal tersebut ditekankan oleh redaktur bahwa bagaimanapun perlunya partisipasi masyarakat dalam ajang demokrasi, keselamatan menjadi prioritas utama selama pilkada.

Topik makroglobal tersebut juga didukung oleh paragraf pengantar dari teks editorial ***Normal Baru Pilkada***, yaitu paragraf 1–4 sebagaimana termaktub pada **Lampiran 20**. Topik teks editorial pada data (7) tersebut adalah perihal pilkada yang tetap dilangsungkan oleh pemerintah di penghujung tahun 2020 sebagai satu-satunya pilihan yang *commit to user* harus diterima oleh masyarakat. Akan tetapi,

kepatuhan terhadap tatanan normal baru juga harus seiring agar pilkada berjalan dengan baik.

Kemudian, makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Media Indonesia* berikut ini berkaitan dengan perlunya kedisiplinan yang harus ditegakkan ketika normal baru mulai dibuka oleh pemerintah. Hal tersebut tampak pada data (8) berikut.

- (8) Jika pemerintah menerapkan *new normal* dalam waktu dekat, yakni saat kurva belum jelas melandai, pertaruhan kita dalam babak baru perang melawan korona ini sesungguhnya amat besar. **Pertaruhan ini kita gantungkan pada kedisiplinan orang per orang.** (86/MI/27052020/P6/K1-2/Makro)

Data sajian (8) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Media Indonesia* edisi 27 Mei 2020 yang bertajuk *Pendisiplinan New Normal*. Topik teks dapat dilihat pada proposisi kedua. Editorial yang ditulis sebelum diberlakukannya *new normal* tersebut berkaitan dengan pendisiplinan yang perlu dilakukan kepada setiap orang. Redaktur menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika penerapan normal baru dilakukan ketika kurva belum landai. Selain itu, topik makroglobal juga ditemukan pada paragraf pengantar dari paragraf terakhir teks editorial *Pendisiplinan New Normal*, yaitu paragraf 1–5, 10, dan 15–16 yang disertakan pada **Lampiran 21**. Topik teks dari data (3) tersebut adalah perlunya langkah awal dalam upaya mendisiplinkan setiap orang agar kurva dapat melandai sebelum diberlakukannya normal baru di Indonesia.

Makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Media Indonesia* berikut ini berkaitan dengan perlunya partisipasi dan pemahaman dari masyarakat atas normal baru. Hal tersebut tampak pada data (9) berikut.

- (9) **Tatanan normal baru membutuhkan partisipasi, bukan sikap abai dari publik. Partisipasi pun hanya bisa tumbuh jika publik mengerti dan memahami bagaimana dan kenapa tatanan era baru harus dijalankan.** (109/MI/28052020/P7/K1-2/Makro)

Data sajian (9) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Media Indonesia* edisi 28 Mei 2020 yang bertajuk *Partisipasi Publik di Era Normal Baru*. Topik terletak pada keseluruhan paragraf. Proposisi pertama ditampilkan oleh redaktur bahwa masyarakat perlu berpartisipasi dalam upaya melancarkan wacana normal baru. Selain itu, topik makroglobal juga ditemukan pada paragraf pengantar dari paragraf terakhir teks editorial *Partisipasi Publik di Era Normal Baru*, yaitu paragraf 1–6, yang termaktub pada **Lampiran 22**. Atas analisis data (9) adalah perlunya pemahaman secara komprehensif oleh masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan normal baru dan harus didukung penuh dengan cara berpartisipasi aktif melaksanakan tatanan normal baru yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Media Indonesia* berikut ini berkaitan dengan nuansa baru yang harus ada di dalam produk pariwisata dan disesuaikan dengan tatanan kehidupan normal baru. Hal tersebut tampak pada data (10) berikut.

- (10) **Standar baru, kebiasaan baru, dan kultur baru di sektor pariwisata harus dikembangkan sehingga produk baru**

pariwisata yang tepat dan memuaskan pun dapat dikreasikan dan disodorkan kepada para wisatawan era *new normal*.
(124/MI/30052020/P9/K1/Makro)

Data sajian (10) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Media Indonesia* edisi 30 Mei 2020 yang bertajuk ***Produk Wisata di Era New Normal***. Topik ditunjukkan secara eksplisit oleh redaktur mengenai pariwisata yang perlu turut serta dalam wacana normal baru. Normal baru di bidang kepariwisataan menjadi langkah awal untuk membuka kembali peluang dan inovasi industri pariwisata. Selain pada paragraf tersebut, topik juga ditemukan pada paragraf pendukung dari teks editorial ***Produk Wisata di Era New Normal***, yaitu paragraf 10–14 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 23**. Topik yang termaktub pada data (10) adalah perlunya kultur baru di bidang pariwisata yang sesuai dan sejalan dengan tatanan kehidupan normal baru. Oleh karena itu, kultur baru yang telah diciptakan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk pariwisata tersebut dalam pengembangan inovasi produk wisata.

Kemudian, makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Media Indonesia* berikut ini berkaitan dengan meningkatnya nilai rupiah di masa pembukaan normal baru. Hal tersebut tampak pada data (11) berikut.

- (11) **Penguatan tajam rupiah ditopang oleh faktor global dan juga kebijakan dalam negeri.** Pertama, jelas karena pelemahan nilai tukar dolar AS akibat ekonomi dunia yang berangsur pulih sejalan dengan dibukanya kembali kegiatan ekonomi di berbagai negara, serta meluasnya demonstrasi terkait isu rasialisme di AS.
(131/MI/05062020/P4/K1-2/Makro)

Data sajian (11) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Media Indonesia* edisi 05 Juni 2020 yang bertajuk ***Rupiah Menuju Kenormalan Baru***. Topik terletak pada proposisi pertama. Redaktur menyampaikan bahwa rupiah bisa menguat di masa pandemi karena dua alasan pokok. Pertama, terkait pelemahan nilai tukar dolar AS sebab dimulainya pembukaan kegiatan ekonomi di sejumlah negara dan kekacauan di AS terkait rasialisme.

Paragraf lain pada editorial ***Rupiah Menuju Kenormalan Baru*** juga memuat topik makroglobal sebagai paragraf pengantar sekaligus pendukung, yang tertera pada paragraf 1–3 dan 5–7 sebagaimana disertakan pada **Lampiran 24**. Topik teks dari data (11) adalah perihal rupiah yang berangsur membaik karena kegiatan ekonomi, khususnya di Indonesia, sudah mulai memasuki babak baru di masa pandemi Covid-19. Keberanian Pemerintah Indonesia dalam mewacanakan normal baru menjadikan rupiah menguat dan mencapai kurs yang tinggi.

Makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Media Indonesia* berikut ini berkaitan dengan masa transisi menuju normal baru yang perlu dijalani dengan baik dan disiplin untuk melatih diri. Hal tersebut tampak pada data (12) berikut.

- (12) Sebagai persiapan memasuki era kenormalan baru, kita menilai keputusan untuk menetapkan secara khusus periode PSBB transisi tersebut dapat diterima. **Sebelum memasuki era kenormalan baru, masyarakat memang perlu melatih kebiasaan untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin agar saat beraktivitas dan berproduktivitas kembali, mereka tetap terlindung dari bahaya covid-19.** (151/MI/06062020/P8/K1-2/Makro)

Data sajian (12) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Media Indonesia* edisi 06 Juni 2020 yang bertajuk ***Transisi Menuju Kenormalan Baru***. Topik teks tersebut dapat dilihat pada proposisi kedua. Hal yang ditampilkan redaktur adalah pentingnya masa transisi dari pelanggaran PSBB menuju normal baru menjadi pijakan atau dasar yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, juga ditekankan bahwa masa transisi seharusnya menjadi ajang latihan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Topik tersebut juga didukung oleh paragraf 9, dan 13–14 pada teks editorial ***Transisi Menuju Kenormalan Baru*** sebagaimana terlampir pada **Lampiran 25**. Topik teks pada data (12) tersebut terfokus pada masa transisi yang harus dijalani dengan baik sesuai tatanan normal baru. Selain itu, perlu bersikap disiplin atas keputusan yang telah ditetapkan pemerintah. Masa transisi merupakan masa peralihan bagi masyarakat sehingga masa tersebutlah pembiasaan perlu dilakukan.

Terakhir, makrostruktur yang terdapat di dalam editorial koran *Media Indonesia* berikut ini berkaitan dengan bagaimana perlunya bersikap di masa normal baru yang seharusnya tidak ada kelalaian. Hal tersebut tampak pada data (13) berikut.

- (13) **Ini penting karena dalam masa kenormalan baru, tidak boleh ada kelengahan dan kelalaian sedikit pun.** Kita sedang berperang melawan virus yang telah membunuh lebih dari 400 ribu orang di dunia serta mematikan sebagian besar aktivitas ekonomi global. Langkah berarti bencana, lalai ibarat langkah pertama menuju kekalahan. (168/MI/11062020/P9/K1-3/Makro)

Data sajian (13) merupakan paragraf yang memuat topik makroglobal dari teks editorial koran *Media Indonesia* edisi 11 Juni 2020 yang bertajuk *New Normal bukan Celah untuk Lengah*. Topik teks terletak pada proposisi pertama. Redaktur menekankan bahwa memasuki masa normal baru seharusnya sudah tidak ada bentuk kelalaian. Normal baru merupakan opsi yang sudah dipilih dan harus dijalankan dengan disiplin. Topik tersebut juga didukung oleh paragraf pengantar yang berkaitan dengan data (13) dari editorial *New Normal bukan Celah untuk Lengah*, yaitu paragraf 6–8 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 26**.

Topik teks pada data (13) berkenaan dengan masa normal baru yang menerapkan banyak aturan. Setiap orang, baik pemerintah maupun masyarakat, tidak diperkenankan untuk lengah dan lalai. Poin utamanya adalah kedisiplinan merupakan keharusan dalam normal baru. Sebagai upaya penanggulangannya, maka semua orang harus taat terhadap tatanan normal baru, tanpa lengah.

Perbandingan antara koran *Kompas* dan *Media Indonesia* secara umum dapat digambarkan melalui topik-topik yang dibangun dalam wacana editorial mengenai normal baru. Masa-masa memasuki tahapan normal baru di Indonesia mulai diwacanakan sejak bulan Mei 2020. Sementara itu, rencana normal baru mulai diberlakukan pada bulan Juni 2020. Hasil dan pembahasan di atas merupakan topik-topik yang dimunculkan oleh redaktur, baik dari *Kompas* maupun *Media Indonesia*. Ketiga belas teks editorial tersebut memiliki topik masing-masing.

Secara keseluruhan, dapat diamati bahwa koran *Kompas* cenderung menampilkan opini melalui editorial mengenai normal baru ketika telah memasuki bulan Juni, yaitu masa transisi dari PSBB menuju normal baru. Hal tersebut dibuktikan dengan enam topik editorial yang memiliki *headline* yang berurutan secara temporal dengan berdasarkan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, di antaranya adalah *Menimbang Normal Baru; Dini, Normal Baru untuk Pendidikan; Menahan Ledakan di Daerah; Fokuslah pada Covid-19; Kuncinya adalah Disiplin; dan Saatnya Bertindak Tegas.*

Di sisi lain, *Media Indonesia* mulai beropini sejak bulan Mei 2020 yang pada waktu tersebut normal baru masih sebuah wacana yang belum matang dari pemerintah. Berbeda halnya dengan *Kompas*, tujuh topik editorial *Media Indonesia* secara umum tidak berkait secara temporal sesuai perkembangan Covid-19, tetapi lebih condong pada substansi yang sedang banyak dibicarakan oleh publik di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut tampak pada *headline Media Indonesia*, di antaranya adalah *Normal Baru Pilkada; Pendisiplinan New Normal; Partisipasi Publik di Era Normal Baru; Produk Wisata di Era New Normal; Rupiah Menuju Kenormalan Baru; Transisi Menuju Kenormalan Baru; dan New Normal bukan Celah untuk Lengah.*

Ringkasan dari topik-topik editorial *Kompas*, secara umum, *Kompas* menyampaikan opini yang berkaitan erat dengan Covid-19, pertimbangan mengenai normal baru, salah satunya dalam sektor pendidikan, mengenai fokus, kedisiplinan, serta ketegasan kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 baik skala daerah maupun nasional. Pada editorial *Kompas*,
commit to user

tema atau topik teks ditemukan di awal atau di akhir wacana sebagaimana model paragraf deduktif dan induktif.

Sementara itu, *Media Indonesia* cukup mengedepankan perihal-perihal di luar Covid-19, mengenai pemilihan kepala daerah, wisata, dan nasib rupiah di masa normal baru. Meskipun demikian, *Media Indonesia* tetap beropini mengenai normal baru yang diwacanakan pemerintah sejak Mei hingga pemberlakuan normal baru di bulan Juni 2020. Kemudian dari sisi penempatan tema atau topik teks, *Media Indonesia* tidak secara konsisten menempatkan tema di awal atau akhir paragraf sebagaimana editorial *Kompas*. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan tema atau topik antara *Kompas* dan *Media Indonesia* tidak selaras. Akhirnya, diketahui bahwa kedua koran tersebut menciptakan opini editorial terkait normal baru yang berlainan ditinjau dari topik yang terkandung di dalam editorial masing-masing dan ditampilkan dengan cara yang berlainan pula.

B. Superstruktur

Superstruktur merupakan salah satu dimensi teks yang digagas oleh van Dijk dan berkaitan dengan konstruksi wacana. Suatu wacana tentu memiliki kerangka atau konstruksi yang memuat unsur-unsur pembangun. Superstruktur dibentuk atas aturan-aturan dan kategori pengisi. Van Dijk memaparkan bahwa bangun wacana disusun oleh adanya skema. Skema wacana memiliki kategori wajib dan opsional.

Kategori wajib adalah *Summary* yang di dalamnya berupa *Headline* dan *Lead*. *Headline* merupakan tataran tertinggi dalam skema yang memuat informasi

paling relevan, yaitu judul. Sementara itu, *Lead* merupakan bagian dari teks wacana yang memuat pendahuluan atau ringkasan dari suatu wacana. Berikut merupakan tabel berisi *Headlines* dan analisis data *Lead* dari masing-masing teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*.

Tabel 4.1 *Headlines* dan *Leads* tentang Normal Baru pada Teks Editorial

Koran *Kompas* dan *Media Indonesia*

No.	Sumber Data	<i>Headlines</i>	<i>Leads</i>
1	<i>Kompas</i> 03 Juni 2020	<i>Menimbang Normal Baru</i>	Wacana pelanggaran PSBB mengemuka, antara lain, karena pembatasan sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti. Banyak pekerja dirumahkan atau diberhentikan dan pengusaha mandiri berhenti berusaha.
2	<i>Kompas</i> 04 Juni 2020	<i>Dini, Normal Baru untuk Pendidikan</i>	Tak bisa disangkal, ada perasaan mendua (<i>mixed feeling</i>) di kalangan orangtua, siswa, mahasiswa, dan birokrasi terkait keamanan pembelajaran tatap muka.
3	<i>Kompas</i> 09 Juni 2020	<i>Menahan Ledakan di Daerah</i>	Di tengah euforia memasuki tahap normal baru, jumlah kasus Covid-19 justru naik di sejumlah daerah. Kemarin, Senin (8/6/2020), kasus Covid-19 naik sebanyak 672, total menjadi 31.186 kasus.
4	<i>Kompas</i> 10 Juni 2020	<i>Fokuslah pada Covid-19</i>	Pelanggaran aktivitas ekonomi mulai dilakukan. Namun, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap ancaman infeksi Covid-19.
5	<i>Kompas</i> 16 Juni 2020	<i>Kuncinya adalah Disiplin</i>	Infeksi Covid-19 masihlah merupakan ancaman nyata dan serius. Data yang dirilis Gugus Tugas mengindikasikan masih adanya penularan virus.
6	<i>Kompas</i> 23 Juni 2020	<i>Saatnya Bertindak Tegas</i>	Asumsi pemerintah bahwa puncak penularan Covid-19 berlangsung pada bulan Mei ternyata harus direvisi. Hari-hari ini, penambahan angka kasus baru bahkan seperti berkejaran, “berlomba” untuk memecahkan “rekor”.

7	<i>Media Indonesia</i> 11 Mei 2020	<i>Normal Baru Pilkada</i>	PEMILIHAN kepala daerah yang semula hendak dilaksanakan serentak pada 23 September akhirnya ditunda hingga Desember. Penundaan pilkada di 270 daerah itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.
8	<i>Media Indonesia</i> 27 Mei 2020	<i>Pendisiplinan New Normal</i>	KENORMALAN baru atau <i>new normal</i> sama sekali belum menjadi kemenangan melawan korona. Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo, <i>new normal</i> ialah upaya produktif, tetapi tetap aman dari covid-19.
9	<i>Media Indonesia</i> 28 Mei 2020	<i>Partisipasi Publik di Era Normal Baru</i>	SALAH satu penentu sukses atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan ialah seberapa besar partisipasi masyarakat. Pun demikian dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru di tengah pandemi covid-19 yang masih menyandera bangsa ini.
10	<i>Media Indonesia</i> 30 Mei 2020	<i>Produk Wisata di Era New Normal</i>	PARIWISATA merupakan salah satu sektor paling terdampak oleh pandemi covid-19. Serangan virus nan masif membuat banyak negara dan wilayah memberlakukan karantina, larangan masuk, dan berbagai bentuk pembatasan lain bagi warga dan wisatawan.
11	<i>Media Indonesia</i> 05 Juni 2020	<i>Rupiah Menuju Kenormalan Baru</i>	PASAR merespons positif atas kebijakan transisi menuju kenormalan baru. Kepercayaan investor perlahan-lahan pulih bersamaan rupiah cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
12	<i>Media Indonesia</i> 06 Juni 2020	<i>Transisi Menuju Kenormalan Baru</i>	SETELAH diperpanjang tiga kali berturut-turut, masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta kembali diperpanjang untuk keempat kalinya.
13	<i>Media Indonesia</i> 11 Juni 2020	<i>New Normal bukan Celah untuk Lengah</i>	KEHIDUPAN <i>new normal</i> sudah di depan mata. Menerima kenormalan baru di masa pandemi covid-19 bukanlah bentuk kepasrahan, apalagi kekalahan. Ini adalah pilihan yang mesti diambil bahwa urusan kesehatan dan ekonomi harus sama-sama diperjuangkan.

Lead yang tertera dalam teks editorial *Kompas* berikut ini merupakan bagian dari *Summary* yang berkenaan dengan dampak atas diterapkannya

pembatasan sosial berskala besar (PSBB), khususnya pada sektor perekonomian.

Data (14) berikut merupakan *Lead* dari koran *Kompas*.

- (14) Wacana pelanggaran PSBB mengemuka, antara lain, karena pembatasan sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti. Banyak pekerja dirumahkan atau diberhentikan dan pengusaha mandiri berhenti berusaha. (5/K/03062020/P3/K1-2/Superstruktur/*Lead*)

Data sajian (14) merupakan paragraf *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Menimbang Normal Baru*. Pada data (14) tersebut, alasan mendasar yang terjadi di masyarakat atas penerapan PSBB yang berdampak kurang baik, terutama berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti bekerja atau menjalankan usaha. Alasan yang ditampilkan oleh redaktur pada data (14) yaitu *pembatasan sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti*. Hal tersebut berkaitan dengan topik makroglobal tentang adanya wacana normal baru. Atas analisis yang dilakukan pada data (14), diketahui bahwa redaktur mencoba menyampaikan kepada pembaca bahwa kegiatan ekonomi yang terhenti akibat penerapan PSBB, menjadi alasan utama adanya pencanangan pelanggaran PSBB, bahkan tidak menutup kemungkinan wacana normal baru akan dilangsungkan atas dasar alasan tersebut juga.

Selanjutnya merupakan *Lead* dari editorial *Kompas* yang berkenaan dengan penerapan normal baru di bidang pendidikan. Hal tersebut ditampilkan dalam data (15) berikut.

- (15) Tak bisa disangkal, ada perasaan mendua (*mixed feeling*) di kalangan orangtua, siswa, mahasiswa, dan birokrasi terkait keamanan
commit to user

pembelajaran tatap muka. (13/K/04062020/P1/K1/Superstruktur/*Lead*)

Data sajian (15) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Dini, Normal Baru untuk Pendidikan*. Pada data tersebut, redaktur memperlihatkan bahwa rencana normal baru yang akan memiliki *impact* pada banyak aspek dan sektor, salah satunya adalah bidang pendidikan yang ditunjukkan pada data (15), yaitu *ada perasaan mendua (mixed feeling) di kalangan orangtua, siswa, mahasiswa, dan birokrasi terkait keamanan pembelajaran tatap muka*. Penerapan normal baru di sekolah memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karenanya, pembelajaran tatap muka menjadi suatu hal yang masih jadi pertimbangan bagi pemerintah, orang tua, juga peserta didik sendiri terutama mengenai keamanannya. Hal tersebut berkaitan dengan topik makroglobal bahwa perihal penting seperti pendidikan merupakan hal krusial dan perlu sabar menunggu angka Covid-19 melandai di era normal baru. Atas analisis data (15), diketahui bahwa perlu banyak persiapan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sebelum normal baru diterapkan pada sektor pendidikan karena keamanan lebih diutamakan di atas alasan lainnya.

Masih dari editorial *Kompas*, *Lead* berikut merupakan bagian dari *Summary* yang berkaitan dengan kenaikan kasus Covid-19 saat bermulanya masa normal baru di Indonesia. Data (16) berikut merupakan *Lead* dari *Kompas*.

- (16) Di tengah euforia memasuki tahap normal baru, jumlah kasus Covid-19 justru naik di sejumlah daerah. Kemarin, Senin (8/6/2020), kasus Covid-19 naik sebanyak 672, total menjadi 31.186 kasus. (26/K/09062020/P1/K1-2/Superstruktur/*Lead*)

Data (16) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Menahan Ledakan di Daerah*. Pada data tersebut ditampilkan sebuah fakta bahwa tahap awal pemberlakuan normal baru, justru membuat kasus positif naik di beberapa daerah, yaitu proposisi *di tengah euforia memasuki tahap normal baru, jumlah kasus Covid-19 justru naik di sejumlah daerah*. Penambahan kasus Covid-19 yang meningkat, bukanlah harapan dari penerapan normal baru. Secara tidak langsung, redaktur beropini bahwa seharusnya dengan adanya normal baru beserta tatanan baru, jumlah kasus Covid-19 tidak bertambah banyak. Data (16) menunjukkan bahwa penerapan normal baru yang menimbulkan kegembiraan hanya berlaku bagi beberapa daerah saja, karena penerapan pada daerah yang belum siap dengan normal baru, justru menjadikan kasus Covid-19 meningkat.

Lead berikut merupakan bentuk ringkasan dari editorial *Kompas* yang berkaitan dengan dilonggarkannya aktivitas perekonomian di masa normal baru. Data (17) berikut merupakan tampilan data *Lead* editorial *Kompas* sekaligus analisisnya.

- (17) Pelonggaran aktivitas ekonomi mulai dilakukan. Namun, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap ancaman infeksi Covid-19. (36/K/10062020/P1/K1-2/Superstruktur/*Lead*)

Data sajian (17) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Fokuslah pada Covid-19*. Tampak pada data tersebut bahwa redaktur beropini terkait tujuan normal baru, yaitu perihal ekonomi, perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama terkait dengan peringatan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tidak lengah. Opini redaktur ditampilkan pada proposisi *namun, pemerintah dan*
commit to user

masyarakat tidak boleh lengah terhadap ancaman infeksi Covid-19. Diketahui dari analisis data (17), putusan pemerintah atas pemberlakuan normal baru sebagai upaya pemulihan ekonomi, perlu diiringi dengan peran pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat agar terhindar dari bahaya Covid-19 karena aktivitas ekonomi telah dijalankan kembali. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara pelanggaran aktivitas ekonomi dan upaya suportif agar masyarakat lebih disiplin.

Selanjutnya adalah data (18) yang berisi *Lead* dari editorial *Kompas* yang berkaitan dengan penularan Covid-19 yang masih mengintai masyarakat. Berikut merupakan data beserta analisisnya.

- (18) Infeksi Covid-19 masihlah merupakan ancaman nyata dan serius. Data yang dirilis Gugus Tugas mengindikasikan masih adanya penularan virus. (45/K/16062020/P1/K1-2/Superstruktur/*Lead*)

Data sajian (18) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Kuncinya adalah Disiplin*. Data tersebut menunjukkan bahwa redaktur melakukan pengamatan terhadap kasus Covid-19 yang meningkat selama pemberlakuan normal baru. Pengamatan redaktur didasarkan pada data Gugus Tugas yang dinyatakan dalam data (18), *data yang dirilis Gugus Tugas mengindikasikan masih adanya penularan virus*. Oleh karena itu, redaktur menyampaikan bahwa Covid-19 merupakan ancaman nyata yang perlu ditanggapi dengan serius sebab penularan masih terus terjadi. Data (18) tersebut selaras dengan topik makroglobal mengenai kedisiplinan yang perlu ditegakkan masyarakat dalam upaya perlindungan diri sendiri dan orang lain. Data (18) menunjukkan bahwa pemberlakuan normal baru tidak diartikan sebagai situasi

normal seperti sedia kala, karena pada faktanya, Covid-19 masih mengintai dan semua orang perlu disiplin agar terhindar dari infeksi Covid-19.

Lead pada data (19) berikut merupakan bagian dari *Summary* editorial *Kompas* yang berkaitan dengan prediksi pemerintah terkait berakhirnya pandemi Covid-19 di bulan Mei 2020. Berikut merupakan data beserta analisisnya.

- (19) Asumsi pemerintah bahwa puncak penularan Covid-19 berlangsung pada bulan Mei ternyata harus direvisi. Hari-hari ini, penambahan angka kasus baru bahkan seperti berkejaran, “berlomba” untuk memecahkan “rekor”. (56/K/23062020/P2/K1-2/Superstruktur/*Lead*)

Data (19) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Saatnya Bertindak Tegas*. Pada data tersebut, tampak bahwa redaktur mematahkan asumsi dan prediksi Pemerintah Indonesia terhadap pandemi Covid-19, yaitu *penambahan angka kasus baru bahkan seperti berkejaran, berlomba untuk memecahkan rekor*. Wacana normal baru yang digelar pada bulan Juni 2020 didasarkan atas asumsi tersebut. Pada faktanya, di bulan Juni, semakin hari kasus Covid-19 justru semakin meningkat. Apabila data (19) dikaitkan dengan topik makroglobal, diartikan bahwa perlu ada penindakan tegas atas ketidakpatuhan masyarakat terhadap tatanan normal baru yang telah diberlakukan. Data (19) menunjukkan bahwa atas adanya penambahan kasus positif Covid-19 di masa normal baru, perlu penindakan terhadap pelanggar agar menjadi lebih disiplin demi penekanan angka kenaikan kasus Covid-19.

Lead pada data (20) berikut merupakan bagian dari *Summary* editorial *Media Indonesia*. *Lead* ini berkaitan dengan penundaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Hal tersebut ditampilkan dalam data berikut.

- (20) PEMILIHAN kepala daerah yang semula hendak dilaksanakan serentak pada 23 September akhirnya ditunda hingga Desember. Penundaan pilkada di 270 daerah itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. (69/MI/11052020/P1/K1-2/Superstruktur/Lead)

Data (20) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Normal Baru Pilkada*. Pada data (20) ditampilkan informasi penundaan pemilihan kepala daerah yang telah disahkan secara yuridis melalui Perppu akibat pandemi Covid-19. Pilkada yang seharusnya dilangsungkan pada bulan September 2020, ditunda sampai pada bulan Desember 2020. Hal tersebut terkait dengan banyaknya persiapan yang tidak terealisasi akibat pandemi. Apabila dikaitkan dengan topik makroglobal, pelaksanaan pilkada harus tetap berpegang teguh pada tatanan hidup normal baru. Data (20) menunjukkan bahwa pilkada yang ditunda merupakan jeda yang dilakukan agar sejalan dengan persiapan dan harapan turunnya kurva kasus Covid-19 sebelum pilkada dilangsungkan.

Kemudian data berikutnya menunjukkan *Lead* dari editorial *Media Indonesia* yang berkaitan dengan diterapkannya normal baru, tidak menandakan bahwa pandemi telah dikalahkan. Berikut merupakan tampilan data (21) beserta uraiannya.

- (21) KENORMALAN baru atau *new normal* sama sekali belum menjadi kemenangan melawan korona. Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo, *new normal* ialah upaya produktif, tetapi tetap aman dari covid-19. (80/MI/27052020/P1/K1-2/Superstruktur/Lead)

Data (21) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Pendisiplinan New Normal*. Pada data (21), redaktur menyampaikan bahwa

kenormalan baru bukan merupakan titik akhir bagi pandemi Covid-19 di Indonesia. Normal baru adalah upaya menjaga produktivitas dengan tetap berpegang teguh pada tatanan normal baru agar terhindar dari penularan virus. Data (21) ditulis ketika normal baru masih merupakan wacana dari pemerintah. Atas analisis data (21), diketahui bahwa perlu ada sosialisasi terkait normal baru agar tidak didefinisikan sebagai kehidupan yang kembali normal seperti semula, tetapi merupakan gaya hidup baru yang dijalankan di tengah pandemi. Hal tersebut menjadi penting sebab penularan virus dapat ditekan apabila masyarakat memahami normal baru dengan tepat dan benar.

Berikutnya masih merupakan *Lead* dari editorial *Media Indonesia*. *Lead* pada data (22) berikut ini berkaitan dengan penerapan normal baru yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

- (22) SALAH satu penentu sukses atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan ialah seberapa besar partisipasi masyarakat. Pun demikian dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru di tengah pandemi covid-19 yang masih menyandera bangsa ini. (95/MI/28052020/P1/K1-2/Superstruktur/*Lead*)

Data (22) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Partisipasi Publik di Era Normal Baru*. Data (22) dimunculkan oleh redaktur sebagai pendahuluan pada teks editorial. Berkenaan dengan pengimplementasian kebijakan pemerintah yang menjadi pembahasan utama, redaktur menyampaikan bahwa kebijakan mengenai normal baru di tengah pandemi akan berjalan jika publik berpartisipasi penuh. Hal tersebut ditunjukkan pada proposisi pertama, yaitu *salah satu penentu sukses atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan*
commit to user

ialah seberapa besar partisipasi masyarakat. Jika dikaitkan dengan topik makroglobal, perlu ada penyikapan dan partisipasi yang baik oleh masyarakat atas keputusan pemerintah dalam upaya membuka kehidupan normal baru. Atas analisis data (22), diartikan bahwa normal baru membutuhkan partisipasi masyarakat agar memahami bahwa kebijakan pemerintah memiliki tujuan dalam penerapan tatanan normal baru dan sukses atau tidaknya kebijakan bergantung pada partisipasi masyarakat itu sendiri.

Kemudian, *Lead* dari editorial *Media Indonesia* pada data (23) berikut ini merupakan *Lead* yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan di masa pandemi Covid-19 dan dampak yang mengenainya. Berikut adalah data beserta analisisnya.

- (23) PARIWISATA merupakan salah satu sektor paling terdampak oleh pandemi covid-19. Serangan virus nan masif membuat banyak negara dan wilayah memberlakukan karantina, larangan masuk, dan berbagai bentuk pembatasan lain bagi warga dan wisatawan. (114/MI/30052020/P1/K1-2/Superstruktur/*Lead*)

Data (23) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Produk Wisata di Era New Normal*. Data (23) dimunculkan oleh redaktur sebagai pendahuluan pada teks editorial. Berkenaan dengan kepariwisataan yang menjadi pembahasan utama, redaktur menyampaikan bahwa pembukaan sektor pariwisata di tengah pandemi perlu dipertimbangkan oleh industri pariwisata, karena merupakan sektor paling terdampak. Hal tersebut ditunjukkan pada proposisi *pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak oleh pandemi covid-19*. Jika dikaitkan dengan topik makroglobal, kegiatan pariwisata juga perlu menjadikan tatanan normal baru sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan

produk pariwisata di masa normal baru. Pada data (23) ditunjukkan bahwa kepariwisataan dapat dihidupkan kembali di masa normal baru dengan mengantongi izin dan kebijakan dari pemerintah. Produk wisata juga diharuskan untuk memberlakukan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di destinasi wisata.

Lead yang terdapat dalam editorial *Media Indonesia* berikutnya berkaitan dengan pulihnya rupiah di masa normal baru. Hal tersebut ditampilkan pada data (24) berikut ini.

- (24) PASAR merespons positif atas kebijakan transisi menuju kenormalan baru. Kepercayaan investor perlahan-lahan pulih bersamaan rupiah cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat. (127/MI/05062020/P1/K1-2/Superstruktur/*Lead*)

Data (24) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline* **Rupiah Menuju Kenormalan Baru**. Data (24) memuat opini redaktur terkait pasar modal yang merespons baik kehidupan normal baru di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan pada proposisi, *pasar merespons positif atas kebijakan transisi menuju kenormalan baru*. Dua hal yang perlu digarisbawahi adalah kembalinya kepercayaan investor atau penanam modal pada Indonesia dan penguatan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar AS. Data (24) menunjukkan bahwa pemberlakuan normal baru berdampak positif terhadap sektor ekonomi di antaranya adalah kembali berjalannya pasar modal dan rupiah yang menguat. Selain *Lead* yang berkenaan dengan nasib rupiah di masa pandemi, pada editorial *Media Indonesia* juga terdapat *Lead* yang berkaitan dengan perpanjangan PSBB di Ibukota Jakarta. Hal tersebut ditampilkan pada data (25) berikut.

- (25) SETELAH diperpanjang tiga kali berturut-turut, masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta kembali diperpanjang untuk keempat kalinya. (143/MI/06062020/P1/K1/Superstruktur/*Lead*)

Data (25) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline Transisi Menuju Kenormalan Baru*. Redaktur memberikan pandangan terhadap upaya pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dilakukan sebanyak empat kali berturut-turut. Perpanjangan PSBB keempat disebut sebagai masa transisi sebelum Jakarta mencapai kehidupan normal baru. Atas analisis data (25), diketahui bahwa PSBB di Jakarta merupakan tahap peralihan menuju normal baru. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan sekaligus latihan agar normal baru dapat diterapkan dan diberlakukan dengan baik.

Terakhir, *Lead* dari editorial *Media Indonesia* pada data (26) berikut berkaitan dengan normal baru sebagai opsi yang harus diterima bersama agar ekonomi pulih. Berikut merupakan data sekaligus analisisnya.

- (26) KEHIDUPAN *new normal* sudah di depan mata. Menerima kenormalan baru di masa pandemi covid-19 bukanlah bentuk kepasrahan, apalagi kekalahan. Ini adalah pilihan yang mesti diambil bahwa urusan kesehatan dan ekonomi harus sama-sama diperjuangkan. (160/MI/11062020/P1/K1-3/Superstruktur/*Lead*)

Data (26) merupakan *Lead* dari teks editorial dengan *Headline New Normal bukan Celah untuk Lengah*. Pada data (26) redaktur menggambarkan kehidupan normal baru yang telah berjalan sejak awal Juni 2020. Hal tersebut dibuktikan pada proposisi pertama, yaitu *kehidupan new normal sudah di depan mata*, dengan konteks penulisan editorial tersebut pada 11 Juni 2020. Redaktur

menjelaskan bahwa penerimaan atas diberlakukannya normal baru merupakan sebuah pilihan yang harus diambil. Apabila dikaitkan dengan topik makroglobal, kehidupan normal baru yang telah diterapkan seharusnya nihil dari segala kelalaian dan kelengahan. Atas analisis data (26), normal baru yang telah dijalankan perlu dipahami sebagai sebuah jalan tengah agar kesehatan dan ekonomi sama-sama berjalan lancar.

Berdasarkan hasil analisis, dominasi *Leads* pada editorial *Kompas* berkaitan dengan pelonggaran PSBB, persiapan normal baru di beberapa sektor dan beberapa wilayah, serta perlunya fokus dan disiplin serta bertindak tegas di masa normal baru. Di sisi lain, *Leads* pada editorial *Media Indonesia* berkaitan dengan hal-hal di luar Covid-19, tetapi masih memiliki keterkaitan dengan tema normal baru seperti pemilihan kepala daerah, partisipasi publik dan kebijakan pemerintah terkait normal baru, serta pembukaan sektor pariwisata dan ekonomi.

C. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat merupakan substruktur mikro dari elemen sintaksis. Bentuk kalimat berkaitan dengan fungsi sintaktik dan peran semantis, pembentukan kalimat aktif maupun pasif, bahkan susunan kata. Selain itu, dengan bentuk kalimat dapat diketahui bagaimana wacana dibuat dengan eksplisit atau implisit. Analisis bentuk kalimat berikut merupakan tinjauan atas teks editorial tentang normal baru dalam masa pandemi Covid-19 pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*.

- (27) Wacana pelanggaran PSBB **mengemuka**, antara lain, karena pembatasan sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti. (6/K/03062020/P3/K1-2/Bentuk Kalimat)

Data (27) merupakan salah satu bentuk kalimat aktif dalam struktur teks editorial bertajuk *Menimbang Normal Baru*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja aktif bervalensi satu dengan subjek tanpa keberadaan objek, yaitu *mengemuka*. Redaktur menyampaikan informasi secara eksplisit meskipun subjek yang ditampilkan adalah subjek *non-agentive*. Data (27) menunjukkan bahwa pelanggaran PSBB digaungkan karena terdapat alasan bahwa pembatasan sosial menjadikan kegiatan ekonomi terhenti dan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Data selanjutnya adalah data bentuk kalimat dari editorial *Kompas* edisi 4 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (28) dan analisis data bentuk kalimat.

- (28) Tak bisa **disangkal**, ada perasaan mendua (*mixed feeling*) di kalangan orangtua, siswa, mahasiswa, dan birokrasi terkait keamanan pembelajaran tatap muka. (14/K/04062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (28) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Dini, Normal Baru untuk Pendidikan*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja *disangkal*. Informasi ditampilkan redaktur secara implisit sebab agen pengisi peran semantis yang melakukan penyangkalan atas keamanan pembelajaran tatap muka adalah redaktur dari media itu sendiri. Data (28) menunjukkan bahwa media tidak dapat menyangkal realitas bahwa terdapat banyak pertimbangan yang dirasakan, baik dari sisi pendidik, peserta didik,

maupun orang tua, manakala membiarkan sektor pendidikan kembali beroperasi di masa normal baru didasarkan atas tingkat keamanannya ketika berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran tatap muka.

Data selanjutnya adalah data bentuk kalimat dari editorial *Kompas* edisi 9 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (29) dan analisis data bentuk kalimat.

(29) Di tengah euforia memasuki tahap normal baru, jumlah kasus Covid-19 justru **naik** di sejumlah daerah. (27/K/09062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (29) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Menahan Ledakan di Daerah*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja *naik* yang bervaleksi satu berupa subjek *non-agentive* dan diikuti dengan keterangan tempat. Informasi ditampilkan redaktur secara implisit sebab pada data tersebut beserta konteksnya tidak ada orang yang dengan sengaja menaikkan jumlah kasus Covid-19. Data (29) menunjukkan bahwa pada penerapan normal baru rupanya tetap membuat kasus Covid-19 tidak berhenti, justru naik di sejumlah daerah di Indonesia.

Data selanjutnya adalah data bentuk kalimat dari editorial *Kompas* edisi 10 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (30) dan analisis data bentuk kalimat.

(30) Pelonggaran aktivitas ekonomi mulai **dilakukan**. (37/K/10062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (30) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Fokuslah pada Covid-19*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja *dilakukan* yang bervaleksi satu berupa subjek *non-agentive*

tanpa objek. Informasi ditampilkan redaktur secara implisit sebab tidak menyertakan agen pengisi peran semantis yang melakukan tindakan pelanggaran aktivitas ekonomi. Objek implisit dalam susunan kalimat tersebut adalah pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan pelanggaran aktivitas ekonomi. Data (30) menunjukkan bahwa pada bulan Juni 2020, awal penerapan normal baru, aktivitas ekonomi mulai dijalankan dan laju gerakannya dilonggarkan seiring dengan berjalannya normal baru di Indonesia.

Data selanjutnya adalah data bentuk kalimat dari editorial *Kompas* edisi 16 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (31) dan analisis data bentuk kalimat.

- (31) Infeksi Covid-19 masihlah **merupakan** ancaman nyata dan serius. (46/K/16062020/P1/K1-2/Bentuk Kalimat)

Data (31) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Kuncinya adalah Disiplin*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja *merupakan* sebagai pembentuk definisi subjek, yaitu *infeksi Covid-19*. Informasi ditampilkan redaktur secara eksplisit, meskipun yang didefinisikan adalah subjek *non-agentive*. Data (31) menunjukkan persebaran virus Covid-19 masih banyak ditemukan dan membahayakan setiap orang, sehingga perlu ditanggapi dengan serius.

Data selanjutnya adalah data bentuk kalimat dari editorial *Kompas* edisi 23 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (32) dan analisis data bentuk kalimat.

- (32) Asumsi pemerintah bahwa puncak penularan Covid-19 berlangsung pada bulan Mei ternyata **harus direvisi**. (57/K/23062020/P2/K1/Bentuk Kalimat)

commit to user

Data (32) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Saatnya Bertindak Tegas*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja *harus direvisi* yang bervalensi satu berupa subjek *non-agentive*. Informasi ditampilkan redaktur secara implisit sebab subjek yang melakukan perevisian terhadap asumsi pemerintah tidak ditampilkan. Data (32) menunjukkan bahwa pemerintah yang memprediksi Covid-9 akan berakhir pada bulan Mei 2020, ternyata tidak benar, sebab pada pembukaan normal baru di awal bulan Juni 2020 kasus Covid-19 justru meningkat.

Data (33) berikut ini merupakan data bentuk kalimat dari editorial *Media Indonesia* edisi 11 Mei 2020. Berikut merupakan tampilan beserta analisis data bentuk kalimat.

(33) PEMILIHAN kepala daerah yang semula hendak dilaksanakan serentak pada 23 September akhirnya **ditunda** hingga Desember. (70/MI/11052020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (33) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Normal Baru Pilkada*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja *ditunda* yang bervalensi satu berupa subjek *non-agentive*. Peran semantis agen di dalam kalimat tidak diisi oleh redaktur sehingga orang yang terlibat melakukan penundaan terhadap pemilihan kepala daerah tidak ditampilkan dalam teks (implisit). Data (33) menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala daerah perlu ditunda sebab pandemi Covid-19 masih berlangsung serta ditujukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Data (34) berikut ini merupakan data bentuk kalimat dari editorial *Media Indonesia* edisi 27 Mei 2020. Berikut merupakan tampilan data dan analisis data bentuk kalimat.

- (34) KENORMALAN baru atau *new normal* sama sekali **belum menjadi** kemenangan melawan korona. (81/MI/27052020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (34) merupakan salah satu bentuk kalimat aktif dalam struktur teks editorial bertajuk *Pendisiplinan New Normal*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan frasa verba *belum menjadi* yang bervalensi dua dan berbentuk aktif dengan menghadirkan subjek dan objek. Redaktur menyampaikan informasi secara eksplisit meskipun subjek yang ditampilkan adalah subjek *non-agentive*. Data (34) menunjukkan bahwa normal baru bukanlah bentuk kemenangan atas pandemi. Normal baru merupakan babak awal dalam menyikapi dan menerapkan tatanan baru di masa pandemi Covid-19 sehingga harus tetap waspada terhadap ancaman penyebaran virus.

Data selanjutnya merupakan data bentuk kalimat dari editorial *Media Indonesia* edisi 28 Mei 2020. Berikut merupakan tampilan data (35) dan analisis data bentuk kalimat.

- (35) SALAH satu penentu sukses atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan **ialah** seberapa besar partisipasi masyarakat. (96/MI/28052020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (35) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Partisipasi Publik di Era Normal Baru*. Hal tersebut dibuktikan

dengan keberadaan kata kerja *ialah* sebagai pembentuk definisi objek, yaitu *salah satu penentu sukses tidaknya implementasi sebuah kebijakan*. Redaktur menyampaikan informasi secara eksplisit, meskipun yang didefinisikan adalah subjek *non-agentive*. Tampak dari data (35), redaktur memaparkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk acuan mengenai berhasil atau tidaknya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Data berikut ini merupakan data bentuk kalimat dari editorial *Media Indonesia* edisi 30 Mei 2020. Berikut merupakan tampilan data (36) dan analisis data bentuk kalimat.

- (36) PARIWISATA **merupakan** salah satu sektor paling terdampak oleh pandemi covid-19. (115/MI/30052020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (36) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Produk Wisata di Era New Normal*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja *merupakan* sebagai pembentuk definisi subjek, yaitu *pariwisata*. Informasi ditampilkan redaktur secara eksplisit, meskipun yang didefinisikan adalah subjek *non-agentive*. Data (36) menunjukkan bahwa sektor kepariwisataan terkena dampak yang signifikan karena di masa pandemi Covid-19, banyak tuntutan untuk tidak mengoperasikan hal-hal yang berisiko menyebabkan penularan.

Data selanjutnya merupakan data bentuk kalimat dari editorial *Media Indonesia* edisi 5 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (37) dan analisis data bentuk kalimat.

- (37) PASAR **merespons** positif atas kebijakan transisi menuju kenormalan baru. (128/MI/05062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (37) merupakan salah satu bentuk kalimat aktif dalam struktur teks editorial bertajuk *Rupiah Menuju Kenormalan Baru*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja predikatif bervalensi dua yang berbentuk aktif dengan menghadirkan subjek dan objek. Informasi ditampilkan redaktur secara eksplisit dengan opsi menggunakan kalimat aktif dibandingkan dengan kalimat pasif. Data (37) menunjukkan bahwa *pasar* merupakan bentuk kekuatan penawaran dan permintaan terkait barang dan jasa, serta mata uang rupiah yang melambung karena pulihnya perekonomian Indonesia di masa transisi normal baru yang diterapkan di masyarakat.

Data berikut ini merupakan data bentuk kalimat dari editorial *Media Indonesia* edisi 6 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (38) dan analisis data bentuk kalimat.

- (38) SETELAH diperpanjang tiga kali berturut-turut, masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta **kembali diperpanjang** untuk keempat kalinya. (144/MI/06062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (38) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *Transisi Menuju Kenormalan Baru*. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata kerja *kembali diperpanjang*. Informasi ditampilkan redaktur secara implisit dengan penghilangan subjek *agentive* dan menempatkan keterangan di awal kalimat sehingga orang yang melakukan tindakan perpanjangan PSBB tidak ditampilkan di dalam teks. Data (38) menunjukkan

bahwa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta sudah mencapai empat kali dan perpanjangan keempat merupakan masa transisi DKI Jakarta menuju normal baru.

Terakhir, data berikut ini merupakan data bentuk kalimat dari editorial *Media Indonesia* edisi 11 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (39) dan analisis data bentuk kalimat.

(39) KEHIDUPAN *new normal* sudah di depan mata. (161/MI/11062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (39) merupakan salah satu bentuk kalimat pasif dalam struktur teks editorial bertajuk *New Normal bukan Celah untuk Lengah*. Secara harfiah, kalimat tersebut tidak memiliki predikat dan hanya terdiri atas subjek dan keterangan. Kalimat tersebut dapat dikatakan pasif sebab kata *sudah* merupakan adverbial yang berfungsi untuk menjadi keterangan bagi kata kerja, kata sifat, kata benda predikatif, atau kalimat. Apabila ditinjau lebih lanjut, redaktur menghilangkan predikat berupa kata *berada* yang seharusnya mengikuti adverbial *sudah*. Data (39) menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki pintu gerbang kehidupan normal baru di masa pandemi Covid-19.

Atas analisis mikrostruktur bentuk kalimat, diketahui bahwa bentuk kalimat yang diambil dari setiap kalimat pertama dari *Lead* masing-masing editorial memiliki kecenderungan frekuensi yang hampir sama. Bentuk kalimat yang dianalisis berupa kalimat aktif dan kalimat pasif. Baik dari editorial *Kompas* maupun *Media Indonesia*, kalimat pasif mendominasi kemunculannya dalam *Leads* editorial. Pada koran *Kompas*, ditemukan satu kalimat aktif dan lima

kalimat pasif. Sementara itu, *Media Indonesia*, memuat dua kalimat aktif dan lima kalimat pasif. Hal ini dapat dimaknai bahwa *Lead* sebagai bagian pendahuluan dalam skema wacana editorial didominasi dengan awalan kalimat pasif.

D. Kata ganti

Kata ganti merupakan kategori gramatikal untuk menunjukkan keanggotaan pronominal yang dapat menyebabkan adanya jarak, polarisasi antarkelompok, bentuk kesopanan atau formalitas, serta fungsi sosial lainnya. Kata ganti digunakan untuk memanipulasi hubungan sosial antara media dan khalayak pembaca. Berikut merupakan tabel data yang menunjukkan frekuensi penggunaan kata ganti berupa pronomina persona pertama jamak inklusif dan pronomina persona ketiga jamak. Setelah pemaparan tabel, dilanjutkan dengan analisis kata ganti dalam teks editorial normal baru masa pandemi Covid-19 pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*.

Tabel 4.2 Frekuensi Penggunaan Kata Ganti dalam Teks Editorial tentang Normal Baru pada Koran *Kompas* dan *Media Indonesia*

No.	Sumber	Kata Ganti	
		<i>kita</i>	<i>mereka</i>
1	<i>Kompas</i>	10	3
2	<i>Media Indonesia</i>	17	2
	Jumlah	27	5

- (40) Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi virus Covid-19 menuju situasi normal baru menuntut kesadaran bersama. Kesadaran, bahwa persoalan **kita** saat ini disebabkan merebaknya virus Covid-19 dan karena itu penularan Covid-19 harus diselesaikan dahulu. (3/K/03062020/P2/K1-2/Kata Ganti)
- (41) Indonesia memiliki peluang besar menumbuhkan ekonominya melalui konsumsi mengingat jumlah penduduk yang besar dan berusia muda. **Kita** harus meraih peluang itu. (12/K/03062020/P11/K1-2/Kata Ganti)

Data sajian (40) dan (41) berisi pengacuan pronomina persona pertama jamak inklusif, yaitu *kita*. Penggunaan kata ganti tersebut digunakan untuk membentuk suatu hubungan imajinatif antara redaktur dan pembaca dari editorial *Kompas* berjudul *Menimbang Normal Baru*. Pada data (40), redaktur menyampaikan pada pembaca bahwa sebelum dilaksanakannya pencaangan normal baru di masa pandemi Covid-19, perlu adanya kesadaran bersama terkait dengan persebaran virus yang belum bisa dikendalikan. Hal tersebut dapat sedikit demi sedikit dikurangi dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga penularan Covid-19 dapat dihambat dan selesai sebelum memasuki masa pelonggaran PSBB dan era normal baru.

Sementara itu, pada data (41), redaktur menyampaikan bahwa negara Indonesia mampu menumbuhkan dan memulihkan ekonomi karena masyarakat yang konsumtif. Selain itu, jumlah penduduk yang besar serta berusia terhitung muda dan produktif menjadi peluang yang harus dikejar bersama demi terciptanya perputaran ekonomi di masa pandemi.

Data berikut ini merupakan data kata ganti dari editorial *Kompas* edisi 4 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (42), (43), dan (43) serta analisis data kata ganti.

- (42) Di sisi lain, angka penularan Covid-19 masih belum bisa sepenuhnya diredam. Setiap hari **kita** menyaksikan angka **mereka** yang terpapar infeksi terus meningkat, artinya bahaya penularan virus korona masih mengintai. (16/K/04062020/P3/K1-2/Kata Ganti)
- (43) **Kita** sudah mendengar penjelasan Kepala Negara ketika meninjau Masjid Istiqlal, Selasa (2/6/2020), pembukaan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk sekolah, akan dilakukan melalui pertimbangan ketat. Angka penularan virus di setiap daerah jadi pertimbangan penting. (20/K/04062020/P6/K1-2/Kata Ganti)
- (44) Secara keseluruhan, **kita** menggarisbawahi bahwa pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka hingga saat ini belum didukung oleh pijakan yang kuat. **Kita** berpandangan, yang bisa dilakukan adalah sekolah mempersiapkan segala fasilitas yang diperlukan untuk penegakan normal baru, termasuk protokol kesehatan yang akan diterapkan, dan pada sisi lain **kita** harus sabar menunggu angka penularan menurun hingga pada tingkat aman. Sekali lagi **kita** diingatkan agar menyangkut urusan penting, seperti pendidikan, jangan **kita** didikte oleh kemendesakan apa pun. (25/K/04062020/P10/K1-3/Kata Ganti)

Data (42), (43), dan (44) berisi pengacuan pronomina persona pertama jamak inklusif, yaitu *kita*, dan khusus pada data (42) terdapat pengacuan pronomina persona ketiga jamak, yaitu *mereka*. Penggunaan kata ganti *kita* pada data (42), (43), dan (44) tersebut digunakan untuk membentuk suatu hubungan imajinatif antara redaktur dan pembaca dari editorial *Kompas* berjudul *Dini, Normal Baru untuk Pendidikan*. Pada data (42) ditampilkan peningkatan kasus yang terjadi setiap hari di dalam teks, kemudian menunjukkan hubungan yang mengacu pada publik sebagai bagian dari kelompok yang tidak terpapar Covid-19

dan membedakan kelompok lain menggunakan pengacuan kata ganti *mereka* bagi yang terpapar Covid-19.

Di samping itu, data (43) ditampilkan oleh redaktur dengan memberikan gambaran mengenai khalayak yang telah mengetahui bagaimana Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bahwa rencana pembukaan aktivitas sekolah di masa normal baru akan melalui berbagai pertimbangan ketat. Hal tersebut tampak pada proposisi *kita sudah mendengar penjelasan Kepala Negara ketika meninjau Masjid Istiqlal, Selasa (2/6/2020), pembukaan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk sekolah, akan dilakukan melalui pertimbangan ketat*. Salah satu kategori yang menjadi pertimbangan adalah angka penularan Covid-19 di daerah. Artinya, apabila suatu daerah masih memiliki angka penularan yang tinggi, pembukaan aktivitas pembelajaran di sekolah tentu akan dipertimbangkan lagi.

Pada data (44), ditampilkan hubungan imajinatif antara redaktur dan pembaca ditandai dengan adanya kata ganti *kita*. Lebih dari itu, redaktur memaparkan substansi dari data (44) berupa pertimbangan mengenai pembukaan sekolah yang masih perlu menjadi perhatian khusus sebab banyak hal yang harus disiapkan. Persiapan bukan hanya fasilitas pendukung protokol kesehatan, akan tetapi juga meliputi kesiapan antara siswa, orang tua, dan guru. Redaktur menggunakan kata ganti *kita* karena ditujukan bagi khalayak pembaca bahwa perihal pendidikan merupakan urusan bersama yang harus ditimbang secara hati-hati dan tidak tergesa dari segala desakan dari pihak mana pun.

Selanjutnya adalah data kata ganti dari editorial *Kompas* edisi 9 Juni 2020. Berikut adalah tampilan data (45) dan (46) beserta analisisnya.

- (45) Sama seperti di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia, kepadatan dan mobilitas penduduk memudahkan virus SARS-CoV-2 menyebar. Apalagi, banyak anggota masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. **Mereka** tidak disiplin memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak rajin menjaga kebersihan dan mencuci tangan, serta melanggar larangan untuk berkumpul dan berkerumun. (30/K/09062020/P5/K1-3/Kata Ganti)
- (46) Surveilans dan pemeriksaan massal harus digalakkan ke sejumlah wilayah di Tanah Air, jangan lagi menunggu sampai terjadi ledakan kasus seperti hari-hari ini. Persiapkan infrastruktur dan sumber daya kesehatan, dengan segala sarana pendukungnya. Ingat, masa depan **kita** dipertaruhkan. (35/K/09062020/P9/K1-3/Kata Ganti)

Data (45) dan data (46) merupakan data yang berasal dari teks editorial *Kompas* berjudul *Menahan Ledakan di Daerah*. Kedua data tersebut masing-masing memuat kata ganti berupa pronomina persona ketiga jamak, *mereka*, dan pronomina persona pertama jamak inklusif, *kita*. Pada data (45), redaktur menampilkan informasi bahwa di tahap awal penerapan normal baru, justru membuat Covid-19 lebih menyebar luas. Hal tersebut dijelaskan karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Redaktur menggunakan kata ganti *mereka* untuk menciptakan gap dan secara tidak langsung menyatakan bahwa redaktur serta khalayak pembaca bukan termasuk ke dalam kelompok pelanggar protokol kesehatan yang menyebabkan kenaikan kasus tersebut.

Kemudian pada data (46), redaktur mengemukakan bahwa pemantauan dan pemeriksaan massal perlu dilakukan agar mengetahui laju persebaran Covid-19, tanpa harus menunggu kasus yang melonjak tajam terlebih dahulu, khususnya di tahap-tahap awal pelaksanaan normal baru. Redaktur menggunakan kata ganti *kita* dalam proposisi terakhir terkait masa depan bangsa atas terjadinya pandemi

Covid-19 tersebut. Redaktur *Kompas* membentuk hubungan imajinatif seolah pihaknya dengan khalayak pembaca berada pada situasi dan pemikiran yang sama. Oleh karena itu, penggunaan kata ganti tersebut berpotensi untuk membuat khalayak pembaca merasa bahwa perkara Covid-19 merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama.

Data berikut ini merupakan data kata ganti dari editorial *Kompas* edisi 16 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data (47) dan analisisnya.

- (47) Masyarakat harus diyakinkan dalam bahasa terang bahwa situasinya belum normal dan belum aman! Ketika pemerintah mengambil sikap beradaptasi dengan Covid-19, saatnya **kita** melindungi diri **kita** sendiri agar tidak tertular atau menulari orang lain. Kelompok paling berisiko tidak perlu ke luar rumah. Kalau terpaksa harus ke luar rumah, patuhilah protokol kesehatan. Disiplin menjadi kata kunci! (54/K/16062020/P8/K1-5/Kata Ganti)

Data (47) merupakan data sajian kata ganti dari teks editorial berjudul ***Kuncinya adalah Disiplin***. Redaktur memaparkan bahwa ia dan khalayak pembaca perlu melindungi diri sebab keadaan belum sepenuhnya normal dan belum aman. Redaktur menekankan agar khalayak dapat melindungi diri sendiri dari tertular ataupun menulari orang lain. Penggunaan kata ganti *kita* pada data tersebut ditujukan untuk membentuk hubungan imajinatif seolah antara redaktur dan khalayak pembaca memiliki tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, penggunaan kata ganti tersebut berpotensi untuk membuat khalayak pembaca merasa bahwa penularan Covid-19 perlu dihentikan dengan cara mulai mendisiplinkan diri sendiri dalam menaati protokol kesehatan.

Kemudian, berikut ini merupakan data kata ganti dari editorial *Kompas* edisi 23 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan dan analisis kata ganti pada data (48), (49), (50), (51), dan (52).

- (48) Pemicu peningkatan kasus mengerucut pada dua hal: masyarakat yang tidak disiplin dan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak tegas. **Kita** melihat, negara-negara yang berhasil menangani Covid-19 memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dan tegas menegakkan aturan. Sebutlah di antaranya Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. (60/K/23062020/P6/K1-3/Kata Ganti)

Pada data (48), terdapat muatan kata ganti berupa pronomina persona pertama jamak inklusif, *kita*. Kata ganti tersebut dimunculkan oleh redaktur terkait dengan peningkatan kasus Covid-19 yang disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu ketidaksiplinan masyarakat dan ketidaktegasan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Pada proposisi kedua, kata ganti tersebut digunakan oleh redaktur sebagai bentuk imajinatif bahwa khalayak pembaca sama-sama mengetahui tentang penegakan kedisiplinan di negara-negara lain sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Oleh karena itu, secara tidak langsung pembaca ditempatkan pada situasi seolah telah mengetahui informasi yang disampaikan oleh redaktur.

- (49) Karakteristik masyarakat Indonesia memang khas menghadapi bencana. Tatkala tsunami Aceh melanda 2004, misalnya, rakyat lebih mudah menerima kondisi karena menganggap itu bagian dari takdir. **Mereka** bisa cepat bangkit. Namun, di sisi lain, orang jadi tidak belajar dari bencana. (61/K/23062020/P7/K1-4/Kata Ganti)
- (50) Politik identitas yang marak belakangan menambah ruwet persoalan. Banyak yang merasa benar sendiri sehingga muncullah perilaku mencuri jenazah, mengusir petugas kesehatan di lingkungannya, bahkan menolak tes massal. Padahal, **kita** tahu, hanya dengan surveilans, tes massal, dan penerapan protokol kesehatan secara

- ketat, **kita** bisa menekan angka penularan dan selamat dari Covid-19. (63/K/23062020/P8/K1-3/Kata Ganti)
- (51) Ketika tekanan ekonomi membuat orang yang berpenghasilan harian terpaksa keluar rumah, bisa jadi **mereka** berserah pada takdir. Namun, apakah takdir juga alasan **mereka** yang nekat berdesak-desakan di tempat wisata, hari bebas kendaraan bermotor, dan melanggar semua protokol kesehatan? (65/K/23062020/P9/K1-2/Kata Ganti)
- (52) Ketahanan fisik, ekonomi, dan tata sosial kemasyarakatan **kita** benar-benar diuji belakangan ini. Pada titik inilah, baik pemerintah pusat maupun daerah harus tegas. Beri sanksi **mereka** yang melanggar aturan. Dalam hal ini, para pengambil keputusan sebaiknya melibatkan para ahli ilmu sosial agar semua kebijakan pas dengan kondisi sosial masyarakat. (68/K/23062020/P10/K1-4/Kata Ganti)

Data (49) sampai dengan data (52) merupakan data-data yang memuat pronomina persona yang dimunculkan oleh redaktur *Kompas*. Data (49) dan (51) memuat kata ganti berupa pronomina persona ketiga jamak, yaitu *mereka*. Sementara itu, pada data (50) terdapat data pronomina persona pertama jamak inklusif dan data (52) memuat keduanya. Keempat data tersebut merupakan bagian dari teks editorial mengenai berbagai macam hal yang menjadi pemicu kenaikan kurva positif Covid-19 sehingga berujung pada keharusan pemerintah untuk bertindak tegas agar kasus Covid-19 dapat ditekan.

Pada data (49), redaktur menggambarkan bagaimana karakteristik orang Indonesia manakala menghadapi suatu bencana dengan menempatkan peristiwa tsunami yang melanda Aceh di tahun 2004 sebagai bentuk permisalan. Redaktur menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mudah menerima kondisi (bencana) sebab dipercaya merupakan bagian dari takdir yang ditetapkan Tuhan. Masyarakat Indonesia dikatakan mudah bangkit dari situasi tersebut, tetapi terdapat fakta lain bahwa masyarakat menjadi tidak belajar atas bencana tersebut. Kata ganti *mereka*

ditampilkan oleh redaktur untuk mengelompokkan orang lain tanpa menyertakan diri untuk masuk di dalamnya.

Data (50) memuat informasi mengenai hal-hal di luar perkara kesehatan yang berpengaruh besar, misalnya adalah politik identitas. Politik identitas merupakan pemikiran yang dipaparkan oleh orang atau kelompok orang dengan bersangkutan dengan penonjolan identitas yang diusung. Fenomena tersebut berujung pada perasaan paling benar yang tertanam di diri masyarakat dan memunculkan perilaku yang tidak sesuai dengan upaya pencegahan penularan Covid-19. Setelahnya, redaktur menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan sebagai tindakan untuk menekan kasus Covid-19. Kata ganti *kita* ditampilkan oleh redaktur sebagai pembentuk hubungan imajinatif yang menunjukkan setiap orang tahu bahwa hanya dengan pemantauan, tes massal, dan penerapan protokol kesehatan, bisa menjadi tameng dari penularan Covid-19.

Kemudian pada data (51), redaktur memaparkan informasi mengenai masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan atas alasan ekonomi. Pada data tersebut, ditampilkan gambaran masyarakat pekerja harian yang perlu bekerja di tengah pandemi demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, redaktur secara jelas menerangkan tindakan orang-orang tersebut sebagai pelanggar protokol kesehatan sehingga menjadi pemicu bertambahnya kasus Covid-19. Kata ganti *mereka* ditampilkan oleh redaktur dengan tujuan memisahkan diri dan diartikan bahwa hanya kelompok tersebutlah yang melakukan tindakan pelanggaran protokol kesehatan.

Terakhir, pada data (52), redaktur menyebutkan bahwa ketahanan fisik, ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat Indonesia sedang diuji. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu tegas. Selain itu, redaktur juga menyampaikan bahwa perlu diberlakukan sanksi bagi para pelanggar. Pada data (52), terdapat dua kata ganti, yaitu *kita* dan *mereka*. Kata ganti *kita* mengacu pada kondisi yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan kata ganti *mereka* mengacu pada para pelanggar yang harus dijatuhi sanksi tegas.

Data berikut ini merupakan data kata ganti dari editorial *Media Indonesia* edisi 27 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan serta analisis data (53) dan (54).

- (53) Jika pemerintah menerapkan *new normal* dalam waktu dekat, yakni saat kurva belum jelas melandai, pertarungan **kita** dalam babak baru perang melawan korona ini sesungguhnya amat besar. Pertaruhan ini **kita** gantungkan pada kedisiplinan orang per orang. (87/MI/27052020/P6/K1-2/Kata Ganti)
- (54) Bagaimanapun tegasnya aparat, **kita** sudah berulang kali melihat efek kejut makin tidak mempan di masyarakat **kita**. (91/MI/27052020/P15/K1/Kata Ganti)

Data (53) dan (54) merupakan data yang mencantumkan bentuk kata ganti berupa pronomina persona pertama jamak inklusif, yaitu *kita*. Kedua data tersebut berisi argumen redaktur *Media Indonesia* mengenai normal baru. Argumen tersebut terkait dengan rencana penerapan normal baru di saat Indonesia belum mencapai titik stabil dalam penurunan kasus. Redaktur berpendapat bahwa hal tersebut akan menjadi tantangan sekaligus konflik baru karena angka penularan dapat meningkat atau menurun sesuai dengan kedisiplinan setiap orang. Kemudian, pada data (54), redaktur menyampaikan bahwa efek kejut atau gertakan dari aparat tidak berdampak di masyarakat.

Pada kedua data tersebut, redaktur memunculkan kata ganti *kita* di dalam teks sebagai bentuk penitikberatan atas proposisi yang dimunculkan bahwa antara redaktur dan khalayak pembaca terbentuk suatu hubungan imajinatif. Hal tersebut secara tidak langsung menyatukan pandangan mengenai perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi normal baru dan dalam upaya mendisiplinkan diri.

Sekumpulan data berikut ini merupakan data kata ganti dari editorial *Media Indonesia* edisi 28 Mei 2020. Berikut merupakan tampilan data serta analisis atas data (55), (56), (57), (58), dan (59).

- (55) Tatanan normal baru atau *new normal* ialah pilihan rasional. Ia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalani karena sampai detik ini belum diketahui kapan ekspansi covid-19 akan usai. **Kita** jelas tidak mungkin terus menunggu dalam ketidakpastian, sementara ekonomi harus kembali menggeliat demi menopang kehidupan rakyat. (99/MI/28052020/P2/K1-3/Kata Ganti)
- (56) Di era *new normal*, **kita** bisa tetap menjalankan aktivitas normal, tapi mesti membarenginya dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. Di sini, perubahan perilaku menjadi kunci. (101/MI/28052020/P3/K1-2/Kata Ganti)
- (57) Penilaian superketat sebelum memperbolehkan daerah memasuki era normal baru bisa menjadi langkah awal yang baik. Namun, hal itu masih jauh dari cukup. Pemberlakuan kebijakan itu perlu dukungan masyarakat secara total karena **merekalah** yang akan menjalaninya nanti. (107/MI/28052020/P6/K1-3/Kata Ganti)
- (58) **Kita** menyambut baik pemerintah yang telah membuat protokol sebagai petunjuk hidup di era normal baru nanti. Pada Senin (25/5), misalnya, terbit Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Salah satu yang diatur dalam surat keputusan itu ialah perusahaan wajib menerapkan *physical distancing* dengan jarak antarkaryawan selama bekerja di lokasi kerja, baik kantor maupun industri, minimal 1 meter. (110/MI/28052020/P9/K1-3/Kata Ganti)
- (59) Tanpa sosialisasi yang masif, **kita** khawatir tatanan normal baru justru sarat dengan pengabaian dari masyarakat. Kalau itu terjadi, penularan covid-19 akan kembali merebak di tengah aktivitas warga yang lebih bebas. (113/MI/28052020/P12/K1-2/Kata Ganti)

Data (55), (56), (57), (58), dan (59) merupakan data yang berasal dari koran *Media Indonesia* berjudul *Partisipasi Publik di Era Normal Baru*. Data (55), (56), (58), dan (59) tersebut memuat kata ganti berbentuk pronomina persona pertama jamak inklusif, *kita*. Sementara itu, pada data (57) kata ganti yang tertera adalah pronomina persona ketiga jamak, *mereka*. Pada data (55) ditampilkan informasi terkait penerapan tatanan kehidupan normal baru sebagai sebuah opsi yang harus disetujui oleh masyarakat karena perihal ekonomi juga perlu kembali berjalan.

Data (56) merupakan data lanjut yang masih berkaitan dengan data (55). Redaktur menyampaikan bahwa di era normal baru, aktivitas dapat dijalankan seperti biasa asalkan memenuhi protokol kesehatan. Redaktur memunculkan kata ganti *kita* pada data (55) dan (56) sebagai bentuk penggambaran hubungan imajinatif bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat jika harus menunggu Covid-19 selesai dan memulai kehidupan normal setelahnya sehingga redaktur menjelaskan perlunya beradaptasi terhadap normal baru demi pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan syarat harus memenuhi aturan terkait protokol kesehatan.

Selanjutnya, data (57) ditampilkan oleh redaktur berupa kata ganti *mereka*. Kata ganti tersebut mengacu pada masyarakat yang akan menjalankan tatanan kehidupan normal baru. Redaktur menyampaikan bahwa langkah utama sebelum memasuki era normal baru adalah penilaian atas kesiapan daerah. Namun, redaktur menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil perlu didukung oleh masyarakat sebab suatu kebijakan yang disetujui akan dijalankan oleh masyarakat dengan baik.

Data (58) merupakan data yang memuat kata ganti *kita*. Kata ganti tersebut dimunculkan oleh redaktur dan mengacu pada seluruh elemen masyarakat. Pada akhirnya, kata ganti tersebut membentuk hubungan imajinatif antara redaktur dan khalayak pembaca dalam hal menyetujui dan menyambut dengan baik kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan untuk memudahkan masyarakat menjalankan normal baru. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah aturan dari Menteri Kesehatan terkait panduan pencegahan di tempat kerja:

Kemudian pada data (59), redaktur menggambarkan informasi mengenai kekhawatiran antara redaktur dan khalayak pembaca terkait pengabaian protokol kesehatan pada era normal baru oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan kata ganti *kita* sebagai pembentuk hubungan imajinatif. Selain itu, redaktur juga menjelaskan bahwa hal tersebut dapat memicu naiknya kasus Covid-19 karena masyarakat sudah lebih leluasa di era normal baru.

Kemudian, berikut merupakan data kata ganti yang ditemukan dalam teks editorial *Media Indonesia* edisi 30 Mei 2020. Data (60), (61), (62), (63), dan (64) dianalisis sebagaimana berikut.

- (60) Bisnis perjalanan pun terganggu. Aktivitas penerbangan, perhotelan, kawasan dan objek wisata, jasa kuliner, serta bisnis terkait pariwisata lainnya nyaris lumpuh. Hari-hari terakhir ini, **kita** belum menyaksikan gejala pemulihan dari kondisi ‘mati suri’ tersebut. (116/MI/30052020/P2/K1-3/Kata Ganti)
- (61) Karena itu, **kita** mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mendorong sektor pariwisata agar tetap produktif di masa sulit. Dalam sidang kabinet terbatas, Kamis (28/5), Presiden meminta industri pariwisata menyiapkan konsep baru pada tatanan normal baru atau *new normal*. (121/MI/30052020/P7/K1-2/Kata Ganti)
- (62) **Kita** sepakat dengan arahan Presiden tersebut. Agar tetap *survive*, industri pariwisata memang harus menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Jika situasi pandemi di era kenormalan baru menuntut

- semua orang untuk menjalankan protokol kesehatan, industri pariwisata pun harus mengadopsi ketentuan itu dalam mengemas jasa layanan. (123/MI/30052020/P8/K1-3/Kata Ganti)
- (63) **Kita** meyakini bahwa produk-produk wisata lainnya yang lebih kreatif dan solutif dapat diciptakan oleh industri pariwisata **kita** dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing. (125/MI/30052020/P11/K1/Kata Ganti)
- (64) **Kita** mendukung upaya Kementerian Pariwisata untuk menyusun kesemua prinsip dan protokol itu sebagai standar baru bagi industri pariwisata. Dengan standar baru itu diharapkan lahir *guideline* kreatif. Ditambah dengan semangat tanpa kenal menyerah **kita** percaya pariwisata **kita** akan *survive* dan *sustain* di era *new normal*. (126/MI/30052020/P14/K1-3/Kata Ganti)

Data (60) sampai dengan data (64) merupakan sekumpulan data kata ganti dari teks editorial koran *Media Indonesia* berjudul *Produk Wisata di Era New Normal*. Kelima data tersebut memuat kata ganti berupa pronomina persona pertama jamak inklusif. Pada data (60), ditampilkan informasi mengenai berhentinya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pariwisata karena Covid-19. Pemunculan kata ganti *kita* dalam data tersebut digunakan sebagai bentuk pertautan imajinatif antara redaktur dan khalayak pembaca, mengacu pada masyarakat yang belum mendapati upaya pemulihan pariwisata Indonesia.

Selanjutnya pada data (61) dan (62) berisi informasi mengenai Presiden Joko Widodo yang meminta industri pariwisata untuk menambah produktivitas sektor pariwisata beserta konsep dalam tatanan kehidupan normal baru. Oleh karena itu, industri pariwisata dituntut untuk tetap *survive* di era normal baru. Penggunaan kata ganti *kita* dalam data tersebut menunjukkan bahwa redaktur menciptakan hubungan imajinatif dengan khalayak pembaca terkait dengan pengapresiasian dan kesepakatan yang dibuktikan dengan frasa "... *Kita*

mengapresiasi” dan “*Kita sepakat*”, artinya, masyarakat seolah-olah setuju dan melakukan apresiasi atas tindakan presiden.

Kemudian, pada data (63) dan (64) redaktur menyatakan kesetujuan terkait kreativitas produk wisata di era normal baru dan dukungan terhadap kinerja Kementerian Pariwisata. Kata ganti *kita* yang memunculkan hubungan imajinatif dengan khalayak pembaca ditampilkan oleh redaktur. Hal tersebut tampak pada frasa “*Kita meyakini*” dan “*Kita mendukung*” pada teks editorial *Media Indonesia*. Akhirnya, pemunculan kata ganti pada proposisi tersebut berdampak pada pemaknaan teks bahwa masyarakat yakin terhadap wisata normal baru dan mendukung pemerintah, khususnya kementerian terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata.

Selanjutnya adalah data kata ganti dari editorial *Media Indonesia* edisi 6 Juni 2020, yaitu data (65), (66), (67), dan data (68). Berikut merupakan tampilan data dan analisisnya.

- (65) Dalam kaitan itu, **kita** pun menyaksikan masjid-masjid di Ibu Kota mulai kembali beraktivitas setelah ditutup sejak 10 April 2020 akibat pandemi covid-19. (148/MI/06062020/P5/K1/Kata Ganti)
- (66) Sebagai persiapan memasuki era kenormalan baru, **kita** menilai keputusan untuk menetapkan secara khusus periode PSBB transisi tersebut dapat diterima. Sebelum memasuki era kenormalan baru, masyarakat memang perlu melatih kebiasaan untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin agar saat beraktivitas dan berproduktivitas kembali, **mereka** tetap terlindung dari bahaya covid-19. (152/MI/06062020/P8/K1-2/Kata Ganti)
- (67) Karena itu, **kita** mendorong seluruh kalangan agar benar-benar patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa transisi. Di sektor transportasi yang rawan penularan, misalnya, **kita** mendesak agar protokol yang sama benar-benar konsisten dijalankan. (154/MI/06062020/P9/K1-2/Kata Ganti)

- (68) **Kita** mau agar PSBB transisi benar-benar menjadi periode peralihan dan persiapan sebelum masyarakat benar-benar memasuki era kenormalan baru. Saat tatanan kenormalan baru itu diberlakukan sepenuhnya, **kita** ingin semua kalangan telah siap dengan budaya kesehatan baru dan disiplin kuat untuk menjalankan protokol kesehatan. (157/MI/06062020/P13/K1-2/Kata Ganti)

Data (65) sampai dengan data (68) merupakan data yang memuat kata ganti dari teks editorial berjudul *Transisi Menuju Kenormalan Baru*. Keempat data tersebut mengandung kata ganti berupa pronomina persona pertama jamak inklusif, *kita*, sedangkan pronomina persona ketiga jamak, *mereka*, khusus pada data ke (66). Data (65) mengandung informasi terkait aktivitas yang telah dibuka di sejumlah rumah ibadah di Ibu Kota sejak pandemi. Penggunaan kata ganti *kita* dimaknai sebagai bentuk pertautan imajinatif antara redaktur dan pembaca sebagai saksi kembali dibukanya masjid-masjid.

Sementara itu, pada data (66), redaktur menyampaikan bahwa penetapan periode PSBB transisi sebelum memasuki normal baru merupakan tindakan preventif agar dapat menekan angka kasus. Penggunaan kata ganti *mereka*, mengacu pada masyarakat yang perlu membiasakan diri sebelum memasuki era normal baru. Kemudian pada data (67), terdapat penekanan agar penegakan kedisiplinan digalakkan. Di sisi lain, data (68) berisi informasi terkait dengan PSBB transisi sebagai bentuk masa peralihan yang harus dijalankan dengan baik. Pada data (67) dan (68) penggunaan kata ganti *kita* membentuk hubungan imajinatif terkait dengan ketegasan dan kedisiplinan yang perlu dilakukan sebagai tanggung jawab bersama.

Terakhir adalah data kata ganti dari editorial *Media Indonesia* edisi 11 Juni 2020. Data (69), (70), dan (71) diuraikan dan dianalisis sebagaimana berikut.

- (69) Ini penting karena dalam masa kenormalan baru, tidak boleh ada kelengahan dan kelalaian sedikit pun. **Kita** sedang berperang melawan virus yang telah membunuh lebih dari 400 ribu orang di dunia serta mematikan sebagian besar aktivitas ekonomi global. Lengah berarti bencana, lalai ibarat langkah pertama menuju kekalahan. (169/MI/11062020/P9/K1-3/Kata Ganti)
- (70) Dalam konteks Indonesia, pemerintah daerah memegang kuasa tak kalah penting dengan pusat. **Mereka**lah yang pegang kunci syarat dan tahapan, sudah layak atau belumkah setiap daerah menerapkan *new normal*. Sembarangan membuka kunci itu, taruhannya besar, risikonya tinggi. (171/MI/11062020/P10/K1-3/Kata Ganti)
- (71) Kolaborasi manis antara negara dan masyarakat ini yang akan menjadi kunci sukses tahapan *new normal*. Ketika keseriusan, konsistensi, dan ketegasan pemerintah bertemu dengan kepatuhan dan kedisiplinan publik menjalankan protokol kesehatan, pada saat itulah **kita** bisa benar-benar merasakan sebuah kehidupan normal yang baru, bahkan ketika pandemi ini sudah berakhir. (175/MI/11062020/P14/K1-2/Kata Ganti)

Data (69), (70), dan (71) merupakan data yang memuat kata ganti dari teks editorial berjudul *New Normal bukan Celah untuk Lengah*. Data (69) dan (71) mengandung kata ganti pronomina persona pertama jamak inklusif, *kita*, sedangkan pronomina persona ketiga jamak, *mereka*lah, khusus pada data ke (70). Data (69) menggambarkan penerapan normal baru harus bersih dari kegagapan dan kelengahan. Penggunaan kata ganti *kita* merupakan bentuk imajinatif redaktur untuk memunculkan makna bahwa Covid-19 adalah tanggungan bersama.

Kemudian pada data (70), termuat informasi terkait peran pemerintah daerah yang juga penting dalam membuka kunci daerah untuk menerapkan normal baru. Penggunaan kata ganti *mereka* mengacu pada pemerintah daerah sebagai penanggung jawab tertinggi daerah masing-masing. Terakhir, data (71)

memuat kata ganti *kita* yang mengacu pada semua orang. Selain itu, data (71) juga memuat informasi terkait perlunya kolaborasi antara ketegasan negara dan kedisiplinan masyarakat dalam upaya menyukseskan normal baru.

E. Leksikon

Leksikon merupakan elemen sintaksis terakhir. Leksikon atau yang dikenal sebagai *syntactic style* merupakan bentuk pemilahan leksikon oleh komunikator. Komunikator dalam hal ini adalah redaktur, yang memiliki tujuan dan pemaknaan pada teks yang disusun. Berikut merupakan analisis data leksikon dari editorial tentang normal baru pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*.

- (72) Indonesia mengambil putusan politik berisiko, dengan melonggarkan kegiatan ekonomi di tengah pandemi, dengan diksi berbeda-beda. Ada yang menyebut “transisi”, ada yang mengatakan “normal baru”. Frase “**normal baru**” yang diperkenalkan pemerintah bisa disalahpersepsikan. Publik bisa salah membaca seakan kondisinya sudah benar-benar normal. Kenyataannya, ancaman penularan Covid-19 masih nyata. Kurva penularan secara nasional belum terlihat melandai. (40/K/10062020/P4/K1-6/Leksikon)

Data (72) merupakan leksikon yang ditemukan pada koran *Kompas* berjudul *Fokuslah pada Covid-19* dan memuat leksikon berupa frasa *normal baru* yang ditandai dengan penggunaan tanda kutip. Berdasar teks keseluruhan, leksikon tersebut merujuk pada perihal negatif. Paragraf pada data (72) berkaitan dengan keputusan pemerintah dalam pelonggaran aktivitas ekonomi dan mewacanakan normal baru. Redaktur *Kompas* menyampaikan bahwa frasa *normal baru* dapat menjadi sebuah mispersepsi oleh publik karena anggapan bahwa keadaan telah kembali normal. Oleh karena itu, frasa *normal baru* dihadirkan

dengan konotasi negatif. Analisis data (72), menunjukkan bahwa redaktur *Kompas* melakukan penggambaran negatif atas wacana pemerintah mengenai normal baru.

Selanjutnya, data (73) berikut ini merupakan data leksikon dari editorial *Media Indonesia* edisi 28 Mei 2020. Berikut merupakan tampilan data dan analisis data leksikon.

- (73) Tatanan normal baru atau *new normal* ialah pilihan rasional. Ia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalani karena sampai detik ini belum diketahui kapan *ekspansi* covid-19 akan usai. Kita jelas tidak mungkin terus menunggu dalam ketidakpastian, sementara ekonomi harus kembali menggeliat demi menopang kehidupan rakyat. (98/MI/28052020/P2/K1-3/Leksikon)

Data (73) merupakan leksikon yang ditemukan pada koran *Media Indonesia* berjudul *Partisipasi Publik di Era Normal Baru* dan memuat leksikon yang merujuk pada konotasi negatif yaitu *ekspansi*. Paragraf pada data (73) berisi perihal opsi kehidupan normal baru yang harus dipilih sebagai satu-satunya pilihan paling rasional agar perputaran ekonomi di Indonesia kembali berjalan. Redaktur *Media Indonesia* menyampaikan bahwa normal baru harus dijalani sebab pandemi belum selesai. Covid-19 masih terus tersebar secara masif dan redaktur menyebutnya sebagai sebuah *ekspansi* yang notabene merupakan bentuk perluasan atau pendudukan suatu wilayah, sehingga membentuk konotasi negatif. Atas analisis data (73), diketahui bahwa redaktur *Media Indonesia* melakukan penggambaran negatif mengenai persebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi apabila normal baru tidak dijalankan.

Data leksikon juga ditemukan lagi pada editorial *Media Indonesia* edisi 28 Mei 2020. Data (74) dianalisis sebagaimana berikut.

- (74) Namun, tatanan normal baru juga punya risiko besar. Jika penerapannya sembarangan, ia bisa menjadi bumerang. Jika masyarakat abai dengan rambu-rambu yang ditentukan, ia dapat menenggikan kembali tingkat penularan. Jika pemerintah tak tegas, ia membuka peluang terjadinya **penjajahan** virus gelombang kedua. (103/MI/28052020/P4/K1-4/Leksikon)

Pada data (74), terdapat leksikon yang merujuk pada konotasi negatif, yaitu *penjajahan*. Paragraf pada data (74) berisi tentang risiko penerapan normal baru. Redaktur *Media Indonesia* menyampaikan bahwa penerapan normal baru riskan meningkatkan penularan apabila dilakukan dengan sembarangan, masyarakat abai, dan ketidaktegasan pemerintah. Hal tersebut disampaikan redaktur dapat memicu terjadinya gelombang kedua dan digambarkan dalam leksikon *penjajahan* yang berkonotasi negatif. Analisis data (74) memperlihatkan bahwa redaktur *Media Indonesia* melakukan penggambaran negatif atas penularan Covid-19 dan besarnya risiko atas penerapan tatanan normal baru.

Selanjutnya, masih dari editorial *Media Indonesia*, data leksikon di bawah ini ditemukan. Berikut merupakan tampilan data (75) sekaligus analisisnya.

- (75) Penerapan tatanan normal baru **pantang gampangan**. Sejumlah kriteria ketat yang telah ditetapkan mutlak dipatuhi tanpa ada kompromi. Tiga indikator utama untuk menilai kesiapan daerah, yaitu gambaran epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatannya, harus dijadikan dasar yang tak bisa ditawar-tawar. (106/MI/28052020/P5/K1-3/Leksikon)

Berikutnya, masih dari teks editorial yang sama, data (75) memuat leksikon yang merujuk pada konotasi positif, yaitu frasa *pantang gampang*. Paragraf pada data (75) berisi tentang risiko penerapan normal baru. Redaktur *Media Indonesia* menyampaikan bahwa penerapan normal baru tidak mudah dan menjadikan banyak hal sebagai pertimbangan dan berbagai indikator penilaian untuk menilai tingkat kesiapan. Hal tersebut disampaikan redaktur melalui leksikon *pantang gampang*. Atas analisis data (75), diketahui bahwa redaktur *Media Indonesia* melakukan penggambaran positif atas penerapan tatanan normal baru yang tidak mudah dan perlu dilakukan dengan penuh perhatian tanpa dianggap remeh.

Kemudian leksikon ditemukan dalam editorial *Media Indonesia* edisi 30 Juni 2020 pada data (76) dan (77). Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

- (76) Data Organisasi Pariwisata Dunia memprediksi penurunan aktivitas wisatawan internasional tahun ini lebih dari 30%. Aktivitas wisata di berbagai belahan dunia pun diperkirakan **anjlok** sampai 90%. Demi menghindari paparan covid-19, berbagai atraksi wisata mulai museum, taman hiburan, taman-taman rekreasi, hingga berbagai pusat hiburan pun ditutup. (117/MI/30052020/P3/K1-3/Leksikon)

Data (76) merupakan data yang memuat leksikon yang ditemukan pada koran *Media Indonesia* berjudul *Produk Wisata di Era New Normal* dan menunjukkan bahwa terdapat leksikon yang merujuk pada konotasi negatif, yaitu *anjlok*. Paragraf pada data (76) berisi tentang penurunan angka terkait pariwisata dunia yang turun secara signifikan akibat Covid-19. Redaktur *Media Indonesia* memaparkan data yang diperoleh dari Organisasi Pariwisata Dunia yang

memprediksi angka wisatawan internasional dan aktivitas wisata yang menurun tajam. Hal tersebut disampaikan dengan leksikon *anjlok* yang hiperbolis dan berkonotasi tidak baik. Analisis data (76) menunjukkan bahwa redaktur melakukan penggambaran negatif atas penurunan tajam aktivitas wisata yang ditutup akibat pandemi Covid-19.

- (77) Destinasi lain di Tanah Air juga bukan pengecualian dari tren penurunan dan penghentian aktivitas wisata tersebut. Jika hal itu terus berlangsung, **kematian** industri pariwisata di Tanah Air pun tinggal menunggu waktu. (119/MI/30052020/P5/K1-2/Leksikon)

Berikutnya, masih dari teks editorial yang sama, pada data (77), terdapat sebuah leksikon yang merujuk pada perihal negatif, yaitu kata *kematian*. Paragraf pada data (77) tersebut berkaitan dengan kepariwisataan Indonesia saat pandemi. Akibat pandemi Covid-19, industri pariwisata di Indonesia vakum. Redaktur *Media Indonesia* menyampaikan pada pembaca, apabila penghentian aktivitas kepariwisataan dilangsungkan terus-menerus pada kurun waktu yang lama, industri pariwisata akan mengalami kemunduran hebat. Hal itu digambarkan dengan leksikon *kematian* yang bersifat hiperbolis berkonotasi tidak baik. Analisis data (77) tersebut menunjukkan bahwa redaktur melakukan penggambaran negatif atas adanya pembatasan dan penghentian aktivitas pariwisata di Indonesia yang berimbas pada aspek kepariwisataan.

Selain pada editorial *Media Indonesia* di atas, terdapat data leksikon pada editorial *Media Indonesia* edisi 5 Juni 2020 yang ditampilkan pada data (78) dan (79). Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

- (78) Jangan membuat celah terjadinya gelombang kedua penyebaran covid-19. Jika itu sampai terjadi, roda perekonomian bisa kembali terhenti dan aliran modal akan keluar lagi dari Indonesia, buntutnya rupiah berisiko **terjerembap** seperti Maret lalu. (140/MI/05062020/P13/K1-2/Leksikon)

Data (78) merupakan data yang memuat leksikon yang ditemukan pada koran *Media Indonesia* berjudul *Rupiah Menuju Kenormalan Baru*. Pada data tersebut terdapat leksikon yang merujuk pada perihal negatif, yaitu kata *terjerembap*. Data (78) tersebut berkaitan dengan perekonomian di Indonesia, khususnya mengenai nilai rupiah. Pada awal pandemi Covid-19, nilai rupiah sempat mengalami penurunan yang tajam. Redaktur *Media Indonesia* mencoba menyampaikan pada pembaca terkait hubungan antara peluang terjadinya gelombang kedua Covid-19 dan dampaknya pada perekonomian, khususnya nilai rupiah. Hal itu digambarkan dengan leksikon *terjerembap* yang hiperbolis berkonotasi tidak baik. Atas analisis data (78), diketahui bahwa redaktur melakukan penggambaran negatif atas potensi gelombang kedua Covid-19 di Indonesia dan menyebabkan nilai rupiah turun.

- (79) Sebaliknya, jika kepercayaan investor terjaga, peluang rupiah untuk menembus level '**keramat**' di bawah 14 ribu per dolar AS akan terwujud. Rupiah juga akan memasuki *new normal*. (142/MI/05062020/P14/K1-2/Leksikon)

Pada data (79), terdapat sebuah leksikon yang merujuk pada perihal positif, yaitu kata *keramat*. Paragraf pada data (79) tersebut berkaitan dengan nilai rupiah di Indonesia saat pandemi. Akibat pandemi Covid-19, sektor perekonomian menjadi kurang terjamin dan berdampak pada nilai rupiah.

Redaktur *Media Indonesia* memaparkan bahwa apabila pada masa normal baru investor tetap bekerja sama dengan Indonesia, maka nilai rupiah akan terjaga dan menembus angka di bawah 14.000 dolar AS. Hal itu digambarkan dengan leksikon *keramat* yang bersifat hiperbolis, tetapi berkonotasi positif. Analisis data (79) tersebut memperlihatkan bahwa redaktur melakukan penggambaran positif atas kemungkinan nilai rupiah akan menembus nilai yang tidak seperti biasanya.

F. Koherensi

Elemen semantik pertama adalah koherensi. Koherensi merupakan bentuk pertalian semantis dari gabungan proposisi dan menciptakan makna yang logis. Sementara itu, koherensi lokal dibagi menjadi dua, yaitu (1) koherensi fungsional; dan (2) koherensi kondisional. Tabel 4.3 berikut menunjukkan jumlah data koherensi fungsional dan koherensi kondisional dalam teks editorial pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia* dilanjutkan dengan analisis data.

Tabel 4.3 Frekuensi Penggunaan Koherensi dalam Teks Editorial tentang Normal Baru pada Koran *Kompas* dan *Media Indonesia*

No.	Sumber	Koherensi	
		<i>Fungsional</i>	<i>Kondisional</i>
1	<i>Kompas</i>	16	16
2	<i>Media Indonesia</i>	16	32
Jumlah		32	48

1. Koherensi Fungsional

Koherensi fungsional adalah salah satu jenis koherensi lokal dari elemen semantik. Koherensi fungsional hadir di antara proposisi dan berfungsi sebagai bentuk spesifikasi, generalisasi, kontras, atau penjelasan dari pernyataan sebelumnya. Berikut merupakan analisis data koherensi fungsional dari teks editorial normal baru pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*.

- (80) Pembangunan rumah murah dan sederhana akan membantu memberikan tempat tinggal bagi pekerja **yang tinggal berjubel di rumah kontrak yang tidak memenuhi standar kesehatan**. Industri farmasi, termasuk berbahan herbal di daerah, perlu diberi perhatian untuk membuat rakyat sehat. (11/K/03062020/P10/K1-2/Koherensi Fungsional)

Data (80) merupakan data yang mengandung koherensi fungsional. Koherensi ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan adalah bentuk spesifikasi kata *pekerja*. Spesifikasi yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* pada teks editorial berjudul *Menimbang Normal Baru* adalah “*yang tinggal berjubel di rumah kontrak yang tidak memenuhi standar kesehatan*”. Spesifikasi tersebut mengacu pada kata *pekerja* sehingga diartikan bahwa rencana pembangunan rumah murah ditujukan bagi para pekerja yang tinggal di rumah kontrak. Spesifikasi pun lebih diperinci pada *rumah kontrak* berupa “*yang tidak memenuhi standar kesehatan*”. Koherensi yang hadir antara *pekerja* dan *rumah kontrak* dispesifikkan dengan penanda lingual *yang* sehingga tergolong pada koherensi fungsional berbentuk spesifikasi.

Koherensi fungsional lainnya ditemukan pada editorial *Kompas* edisi 4 Juni 2020 pada data (81), (82), dan (83). Berikut merupakan uraian data dan analisisnya.

- (81) **Di satu sisi**, secara psikologis, ada kebutuhan dan juga kerinduan di kalangan siswa serta individu pada umumnya untuk bertemu teman, bersosialisasi seperti di era normal lama. Sekuat apa pun teknologi mendukung komunikasi antarmanusia, perjumpaan di dunia nyata lebih menghangatkan dan memenuhi perasaan hati (*fulfilling*). (15/K/04062020/P2/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (82) **Di sisi lain**, angka penularan Covid-19 masih belum bisa sepenuhnya diredam. Setiap hari kita menyaksikan angka mereka yang terpapar infeksi terus meningkat, artinya bahaya penularan virus korona masih mengintai. (17/K/04062020/P3/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (81) dan (82) ditunjukkan pada konjungsi yang terletak di tiap awal paragraf. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *di satu sisi – di sisi lain*. Kontras yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* pada teks editorial berjudul ***Dini, Normal Baru untuk Pendidikan*** tersebut adalah perbandingan antara dua hal, yaitu aspek psikologis dan aspek keamanan. Pengontrasan antara kedua hal tersebut menjadi pertimbangan wacana pembukaan sekolah di era normal baru bahwa terdapat dua dikotomi atasnya, perjumpaan secara langsung memang lebih *fulfilling*, tetapi terdapat hal lain yang dipertimbangkan karena penularan Covid-19 masih meningkat.

- (83) Wajar jika hal ini membuat orangtua tidak atau belum rela melepas anaknya kembali belajar normal di sekolah, **bahkan** jika dinyatakan bahwa sekolah sudah disemprot disinfektan dan

protokol kesehatan sudah diterapkan. (18/K/04062020/P4/K1/Koherensi Fungsional)

Berikutnya, masih dari teks editorial yang sama, koherensi pada data (83) ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan adalah bentuk penegasan dengan penanda lingual *bahkan*. Penegasan yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* tersebut adalah penguatan argumen mengenai keraguan orang tua terhadap pembelajaran di sekolah di era normal baru, meskipun sekolah menyatakan telah melakukan penyemprotan disinfektan dan penerapan protokol kesehatan.

Selain pada data sebelumnya, koherensi pada editorial berjudul *Dini, Normal Baru untuk Pendidikan* juga dijumpai pada data (84), (85), dan (87). Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

- (84) Kekhawatiran yang masuk akal. Betul sekolah dan kampus sudah disterilkan, **tetapi** bagaimana dengan perjalanan, misalnya saat berada di transportasi umum atau saat berkomunikasi antarteman, yang mungkin karena saking senangnya melepas masker, atau bertukar makanan dari rumah? (19/K/04062020/P5/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (85) **Namun**, ketika coba dijabarkan rincian teknisnya, ternyata kompleks juga. Sekolah akan menyediakan wastafel dengan sabun cuci, juga termometer tembak. “Namun, saat anak di perjalanan dan berinteraksi dengan temannya, sekolah sulit memastikan apakah mengikuti protokol kesehatan atau tidak,” ujar Wakil Kepala SMA Negeri 6 Jakarta Husniwati. (21/K/04062020/P7/K1-4/Koherensi Fungsional)
- (86) **Selain soal banyaknya fasilitas yang harus disiapkan, pembelajaran tatap muka di era normal baru juga butuh biaya besar**, termasuk proses pengecekan kesehatan siswa yang harus dilakukan setiap hari. (*Kompas*, 3/6). (22/K/04062020/P8/K1/Koherensi Fungsional)
- (87) Sebagaimana disampaikan pakar epidemiologi, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar normal baru bisa diterapkan dengan *aman* dan sukses. Ada tuntutan

kemendesakan, **tetapi** hal ini tidak boleh dengan mengompromikan keamanan kesehatan. (23/K/04062020/P9/K1-2/Koherensi Fungsional)

Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *tetapi* dan *namun*. Data (84) dan (87) menunjukkan kontras berupa penggunaan satuan lingual *tetapi*, sedangkan data (85) menunjukkan kontras dengan penggunaan satuan lingual *namun*. Sementara itu, pada data (86) merupakan koherensi berbentuk aditif dengan penanda lingual *selain – , juga –*. Berikut merupakan penjelasan secara runtut.

Kontras yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* pada data (84) dan (85) adalah mengenai pensterilan sekolah dan penyediaan fasilitas protokol kesehatan yang telah disiapkan. Sebab, bagaimanapun pembukaan sekolah tetap berisiko karena sebelum sampai di sekolah, para siswa berada di perjalanan dan hal tersebut di luar pengawasan sekolah. Hal tersebut diartikan bahwa, seketat apa pun protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah, pengawasan terhadap siswa jika sudah berada di luar wilayah sekolah tetap sulit dilakukan oleh pihak sekolah.

Selanjutnya, penambahan pada data (86) ditampilkan oleh redaktur dalam teks editorial terkait dengan banyaknya fasilitas yang perlu disiapkan untuk menghadapi normal baru di sekolah. Selain itu, apabila penerapan sudah dilakukan maka akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Redaktur memunculkan koherensi fungsional aditif sebagai upaya penjelasan tambahan. Sementara itu, pada data (87) terdapat koherensi berupa

pengontrasan. Hal tersebut ditampilkan redaktur dengan penanda lingual *tetapi*. Teks tersebut berkenaan dengan pembukaan sekolah yang tidak dapat didesak oleh kepentingan apa pun, yang dikompromikan dengan keamanan dan kesehatan.

Selanjutnya, data (88) dan (89) merupakan data koherensi fungsional dari editorial *Kompas* edisi 9 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

- (88) Sama seperti di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia, kepadatan dan mobilitas penduduk memudahkan virus SARS-CoV-2 menyebar. **Apalagi**, banyak anggota masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, mereka tidak disiplin memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak rajin menjaga kebersihan dan mencuci tangan, serta melanggar larangan untuk berkumpul dan berkerumun. (31/K/09062020/P5/K1-3/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (88) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan pada editorial *Kompas* berjudul ***Menahan Ledakan Daerah*** adalah bentuk aditif dengan penanda lingual *apalagi*. Penambahan yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* tersebut adalah bentuk penjabaran argumen mengenai kepadatan dan mobilitas penduduk menjadi penyebab utama penyebaran kasus Covid-19, ditambah lagi masyarakat yang abai dan tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

- (89) Perilaku masyarakat yang “sembarangan” bertemu dengan kebijakan pemerintah yang membingungkan dan kurang tegas. Harus diakui, penyangkalan pemerintah terhadap risiko di awal-awal, sekarang telah membawa dampak peningkatan kasus yang memprihatinkan. **Akan tetapi**, tidak ada gunanya menyesali

yang sudah terjadi. Maka, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar penularan tidak semakin meluas? (32/K/09062020/P6/K1-4/Koherensi Fungsional)

Berikutnya, masih dari teks editorial yang sama, koherensi pada data (89) ditunjukkan pada proposisi ketiga. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *akan tetapi*. Kontras yang ditampilkan oleh redaktur pada data (89) adalah mengenai ketidaksinambungan hal yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menekan angka penularan, khususnya penyangkalan pemerintah terhadap risiko peningkatan kasus apabila normal baru dilaksanakan sembarangan. Pada akhirnya hal tersebut menjadi bentuk kepasrahan yang harus diterima tanpa penyesalan.

Koherensi fungsional lainnya ditemukan pada editorial *Kompas* edisi 10 Juni 2020 pada data (90) di bawah ini. Berikut merupakan uraian data beserta analisisnya.

(90) Pelonggaran aktivitas ekonomi mulai dilakukan. **Namun**, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap ancaman infeksi Covid-19. (38/K/10062020/P1/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (90) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan pada editorial *Kompas* berjudul ***Fokuslah pada Covid-19*** adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *namun*. Kontras yang ditampilkan redaktur pada data (90) adalah mengenai pelonggaran segala kegiatan dan aktivitas perekonomian di tengah masa

pandemi Covid-19, biar bagaimanapun pemerintah dan masyarakat tetap perlu waspada dan tidak lengah terhadap ancaman penularan Covid-19.

Selain data-data koherensi fungsional yang ditemukan pada editorial *Kompas* edisi sebelumnya, edisi 16 Juni berikut memuat satu data koherensi fungsional. Data (91) di bawah ini merupakan tampilan data berlanjut dengan analisisnya.

- (91) Masih tingginya angka terinfeksi itu mengkhawatirkan publik **meskipun** peningkatan jumlah orang yang dapat disembuhkan memberikan harapan. Realitas sosiologis adanya laporan warga yang mengambil jenazah pasien dalam pengawasan (PDP), atau kekhawatiran orang menjalani tes cepat, kian menambah drama mencemaskan. (48/K/16062020/P3/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (91) ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan yang dihadirkan pada editorial *Kompas* berjudul *Kuncinya Adalah Disiplin* merupakan bentuk kontras dengan penanda lingual *meskipun*. Kontras yang ditampilkan redaktur pada data (91) tersebut adalah mengenai kekhawatiran yang muncul karena kasus positif Covid-19 terus meningkat. Meskipun demikian, ada harapan pasien untuk bisa sembuh dari Covid-19.

Terakhir dari editorial *Kompas*, edisi 23 Juni 2020 memuat sejumlah empat struktur koherensi fungsional sebagaimana tampak pada data (92), (93), (94), dan (95). Berikut merupakan analisis dan pembahasan atasnya.

- (92) Hingga Senin (22/6/2020), jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 45.891 dengan penambahan 862 orang. Bersyukur jumlah pasien yang sembuh 18.404 kasus atau 40,1 persen dari yang terkonfirmasi. **Namun**, kasus meninggal masih 2.465

- orang atau 5,4 persen, dua kali lipat dari rata-rata rasio kematian Covid-19 di ASEAN (2,7 persen). (59/K/23062020/P5/K1-3/Koherensi Fungsional)
- (93) Karakteristik masyarakat Indonesia memang khas menghadapi bencana. Tatkala tsunami Aceh melanda 2004, misalnya, rakyat lebih mudah menerima kondisi karena menganggap itu bagian dari takdir. Mereka bisa cepat bangkit. **Namun**, di sisi lain, orang jadi tidak belajar dari bencana. (62/K/23062020/P7/K1-4/Koherensi Fungsional)
- (94) Politik identitas yang marak belakangan menambah ruwet persoalan. Banyak yang merasa benar sendiri sehingga muncullah perilaku mencuri jenazah, mengusir petugas kesehatan di lingkungannya, **bahkan** menolak tes massal. Padahal, kita tahu, hanya dengan surveilans, tes massal, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat, kita bisa menekan angka penularan dan selamat dari Covid-19. (64/K/23062020/P8/K1-3/Koherensi Fungsional)
- (95) Ketika tekanan ekonomi membuat orang yang berpenghasilan harian terpaksa keluar rumah, bisa jadi mereka berserah pada takdir. **Namun**, apakah takdir juga alasan mereka yang nekat berdesak-desakan di tempat wisata, hari bebas kendaraan bermotor, dan melanggar semua protokol kesehatan? (66/K/23062020/P9/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (92), (93), dan (95) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan pada editorial *Kompas* berjudul *Saatnya Bertindak Tegas* adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *namun*. Sementara itu, pada data (94) terdapat koherensi berbentuk penegasan dengan penanda lingual *bahkan*. Berikut merupakan penjelasan secara runtut. Kontras yang ditampilkan oleh redaktur pada data (92) adalah mengenai persentase pasien sembuh yang tergolong tinggi dengan kasus pasien meninggal yang mencapai persentase dua kali lipat di atas rasio kematian Covid-19 di ASEAN.

Pengontrasan pada data (93) terkait dengan bagaimana masyarakat Indonesia mudah beradaptasi dan menerima bencana sebagai bagian dari

takdir, tetapi hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak belajar dari bencana. Selanjutnya, pada data (94), penegasan ditampilkan oleh redaktur terkait dengan maraknya politik identitas yang membuat orang merasa paling benar dan berujung pada perilaku menyimpang. Hal-hal seperti pencurian jenazah dan pengusiran tenaga kesehatan dari lingkungan tinggalnya dilakukan terang-terangan,terlebih lagi, pemeriksaan kesehatan seperti tes massal pun ditolak.

Sementara itu, pada data (95), kontras ditampilkan redaktur berkaitan dengan tuntutan ekonomi yang membuat pekerja harian harus keluar rumah untuk bekerja, tetapi pelanggaran protokol kesehatan bukan termasuk dalam sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Artinya di samping memenuhi kebutuhan ekonomi, pekerja juga perlu menerapkan protokol kesehatan demi keamanan diri sendiri maupun orang lain.

Berikutnya merupakan data koherensi fungsional yang ditemukan pada editorial *Media Indonesia*. Data (96) dan (97) di bawah ini merupakan data yang ditemukan pada edisi 27 Mei 2020. Berikut merupakan analisisnya.

- (96) KENORMALAN baru atau *new normal* sama sekali belum menjadi kemenangan melawan korona. Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo, *new normal* ialah upaya produktif, **tetapi** tetap aman dari covid-19. (82/MI/27052020/P1/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (97) Pengerahan aparat macam ini juga dilakukan di Filipina. **Namun**, tetap saja metode ini tidak memberikan rasa kepercayaan selain menunjukkan adanya kecenderungan menggunakan pendekatan militeristik. (90/MI/27052020/P13/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (96) dan (97) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan yang dihadirkan pada editorial *Media Indonesia* berjudul *Pendisiplinan New Normal* adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *tetapi* dan *namun*. Kontras yang ditampilkan oleh redaktur pada data (96) adalah mengenai tatanan normal baru sebagai tindakan produktif di tengah pandemi, tetapi dijalankan dengan aman. Sementara itu, pada data (97), upaya pendisiplinan dengan mengerahkan personel TNI tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga negara lain. Pada umumnya, pendisiplinan oleh aparat secara militeristik tidak cocok diterapkan pada warga sipil.

Selanjutnya adalah data koherensi fungsional yang ditemukan pada editorial *Media Indonesia* edisi 28 Mei 2020. Data (98), (99), dan (100) berikut memuat koherensi fungsional dengan bentuk masing-masing. berikut merupakan uraian dan analisis atasnya.

- (98) SALAH satu penentu sukses atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan ialah seberapa besar partisipasi masyarakat. Pun demikian dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru di tengah pandemi covid-19 **yang masih menyandera bangsa ini.** (97/MI/28052020/P1/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (98) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan pada editorial *Media Indonesia* berjudul *Partisipasi Publik di Era Normal Baru* adalah bentuk spesifikasi kata *covid-19*. Spesifikasi yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut adalah “*yang masih menyandera bangsa ini*”. Spesifikasi tersebut

mengacu pada kata *covid-19* sehingga diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan kebijakan tatanan kehidupan normal baru di era Covid-19 yang masih menyandera bangsa. Koherensi yang hadir pada *covid-19* dispesifikkan dengan penanda lingual *yang* sehingga tergolong pada koherensi fungsional berbentuk spesifikasi.

- (99) Di era *new normal*, kita bisa tetap menjalankan aktivitas normal, **tapi** mesti membarenginya dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. Di sini, perubahan perilaku menjadi kunci. (102/MI/28052020/P3/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (100) **Namun**, tatanan normal baru juga punya risiko besar. Jika penerapannya sembarangan, ia bisa menjadi bumerang. Jika masyarakat abai dengan rambu-rambu yang ditentukan, ia dapat meninggikan kembali tingkat penularan. Jika pemerintah tak tegas, ia membuka peluang terjadinya penjajahan virus gelombang kedua. (104/MI/28052020/P4/K1/4/Koherensi Fungsional)

Berikutnya, masih pada teks editorial yang sama, koherensi pada data (99) dan (100) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *tapi* dan *namun*. Kontras yang ditampilkan oleh redaktur adalah mengenai pelaksanaan kegiatan normal seperti biasa tetapi tetap berpegang teguh pada tatanan kehidupan normal baru. Redaktur juga menyampaikan risiko normal baru yang diterapkan sembarangan. Apabila demikian, hal tersebut bukan merupakan bentuk upaya perlindungan atas Covid-19, melainkan menjadi sebuah serangan.

Selanjutnya, koherensi fungsional pada data (101) dan (102) di bawah ini termuat dalam editorial *Media Indonesia* edisi 5 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

- (101) Presiden sejak bulan lalu telah menggaungkan kebijakan *new normal* agar masyarakat tetap menjalankan aktivitas, **tetapi** dengan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus. Adanya *new normal* ini jelas meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia. (134/MI/05062020/P6/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (102) Sentimen positif tidak hanya terjadi di pasar keuangan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga kian menguat dua minggu terakhir. **Meskipun** kemarin ditutup terkoreksi 0,49% atau 24,30 poin ke level 4.916,70, saat perdagangan sesi I IHSG sempat menguat hingga menyentuh level 5.014,76, capaian yang tertinggi selama sebulan terakhir. (136/MI/05062020/P8/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (101) dan (102) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan pada editorial *Media Indonesia* berjudul *Rupiah Menuju Kenormalan Baru* tersebut adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *tetapi* dan *meskipun*. Kontras yang ditampilkan oleh redaktur adalah mengenai pelaksanaan kegiatan normal seperti biasa, tetapi tetap berpegang teguh pada tatanan kehidupan normal baru. Pelaksanaan normal baru berdampak positif bagi sentimen pasar dan nilai kurs. Meskipun telah ditutup, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencapai angka tertinggi selama kurun Mei s.d. Juni 2020.

Koherensi fungsional pada data (103) dan (104) di bawah ini termuat dalam editorial *Media Indonesia* edisi 6 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan dan analisis data koherensi fungsional tersebut.

- (103) Di antara ke-19 sektor yang diizinkan kembali aktif pada periode transisi ialah rumah ibadah, yang diberikan jadwal untuk memulai kembali aktivitasnya sejak kemarin. **Selain** masjid dan tempat ibadah lainnya, pelonggaran aktivitas ekonomi di tempat usaha dengan gedung sendiri **juga** diizinkan dengan jadwal pembukaan yang telah ditetapkan untuk setiap sektor. (147/MI/06062020/P4/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (103) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan pada editorial *Media Indonesia* berjudul *Transisi Menuju Kenormalan Baru* adalah bentuk aditif dengan penanda lingual *selain – , juga –*. Penambahan yang ditampilkan redaktur pada data (103) tersebut adalah mengenai pelonggaran aktivitas tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga aktivitas perekonomian seperti di tempat usaha dengan gedung sendiri, yang setiap sektornya telah dijadwalkan waktu pembukaannya.

- (104) Aturan moda angkutan umum seperti bus Trans-Jakarta dan MRT untuk melakukan pembatasan jumlah penumpang 50% dan memberikan jarak antarpenumpang minimal 1 lencang tangan jangan sebatas aturan tertulis. **Namun**, paksakan agar ia menjadi kenormalan baru dan dipatuhi selama masa transisi. (156/MI/06062020/P10/K1-2/Koherensi Fungsional)

Berikutnya, masih pada teks editorial yang sama, koherensi pada data (104) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *namun*. Kontras yang ditampilkan redaktur pada data (104) tersebut adalah mengenai aturan moda transportasi umum sebagai aturan pendukung dalam masa transisi tidak

hanya menjadi sebatas aturan tertulis saja, tetapi juga harus ditaati sebagai bentuk pembiasaan tatanan kehidupan normal baru.

Selanjutnya, editorial *Media Indonesia* edisi 11 Juni 2020 memuat koherensi fungsional sebagaimana tampak pada data (105), (106), dan (107).

Berikut adalah tampilan data beserta uraian analisisnya.

- (105) Penanganan dan pengendalian virus korona terus dimaksimalkan, **tetapi** di sisi lain, aktivitas ekonomi juga sudah saatnya diberi ruang untuk bergerak. Semestinya memang tidak ada dikotomi antara persoalan kesehatan dan ekonomi, mana di antara keduanya yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh para pembuat kebijakan. (162/MI/11062020/P2/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (106) Survei itu menyebut masyarakat memang masih khawatir tertular covid-19. **Akan tetapi**, jauh lebih banyak yang merasa takut tidak dapat bekerja dan tidak menerima penghasilan alias takut kelaparan. (163/MI/11062020/P4/K1-2/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (105) dan (106) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan pada editorial *Media Indonesia* berjudul *New Normal bukan Celah untuk Lengah* adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *tetapi* dan *akan tetapi*. Kontras yang ditampilkan oleh redaktur pada kedua data tersebut terkait dengan pertimbangan ekonomi di tengah pandemi. Pada data (105) redaktur menyampaikan argumen terkait perlunya pembukaan aktivitas ekonomi bersamaan dengan penanganan dan pengendalian Covid-19. Sementara itu, data (106) pada dasarnya merupakan argumen yang dicetuskan dari hasil penelitian, yaitu terkait kekhawatiran masyarakat yang lebih besar perihal pendapatan dibandingkan dengan kekhawatiran atas Covid-19.

- (107) Artinya, terlepas dari pro dan kontra **yang menyertainya**, pemberlakuan kenormalan baru dalam upaya menanggapi pandemi covid-19 memang menjadi salah satu opsi solusi yang bisa dipilih. (164/MI/11062020/P5/K1/Koherensi Fungsional)

Koherensi pada data (107) ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan adalah bentuk pengacuan katafora frasa *kenormalan baru*. Pengacuan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut adalah “*yang menyertainya*”. Spesifikasi tersebut mengacu pada frasa *normal baru* sehingga diartikan bahwa terdapat pro dan kontra yang menyertai wacana pemberlakuan normal baru di masa pandemi Covid-19. Koherensi yang hadir pada *normal baru* dispesifikkan dengan penanda lingual *yang* sehingga tergolong pada koherensi fungsional berbentuk spesifikasi pengacuan.

Selain data (105), (106), dan (107), editorial *Media Indonesia* edisi 11 Juni 2020 juga memuat data koherensi fungsional lain sebagaimana tampak pada data (108), (109), (110), dan (111). Berikut merupakan tampilan data beserta uraian dan analisisnya.

- (108) Dalam bahasa Presiden Joko Widodo, *new normal* ialah proses menuju tatanan masyarakat yang aman dari covid-19, **tetapi** tetap produktif secara ekonomi. (165/MI/11062020/P6/K1/Koherensi Fungsional)
- (109) Pada poin itulah sesungguhnya tantangan *new normal*. Menyinkronkan antara penanganan virus yang hingga hari ini masih berkeliaran --**bahkan kurva penyebaran covid-19 secara nasional belum menunjukkan tren turun--** dan upaya menggerakkan roda ekonomi setelah tiga bulan masa pandemi nyaris berhenti, jelas bukan pekerjaan mudah. (166/MI/11062020/P7/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (110) Syaratnya berat. Tahapannya pun mesti ketat. Kehidupan *new normal* menuntut kemampuan adaptasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang mengacu

pada protokol kesehatan. **Namun**, di lain sisi, *new normal* juga membutuhkan aturan berikut penegakan aturan yang lebih jelas, lebih tegas. (167/MI/11062020/P8/K1-4/Koherensi Fungsional)

- (111) **Selain menyiapkan aparaturnya**, negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, pada saat yang sama juga harus mempersiapkan publik agar siap menjalani kenormalan baru di tengah pandemi ini. Semua skenario kemungkinan mesti disiapkan supaya masyarakat tidak teragap-gagap dan salah menangkap hakikat *new normal*. (174/MI/11062020/P13/K1-2/Koherensi Fungsional)

Berikutnya, masih pada teks editorial yang sama, koherensi pada data (108) dan (110) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi fungsional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk kontras dengan penanda lingual *tetapi* dan *namun*. Sementara itu, pada data (109) terdapat koherensi berbentuk penegasan dengan penanda lingual *bahkan*. Berikut merupakan penjelasan secara runtut.

Kontras yang ditampilkan oleh redaktur pada data (108) adalah mengenai pelaksanaan kegiatan normal sebagai proses menuju tatanan masyarakat yang aman dari Covid-19, tetapi tetap produktif dalam segi perekonomian. Kemudian, data (109) merupakan bentuk penegasan atas data (108) terkait normal baru sebagai ajang penyeimbangan antara kesehatan dan ekonomi di saat Covid-19 belum menunjukkan penurunan kurva.

Data (110) berkenaan dengan pengontrasan mengenai adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru dan kesiapan masyarakat. Namun, hal tersebut perlu disertai aturan dan kebijakan yang jelas, tegas, dan tidak rancu. Terakhir, pada data (111) redaktur menyampaikan bahwa pemerintah harus mempersiapkan publik dalam menjalankan normal baru, di samping

menyiapkan aparatur negara untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

2. Koherensi Kondisional

Koherensi lokal dalam elemen semantik yang kedua adalah koherensi kondisional. Koherensi kondisional merupakan koherensi yang didasarkan pada hubungan antarfakta dan ditampilkan dalam teks berupa hubungan kausalitas atau hubungan temporal. Berikut merupakan analisis data koherensi kondisional dari teks editorial normal baru pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*.

(112) Wacana normal baru mengemuka **setelah sekitar tiga bulan** dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Kesehatan harus menjadi pertimbangan utama. (2/K/03062020/P1/K1-2/Koherensi Kondisional)

Data (112) merupakan data yang mengandung koherensi kondisional. Koherensi ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk temporal kata *setelah sekitar tiga bulan dilakukan pembatasan sosial berskala besar*. Bentuk temporal yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* pada teks editorial berjudul *Menimbang Normal Baru* merupakan penanda waktu munculnya wacana pelaksanaan normal baru dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak tiga bulan penerapan pembatasan sosial berskala besar.

Koherensi kondisional yang termuat pada data (113) di bawah ini merupakan data yang diperoleh dari editorial *Kompas* edisi 3 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

- (113) Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi virus Covid-19 menuju situasi normal baru menuntut kesadaran bersama. Kesadaran, bahwa persoalan kita saat ini **disebabkan** merebaknya virus Covid-19 dan **karena** itu penularan Covid-19 harus diselesaikan dahulu. (4/K/03062020/P2/K1-2/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (113) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk penyebab dan alasan dengan penanda lingual *disebabkan* dan *karena*. Bentuk penyebab yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* tersebut merupakan pendapat terkait segala persoalan dan permasalahan masyarakat yang dialami merupakan hal yang berakar dari merebaknya Covid-19. Kemudian, ditampilkan koherensi kondisional bentuk alasan bahwa penularan harus diselesaikan untuk dapat menyelesaikan persoalan lain yang tumbuh karena adanya Covid-19.

Selain pada data (113) di atas, data (114), (115), dan (116) di bawah ini merupakan data koherensi kondisional yang termuat dalam editorial *Kompas* edisi 3 Juni 2020. Data beserta analisisnya ditampilkan sebagaimana berikut.

- (114) Wacana pelonggaran PSBB mengemuka, antara lain, **karena** pembatasan sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti. Banyak pekerja dirumahkan atau diberhentikan dan pengusaha mandiri berhenti berusaha. (7/K/03062020/P3/K1-2/Koherensi Kondisional)
- (115) **Beban ekonomi menjadi sangat berat.** Pemerintah memperbesar defisit anggaran hingga 6,27 persen dari produk domestik bruto pada tahun ini. Pemerintah akan membiayai kebutuhan anggaran, antara lain, melalui utang Rp 1.633,6 triliun, sebagian besar dibiayai melalui penerbitan surat berharga negara sebesar Rp 1.521,1 triliun. (8/K/03062020/P4/K1-3/Koherensi Kondisional)

(116) PSBB pada sisi lain memperlihatkan, ekonomi yang masih bergerak berkaitan dengan farmasi dan kesehatan, pangan, serta telekomunikasi. Sektor ini dapat menjadi andalan perbaikan ekonomi dengan cepat. **Oleh karena yang terdampak paling besar adalah masyarakat dengan kekuatan ekonomi mikro hingga menengah**, wajar apabila pemerintah memberikan perhatian pada bidang-bidang usaha tersebut, dengan melibatkan sebagian besar rakyat. (10/K/03062020/P7/K1-3/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (114), (115), dan (116) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah kausalitas berbentuk penyebab, konsekuensi, dan alasan dengan penanda lingual *karena*, *beban ekonomi menjadi sangat berat*, dan *oleh karena yang terdampak paling besar adalah masyarakat dengan kekuatan ekonomi mikro hingga menengah*. Bentuk penyebab yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* tersebut adalah kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada beban ekonomi, pada akhirnya membuka wacana pemberlakuan normal baru.

Kemudian pada bentuk konsekuensi, redaktur menguraikan penerapan PSBB yang menjadikan beban ekonomi semakin berat sehingga pemerintah memperbesar defisit dan memenuhi kebutuhan anggaran dengan utang dan penerbitan surat berharga negara. Terakhir, bentuk alasan yang dipaparkan adalah kewajaran atas sikap pemerintah dalam memprioritaskan masyarakat dengan ekonomi mikro hingga menengah karena menjadi masyarakat paling terdampak.

Selanjutnya, data (117), (118), dan (119) di bawah ini merupakan data koherensi kondisional yang ditemukan pada editorial *Kompas* edisi 9 Juni 2020. Berikut merupakan uraian data dan analisisnya.

- (117) Peningkatan kasus terbesar terjadi di Jawa Timur, diikuti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. **Jawa Timur, dengan 5.948 kasus, saat ini menjadi episentrum penularan Covid-19 kedua terbesar setelah Jakarta dengan 8.033 kasus.** (28/K/09062020/P2/K1-2/Koherensi Kondisional)
- (118) Situasi ini sungguh mengkhawatirkan **karena** saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saja terjadi begitu banyak pelanggaran, dan hal itu dibiarkan. Apalagi pada tahap normal baru, yang disikapi masyarakat seolah-olah pandemi sudah berlalu. Apabila tidak ada intervensi dan sanksi, peningkatan kasus di sejumlah daerah itu akan menjadi ledakan yang dengan cepat bisa menjalar ke pedalaman. (29/K/09062020/P3/K1-3/Koherensi Kondisional)
- (119) Seiring dengan perbaikan di tubuh pemerintahan, mengedukasi masyarakat adalah pekerjaan berikutnya. Ajak masyarakat mengubah perilaku sosial budayanya. Perketat dan perjelas aturan, tindak tegas siapa pun yang melanggar. **Sebab**, di negara maju pun, sanksi dipertegas. (33/K/09062020/P8/K1-4/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (117), (118), dan (119) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah kausalitas berbentuk konsekuensi, alasan, dan penyebab dengan penanda lingual *Jawa Timur, dengan 5.948 kasus, saat ini menjadi episentrum penularan Covid-19 kedua terbesar setelah Jakarta dengan 8.033 kasus, karena, dan sebab*. Bentuk konsekuensi yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* pada teks editorial berjudul *Menahan Ledakan di Daerah* tersebut adalah uraian terkait pertambahan kasus di Jawa Timur yang

mencapai total 5.948 kasus dan menjadikan Jawa Timur sebagai pusat penularan Covid-19 di urutan kedua setelah Jakarta.

Sementara itu, pada bentuk alasan, redaktur menyampaikan bahwa pelanggaran banyak terjadi saat PSBB diberlakukan dan bentuk pelanggaran-pelanggaran diabaikan tanpa dikenai sanksi sehingga redaktur menggambarkan hal tersebut sebagai kondisi yang mengkhawatirkan. Terakhir, mengenai bentuk penyebab, redaktur menekankan agar penegakan aturan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran digalakkan mengingat di negara maju memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Berikutnya adalah koherensi kondisional dari editorial *Kompas* edisi 10 Juni 2020. Data (120) dan (121) di bawah ini memuat bentuk koherensi kondisional yang berbeda sebagaimana uraian dan analisis berikut.

- (120) Penyebaran Covid-19 masih menjadi ancaman global, termasuk di Indonesia. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan, lebih dari 7,2 juta orang terinfeksi Covid-19 dan **menyebabkan** lebih dari 400.000 orang meninggal. Meski kondisi setiap negara berbeda, ada yang dalam tren membaik, secara global Dirjen WHO menilai kondisinya masih memburuk! (39/K/10062020/P2/K1-3 /Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (120) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan pada editorial *Kompas* berjudul ***Fokuslah pada Covid-19*** adalah bentuk penyebab dengan penanda lingual *menyebabkan*. Bentuk penyebab yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* tersebut terkait dengan banyaknya kasus positif dan kasus kematian yang

disebabkan oleh infeksi Covid-19. Total 7,2 juta kasus menyebabkan kematian lebih dari 400.000 jiwa, sehingga WHO menyatakan bahwa keadaan masih buruk.

(121) **Setelah melonggarkan ekonomi**, masih ada agenda politik, yakni pemilihan kepala daerah, Desember 2020. Pelaksanaan pilkada itu menimbulkan pro dan kontra. Selain tak memiliki pengalaman menggelar pilkada di era pandemi, pilkada juga pasti akan menambah anggaran. Hasil survei daring Litbang *Kompas*, 24-25 Mei 2020, menunjukkan, sebanyak 91,8 responden setuju dengan penundaan pilkada ke tahun 2021, sebanyak 2,5 persen tidak setuju, dan 5,7 persen tidak tahu. (41/K/10062020/P5/K1-4/Koherensi Kondisional)

Selanjutnya, masih pada teks editorial yang sama, koherensi pada data (121) ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk temporal dengan penanda lingual *setelah melonggarkan ekonomi*. Bentuk temporal yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* tersebut merupakan penanda waktu adanya agenda politik yang akan dilangsungkan setelah pelonggaran ekonomi dilangsungkan yaitu pada bulan Desember 2020. Penanda waktu tersebut juga diartikan bahwa rencana pemerintah tentang agenda yang dilaksanakan di era pandemi sudah tersusun dan terjadwal secara sistematis.

Kemudian, data (122) dan (123) berikut merupakan data koherensi kondisional yang juga ditemukan dari editorial *Kompas* edisi 10 Juni 2020. Berikut merupakan uraian dan analisisnya.

(122) Pemerintah harus bijak menangkap aspirasi publik terkait pilkada. Harus diakui, penanggulangan Covid-19 menemui banyak kendala **karena** rivalitas elite politik. Pilkada 2020 akan

menjadi faktor persaingan elite. Petahana bisa memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan elektoral. (42/K/10062020/P6/K1-4/Koherensi Kondisional)

- (123) Kita tak ingin pilkada hanya sekadar dilangsungkan **karena** sudah merupakan agenda konstitusional dan kompromi elite politik. Namun, dalam pelaksanaannya, kesehatan publik dan kesehatan demokrasi tidak terjaga. Kesehatan demokrasi akan ditentukan dengan tingkat partisipasi politik dari rakyat yang akan menggelar pilkada di 270 daerah. Memaksakan pilkada pada era pandemi selain mempunyai risiko bagi kesehatan publik, juga tak sehat bagi demokrasi **karena** petahana bisa memanfaatkan pandemi untuk meningkatkan keterpilihannya. (43/K/10062020/P7/K1-4/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (122) dan (123) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *karena*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* adalah bentuk rivalitas elite politik yang terjadi pada pilkada tahun 2020, termasuk salah satunya adalah petahana yang memanfaatkan situasi dan kondisi pandemi untuk meraih simpati. Oleh karenanya, pemerintah perlu bijak dalam menampung aspirasi masyarakat ditinjau dari aspek kesehatan dan keselamatan, serta penanggulangan Covid-19. Oleh karena itu, pilkada bukan hanya menjadi agenda politik semata, padahal risiko peningkatan kasus Covid-19 dapat terjadi pada saat pilkada dilaksanakan.

Data koherensi kondisional terakhir yang termuat di dalam editorial *Kompas* merupakan data yang diperoleh dari edisi 16 Juni 2020. Data (124), (125), (126), dan (127) di bawah ini memiliki bentuk koherensi kondisional yang sama. Berikut merupakan tampilan data beserta uraian dan analisisnya.

- (124) Jumlah orang yang terinfeksi virus Covid-19 tiap hari masih berada di atas angka 1.000. Puncak pandemi belum dicapai. Berdasarkan laporan Gugus Tugas per 15 Juni 2020, tercatat 39.294 orang terkonfirmasi positif. Oleh **karena** itu, diskursus soal serangan gelombang kedua sebaiknya dikesampingkan. Fokuslah pada ancaman menanggulangi pandemi. (47/K/16062020/P2/K1-5/Koherensi Kondisional)
- (125) Selama ini terekam ada beberapa pola penanggulangan Covid-19. Ada yang memberlakukan karantina wilayah total untuk menekan penyebaran. Ada pula yang memberlakukan pengendalian aktivitas masyarakat sambil membuka ruang gerak kecil-kecilan. Ada juga pola *herd immunity* (kekebalan komunitas) yang banyak dikritik **karena** tidak manusiawi. (49/K/16062020/P4/K1-4/Koherensi Kondisional)
- (126) Sejumlah provinsi dan kabupaten di Indonesia kini memilih beradaptasi dengan Covid-19. Dengan dalil vaksin belum ditemukan, dan aktivitas ekonomi harus dibuka, masyarakat diajak untuk disiplin dalam menjalani protokol kesehatan. Putusan itu bisa dimengerti **karena** faktanya tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dampak sosialnya. (50/K/16062020/P5/K1-3/Koherensi Kondisional)
- (127) **Oleh karena keputusan pelanggaran aktivitas ekonomi telah dibuka**, ketika ruang publik dibuka dalam batasan tertentu, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan orang terinfeksi Covid-19. Pelayanan kesehatan harus siap menampung jika terjadi lonjakan. (52/K/16062020/P7/K1-2/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (124), (125), (126), dan (127) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *karena* dan *oleh karena keputusan pelanggaran aktivitas ekonomi telah dibuka*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Kompas* pada editorial berjudul ***Kuncinya Adalah Disiplin*** tersebut merupakan kritik agar pembicaraan mengenai gelombang kedua seharusnya disisihkan dan fokus pada

penanggulangan penularan virus sebab pandemi Covid-19 masih naik signifikan dan belum mencapai puncak.

Perihal penanggulangan, terdapat beberapa jenis, yaitu karantina wilayah, pembatasan aktivitas, bahkan *herd immunity* yang dianggap tidak manusiawi sehingga menimbulkan banyak kritik bermunculan. Beberapa wilayah di Indonesia memilih untuk beradaptasi untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi selama vaksin belum ditemukan. Hal tersebut berkaitan dengan perekonomian Indonesia yang mengalami tekanan akibat Covid-19.

Selanjutnya adalah data koherensi kondisional yang ditemukan pada editorial *Media Indonesia* edisi 11 Mei 2020. Data (128), (129), dan (130) di bawah ini memuat bentuk koherensi yang sama. Berikut merupakan analisisnya.

- (128) Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo pada 4 Mei itu menyebut alasan penundaan pilkada akibat bencana nonalam pandemi covid-19. **Berhubung pandemi covid-19 belum tahu kapan berakhir, perppu pun melonggarkan jadwal.** Disebutkan, jika Desember tidak bisa dilaksanakan, pilkada ditunda dan dijadwalkan kembali. (71/MI/11052020/P2/K1-3/ Koherensi Kondisional)
- (129) Konsekuensi lain ialah menyesuaikan lima tahapan pilkada dengan normal baru covid-19. Disesuaikan **karena** lima kegiatan itu melibatkan partisipasi massa. Kelimanya ialah verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, pendataan pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara. (72/MI/11052020/P4/K1-3/ Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (128) dan (129) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap

data tersebut adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *berhubung pandemi covid-19 belum tahu kapan berakhir, perppu pun melonggarkan jadwal dan karena*. Bentuk penyebab yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada teks editorial berjudul *Normal Baru Pilkada* tersebut adalah pelanggaran jadwal pilkada yang diatur dalam perppu dilakukan karena ketidaktahuan berakhirnya pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa tahapan pilkada diharuskan menaati tatanan kehidupan normal baru karena melibatkan partisipasi massa.

(130) Normal baru akibat covid-19 mutlak dijalankan meski pilkada sebagai instrumen demokrasi membutuhkan partisipasi sebesar-besarnya pemilih. Keselamatan nyawa pemilih tetap diutamakan di atas pelaksanaan demokrasi. (74/MI/11052020/P5/K1-2/Koherensi Kondisional)

Selanjutnya, masih pada teks editorial yang sama, koherensi pada data (130) ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah kausalitas berbentuk konsekuensi dengan penanda lingual *akibat*. Bentuk konsekuensi yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut adalah terkait adanya pandemi Covid-19 maka terdapat keharusan bagi masyarakat, khususnya para pemilih, agar menerapkan tatanan normal baru di saat proses pemilihan kepala daerah. Hal tersebut diperlukan supaya keselamatan pemilih tetap terjaga.

Uraian data koherensi kondisional di atas berlanjut pada analisis data berikutnya dari editorial *Media Indonesia* edisi yang sama dengan

sebelumnya, yaitu 11 Mei 2020. Berikut merupakan analisis data (131), (132), (133), dan (134).

(131) Tidak kalah pentingnya ialah segera melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal itu melarang petahana melakukan mutasi jabatan **6 bulan sebelum penetapan calon**. Pasal itu juga melarang petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan lain **6 bulan sebelum penetapan calon**. (75/MI/11052020/P7/K1-3/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (131) ditunjukkan pada proposisi ketiga. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk temporal dengan penanda lingual *6 bulan sebelum penetapan calon*. Bentuk temporal yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut merupakan penanda waktu yang ada dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengenai hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh petahana dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah. Beberapa hal yang ditekankan redaktur berdasar dari pasal yang dicantumkan diantaranya adalah petahana dilarang melakukan mutasi jabatan dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain.

(132) Penerapan aturan yang melarang petahana itu sangat mendesak. **Sebab**, dari 270 daerah yang menggelar pilkada, ada potensi 230 petahana yang maju sebagai calon. Tidaklah heran, sejauh ini, petahana berlomba-lomba melakukan politisasi bantuan sosial untuk korban terdampak covid-19. Kondisi pandemi covid-19 dianggap momentum bagus membangun simpati pemilih hanya bermodalkan stempel. (76/MI/11052020/P9/K1-4/Koherensi Kondisional) *commit to user*

Adapun koherensi pada data (132) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk penyebab dengan penanda lingual *sebab*. Bentuk penyebab yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut berkenaan dengan pelaksanaan pilkada tahun 2020 oleh 270 daerah, terdapat peluang petahana mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, perlu ada penerapan aturan yang melarang petahana dalam hal menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk meraih simpati masyarakat atau kampanye terselubung.

(133) Dugaan penyalahgunaan bansos untuk kampanye ditemukan di sejumlah daerah. Pemberian bansos menyertakan simbol-simbol jabatan politik ataupun citra diri petahana. Salah seorang petahana di Jawa Tengah membagikan *hand sanitizer* yang diberi stiker bergambar wajahnya. **Setelah stiker dicopot**, ditemukan tulisan bantuan Kementerian Sosial. (77/MI/11052020/P10/K1-4/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (133) ditunjukkan pada proposisi keempat. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk temporal dengan penanda lingual *setelah stiker dicopot*. Bentuk temporal yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut merupakan penemuan fakta bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang dimanipulasi dengan stiker yang ditempelkan di *hand sanitizer* yang diberikan oleh petahana di Jawa Tengah. Penyalahgunaan tersebut dilakukan untuk membangun citra petahana sebagai upaya kampanye terselubung di tengah pandemi Covid-19.

(134) Namun, Bawaslu belum bisa turun tangan mengusut dugaan pelanggaran petahana **karena** pilkada masih dalam status ditunda. KPU belum mencabut penundaan itu. **Karena** itu,

eloknya, pemilih yang cerdas menjatuhkan sanksi di kotak suara atas petahana yang memanfaatkan kesempatan di masa pandemi. (79/MI/11052020/P12/K1-3/Koherensi Kondisional)

Terakhir, koherensi dari teks editorial *Normal Baru Pilkada* pada data (134) ditunjukkan pada proposisi pertama dan kedua. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *karena*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut berupa penundaan pilkada yang dapat digunakan Bawaslu untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh petahana atas pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, redaktur juga memaparkan bahwa pelanggaran yang dilakukan petahana sebaiknya diberi sanksi melalui kotak suara. Hal tersebut diartikan agar tidak memilih petahana saat pilkada berlangsung.

Selanjutnya adalah data koherensi kondisional yang ditemukan pada editorial *Media Indonesia* edisi 27 Mei 2020. Data (135), (136), dan (137) diuraikan dan dianalisis sebagaimana berikut.

- (135) Kita mafhum jika rencana pemberlakuan *new normal* merupakan upaya untuk menyelamatkan perekonomian. Sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan, hingga pertengahan Mei, sudah 7 juta pekerja di-PHK. **Karena** itu, pemberlakuan *new normal* menjadi harapan meredakan badai, sementara riset tentang obat dan vaksin terus berjalan. (83/MI/27052020/P2/K1-3/Koherensi Kondisional)
- (136) Bekasi dikatakan akan menjadi percontohan **karena** kurva R0 (R naught) sudah di bawah 1. Ini mengartikan angka reproduksi kasus dari seorang penderita. (89/MI/27052020/P8/K1/Koherensi Kondisional)
- (137) Pengorbanan seluruh lapisan masyarakat selama tiga bulan ini semestinya jangan menjadi kesia-siaan **akibat** ketidaksiapan *new normal*. (94/MI/27052020/P20/K1/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (135), (136), dan (137) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah kausalitas berbentuk alasan dan konsekuensi dengan penanda lingual *karena* dan *akibat*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada teks editorial berjudul *Pendisiplinan New Normal* tersebut berupa kesetujuan atas pemberlakuan normal baru menjadi masa penantian atas vaksin dan sebagai upaya penyelamatan ekonomi Indonesia.

Demikian pula, redaktur memaparkan bahwa Kota Bekasi menjadi wilayah percontohan kesiapan normal baru karena kurva sudah R0. Hal tersebut diartikan bahwa tidak ada penambahan kasus di Kota Bekasi sehingga dapat menjadi kota yang berpartisipasi dalam penerapan normal baru di tahap awal. Selain itu, redaktur juga menyampaikan bahwa normal baru harus sudah siap agar tiga bulan PSBB yang diterapkan pada masyarakat tidak sia-sia.

Masih pada editorial *Media Indonesia*, pada edisi 28 Mei 2020 berikut ditemukan tiga data koherensi kondisional sebagaimana termaktub dalam data (138), (139), dan (140). Berikut merupakan uraian data serta analisisnya.

- (138) Tatanan normal baru atau *new normal* ialah pilihan rasional. Ia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalani **karena** sampai detik ini belum diketahui kapan ekspansi covid-19 akan usai. Kita jelas tidak mungkin terus menunggu dalam ketidakpastian, sementara ekonomi harus kembali menggeliat demi menopang kehidupan rakyat. (100/MI/28052020/P2/K1-3/Koherensi Kondisional)
- (139) Penilaian superketat sebelum memperbolehkan daerah memasuki era normal baru bisa menjadi langkah awal yang

baik. Namun, hal itu masih jauh dari cukup. Pemberlakuan kebijakan itu perlu dukungan masyarakat secara total **karena** merekalah yang akan menjalaninya nanti. (108/MI/28052020/P6/K1-3/Koherensi Kondisional)

- (140) Salah satu penyakit dalam mengelola negara ini ialah buruknya komunikasi dan kurangnya sosialisasi kebijakan kepada rakyat. Penyakit itu tentu tak boleh menulari kebijakan tatanan normal baru **karena** yang dihadapi ialah penyakit berbahaya bernama covid-19. (112/MI/28052020/P11/K1-2/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (138), (139), dan (140) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *karena*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada teks editorial berjudul *Partisipasi Publik di Era Normal Baru* tersebut berkaitan dengan persebaran Covid-19 yang tidak jelas dan tidak pasti sehingga normal baru harus tetap dijalankan agar perekonomian tetap berputar. Selain itu, redaktur juga menekankan bahwa masyarakat merupakan pihak yang menjalani normal baru sehingga masyarakat harus mendukung penuh kebijakan normal baru yang direncanakan oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu cakap dalam menyosialisasikan normal baru kepada masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Data koherensi kondisional berikutnya ditemukan pada editorial *Media Indonesia* edisi 30 Mei 2020. Data (141) dan (142) di bawah ini memuat struktur koherensi kondisional dan berikut merupakan analisisnya

- (141) Kecenderungan yang sama juga berlangsung di Indonesia. Bali, sebagai destinasi utama Indonesia, mengacu data Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Februari hingga April lalu, menderita potensi kerugian hingga US\$9 miliar atau setara

Rp135 triliun. Hal itu terjadi **akibat** wisatawan Tiongkok dan Australia yang menjadi pasar terbesar menghentikan aktivitas ke Pulau Dewata. (118/MI/30052020/P4/K1-3/Koherensi Kondisional)

- (142) **Karena itu**, kita mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mendorong sektor pariwisata agar tetap produktif di masa sulit. Dalam sidang kabinet terbatas, Kamis (28/5), Presiden meminta industri pariwisata menyiapkan konsep baru pada tatanan normal baru atau *new normal*. (122/MI/30052020/P7/K1-2/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (141) dan (142) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah kausalitas berbentuk konsekuensi dan alasan dengan penanda lingual *akibat* dan *karena*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada teks editorial berjudul *Produk Wisata di Era New Normal* tersebut adalah terjadinya penurunan wisatawan mancanegara, seperti Tiongkok dan Australia membuat industri pariwisata Indonesia berpeluang mengalami kerugian mencapai Rp135 triliun. Redaktur juga menyampaikan perlunya apresiasi atas pendapat Presiden Joko Widodo terkait perlunya industri pariwisata untuk berinovasi dan tetap produktif di masa pandemi dengan menciptakan konsep wisata dengan menyertakan protokol kesehatan sebagai bentuk tatanan kehidupan normal baru.

Selanjutnya merupakan data koherensi kondisional yang terdapat dalam editorial *Media Indonesia* edisi 5 Juni 2020 sebagaimana tampak pada data (143), (144), dan (145). Berikut merupakan uraian dan analisisnya.

- (143) Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta kemarin sore memang ditutup sama dengan hari sebelumnya di level 14.095 per dolar AS. Ditutup stagnan

karena aksi *profit taking*, aksi mengambil untung dalam jangka pendek dengan memanfaatkan situasi tertentu. (129/MI/05062020/P2/K1-2/Koherensi Kondisional)

(144) Wajar-wajar saja rupiah diterpa aksi mengambil untung **karena** selama dua hari sebelumnya, rupiah perkasa. Rupiah melesat tajam 2,29% pada Rabu (3/6) dan sehari sebelumnya sebesar 1,34%. Secara keseluruhan, apresiasi rupiah ini melibas mata uang Asia hingga mata uang Eropa. (130/MI/05062020/P3/K1-3/Koherensi Kondisional)

(145) Penguatan tajam rupiah ditopang oleh faktor global dan juga kebijakan dalam negeri. Pertama, jelas **karena** pelemahan nilai tukar dolar AS akibat ekonomi dunia yang berangsur pulih sejalan dengan dibukanya kembali kegiatan ekonomi di berbagai negara, serta meluasnya demonstrasi terkait isu rasialisme di AS. (132/MI/05062020/P4/K1-2/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (143), (144), dan (145) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *karena*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada teks editorial berjudul *Rupiah Menuju Kenormalan Baru* tersebut adalah terjadinya peristiwa *profit taking* yang dilakukan oleh masyarakat saat nilai kurs rupiah mencapai Rp14.095 per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah kewajaran oleh redaktur, terlebih sejak dua hari sebelumnya rupiah naik 2,29%, bahkan mengalahkan mata uang Asia hingga Eropa. Alasan utama dari melonjaknya nilai rupiah, karena faktor-faktor global dan pemberlakuan kebijakan normal baru oleh pemerintah.

Berikutnya, masih pada editorial yang sama dengan sebelumnya, koherensi kondisional pada data (146), (147), (148), dan (149) di bawah ini ditemukan pada editorial *Media Indonesia* edisi 5 Juni 2020. Berikut merupakan analisisnya. *commit to user*

- (146) Bila dilihat dari sisi domestik, pemberlakuan skenario kenormalan baru (*new normal*) ditanggapi pasar secara positif. **Setelah dua bulan terakhir pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia untuk menghambat laju penyebaran covid-19**, kini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengeksplorasi dan mempersiapkan kebijakan kenormalan baru dalam menyikapi pandemi ini. (133/MI/05062020/P5/K1-2/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (146) ditunjukkan pada proposisi kedua. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk temporal dengan penanda lingual *setelah dua bulan terakhir pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia untuk menghambat laju penyebaran covid-19*. Bentuk temporal yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut adalah penanda waktu pemerintah melakukan eksplorasi dan mempersiapkan kebijakan mengenai normal baru setelah dua bulan pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia.

- (147) Ditambah lagi perilaku investor global yang mulai mencari kembali instrumen pasar dengan imbal hasil tinggi yang **menyebabkan** derasnya aliran modal ke dalam negeri yang terlihat dari lelang obligasi atau surat berharga negara (SBN) pada Selasa (2/6), yang penawarannya mencapai Rp105,27 triliun. (135/MI/05062020/P7/K1/Koherensi Kondisional)
- (148) Jujur diakui bahwa tekanan **akibat** covid-19 membuat pasar modal mengalami guncangan. Namun, sejumlah kebijakan yang diambil otoritas mampu memicu sentimen positif. IHSG mulai kembali hijau. (137/MI/05062020/P9/K1-3/Koherensi Kondisional)
- (149) **Untuk itulah**, implementasi *new normal* perlu terus dijaga dan ditingkatkan kesiapannya demi menjaga sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar. (138/MI/05062020/P10/K1/Koherensi Kondisional)

Selanjutnya, masih pada teks editorial yang sama, koherensi pada data (147), (148), dan (149) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah kausalitas berbentuk penyebab, konsekuensi, dan alasan dengan penanda lingual *menyebabkan*, *akibat* dan *untuk itulah*. Bentuk penyebab yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut adalah meningkatnya aliran modal dari luar negeri atas lelang obligasi atau surat berharga negara karena banyak investor mencari instrumen pasar, salah satu targetnya adalah Indonesia. Meskipun sempat membuat pasar modal jatuh, pemberlakuan normal baru oleh pemerintah menjadikan sentimen positif terhadap pasar modal. Redaktur juga menyampaikan bahwa situasi normal baru perlu dipertahankan dan ditingkatkan kesiapannya oleh Pemerintah Indonesia untuk keperluan menjaga sentimen positif dan kepercayaan investor terhadap pasar.

Selain pada edisi 5 Juni 2020, koherensi kondisional juga ditemukan pada editorial *Media Indonesia* edisi 6 Juni 2020 sebagaimana tampak pada data (150), (151), (152), (153), dan (154) berikut, disertai uraian dan analisis.

- (150) **SETELAH diperpanjang tiga kali berturut-turut**, masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta kembali diperpanjang untuk keempat kalinya. (145/MI/06062020/P1/K1/Koherensi Kondisional)
- (151) Hal baru dari PSBB periode ini ialah sebanyak 19 sektor diizinkan untuk kembali beroperasi. **Pada tiga periode PSBB sebelumnya**, hanya 11 sektor yang mendapat izin untuk melakukan aktivitas. (146/MI/06062020/P3/K1-2/Koherensi Kondisional)
- (152) Dalam kaitan itu, kita pun menyaksikan masjid-masjid di Ibu Kota mulai kembali beraktivitas **setelah ditutup sejak 10 April 2020 akibat pandemi covid-19**. (149/MI/06062020/P5/K1/Koherensi Kondisional)

- (153) **Pada hari pertama pemberlakuan PSBB transisi itu**, semua aktivitas dilaporkan berjalan baik. Salat Jumat di masjid dilaporkan berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Setiap jemaah yang akan melaksanakan ibadah salat Jumat, misalnya, diwajibkan mengikuti prosedur kesehatan. Mulai dari cek suhu tubuh, cuci tangan sebelum masuk masjid, mengenakan masker, membawa sendiri sajadah, hingga menerapkan *physical distancing* saf berjarak satu meter. (150/MI/06062020/P7/K1-4/Koherensi Kondisional)
- (154) Sebagai persiapan memasuki era kenormalan baru, kita menilai keputusan untuk menetapkan secara khusus periode PSBB transisi tersebut dapat diterima. **Sebelum memasuki era kenormalan baru**, masyarakat memang perlu melatih kebiasaan untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin agar saat beraktivitas dan berproduktivitas kembali, mereka tetap terlindung dari bahaya covid-19. (153/MI/06062020/P8/K1-2/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (150), (151), (152), (153), dan (154) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk temporal dengan penanda lingual *setelah diperpanjang tiga kali berturut-turut, pada tiga periode PSBB sebelumnya, setelah ditutup sejak 10 April 2020 akibat pandemi covid-19, pada hari pertama pemberlakuan PSBB transisi itu dan sebelum memasuki era kenormalan baru*. Bentuk temporal yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada teks editorial berjudul ***Transisi Menuju Kenormalan Baru*** tersebut adalah penanda waktu perpanjangan keempat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta sebagai masa transisi menuju normal baru.

Redaktur *Media Indonesia* juga menampilkan bentuk temporal terkait perbedaan PSBB keempat dengan ketiga periode sebelumnya, yaitu jumlah sektor yang diizinkan untuk beroperasi adalah 19 sektor, delapan sektor lebih

banyak dibandingkan dengan ketiga periode PSBB sebelumnya. Salah satu sektor yang kembali aktif adalah rumah ibadah setelah ditutup sejak 10 April 2020, masa awal persebaran Covid-19 di Indonesia.

Kemudian, redaktur menginformasikan bahwa hari pertama pemberlakuan PSBB transisi berjalan baik, misalnya penerapan protokol kesehatan yang ketat saat menghadiri salat Jumat di masjid. Prosedur kesehatan yang diterapkan antara lain cek suhu tubuh, cuci tangan, mengenakan masker, dan saf yang berjarak. Redaktur juga menyampaikan bahwa masa transisi memang perlu diterapkan pada masyarakat sebagai bentuk pembiasaan sebelum memasuki masa normal baru.

Selain bentuk temporal, koherensi kondisional yang bersumber dari editorial *Media Indonesia* edisi 6 Juni 2020 juga memuat bentuk kausalitas sebagaimana tampak pada data (155), (156), dan (157). Berikut merupakan analisis dan pembahasan atasnya.

(155) **Karena itu**, kita mendorong seluruh kalangan agar benar-benar patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa transisi. Di sektor transportasi yang rawan penularan, misalnya, kita mendesak agar protokol yang sama benar-benar konsisten dijalankan. (155/MI/06062020/P9/K1-2/Koherensi Kondisional)

Selanjutnya, masih pada teks editorial yang sama, koherensi pada data (155) ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *karena itu*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut adalah agar kedisiplinan ditegakkan oleh berbagai pihak, terutama

dalam hal yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Rangkaian prosedur tersebut merupakan bagian dari masa PSBB transisi menuju normal baru yang harus ditaati.

(156) Kita mau agar PSBB transisi benar-benar menjadi periode peralihan dan persiapan **sebelum masyarakat benar-benar memasuki era kenormalan baru**. Saat tatanan kenormalan baru itu diberlakukan **sepenuhnya**, kita ingin semua kalangan telah siap dengan budaya kesehatan baru dan disiplin kuat untuk menjalankan protokol kesehatan. (158/MI/06062020/P13/K1-2/Koherensi Kondisional)

Adapun koherensi pada data (156) ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk penyebab dan alasan dengan penanda lingual *sebelum masyarakat benar-benar memasuki era kenormalan baru*. Bentuk penyebab yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut adalah penanda waktu PSBB transisi yang diterapkan di wilayah DKI Jakarta, sebelum dimulainya masa normal baru yang akan dihadapi oleh masyarakat. PSBB transisi dilakukan agar kesiapan menghadapi normal baru berjalan lancar.

(157) **Karena** itu, seluruh pemangku kepentingan harus menyukseskan periode ini. Saat kenormalan baru sepenuhnya diberlakukan, tidak ada lagi kegagapan. (159/MI/06062020/P14/K1-2/Koherensi Kondisional)

Koherensi pada data (157) ditunjukkan pada proposisi pertama. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *karena itu*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* tersebut adalah agar tidak ada kegagapan dan kelalaian dalam

menghadapi normal baru pascatransisi. Terdapat keharusan bagi pemerintah untuk bersama-sama mendukung PSBB periode transisi sebagai periode peralihan yang pemberlakuannya perlu diiringi dengan kedisiplinan masyarakat.

Terakhir, koherensi kondisional lain ditemukan pada editorial *Media Indonesia* sebagaimana tampak pada data (158) dan (159). Berikut merupakan uraian data beserta analisisnya.

- (158) Ini penting **karena** dalam masa kenormalan baru, tidak boleh ada kelengahan dan kelalaian sedikit pun. Kita sedang berperang melawan virus yang telah membunuh lebih dari 400 ribu orang di dunia serta mematikan sebagian besar aktivitas ekonomi global. Lengah berarti bencana, lalai ibarat langkah pertama menuju kekalahan. (170/MI/11062020/P9/K1-3/Koherensi Kondisional)
- (159) **Karena itu**, tahapan menuju *new normal* mesti betul-betul berbasis pertimbangan ilmiah, dikalkulasi berdasarkan basis epidemiologis, serta mempertimbangkan kesiapan manajemen daerah dalam pengawasan wabah. (173/MI/11062020/P12/K1/Koherensi Kondisional)

Bentuk koherensi pada data (158) dan (159) terletak di badan paragraf masing-masing. Jenis koherensi kondisional yang dihadirkan dalam tiap-tiap data tersebut adalah bentuk alasan dengan penanda lingual *karena* dan *karena itu*. Bentuk alasan yang ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada teks editorial berjudul *New Normal bukan Celah untuk Lengah* tersebut adalah pentingnya membiasakan diri dengan prosedur-prosedur kesehatan dengan disiplin dan tanpa kelalaian karena hal tersebut merupakan dasar utama dalam penerapan tatanan kehidupan normal baru. Selain itu, redaktur juga menampilkan keharusan tahapan normal baru yang memiliki dasar ilmiah dan

disesuaikan dengan basis epidemiologis di samping mempertimbangkan kesiapan tiap daerah agar tidak menciptakan gelombang dua wabah.

G. Praanggapan

Praanggapan merupakan elemen semantik yang berkaitan dengan pengandaian yang dihasilkan dari hal-hal yang pernah diketahui sebelumnya. Hal-hal tersebut dapat berupa pengetahuan atau kepercayaan. Praanggapan umumnya dimunculkan dengan premis atas pengetahuan yang diyakini dan digunakan untuk menafsirkan informasi dari teks. Berikut merupakan analisis data praanggapan dari teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*.

Data pertama struktur praanggapan yang ditemukan berasal dari editorial *Kompas* yang ditunjukkan pada data (160). Berikut merupakan tampilan beserta analisis praanggapan atasnya.

(160) Penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas. **Jika kesehatan tidak ditangani baik, perbaikan ekonomi sulit mengikuti kurva V.** Bahkan, walaupun mengikuti kurva U, kecepatan kurva naik yang menunjukkan membaiknya perekonomian sangat tergantung dari kemampuan Indonesia menangani penularan virus. Penanganan kesehatan juga menyangkut kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. (9/K/03062020/P6/K1-4/Praanggapan)

Data sajian (160) merupakan data yang memuat praanggapan mengenai penanganan kesehatan yang harus menjadi prioritas utama agar perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik. Redaktur memunculkan praanggapan tentang perbaikan ekonomi yang akan sulit dilakukan dan sejalan dengan kurva V apabila penanganan Covid-19 di Indonesia masih tidak terstruktur dengan baik.

Praanggapan tersebut dimunculkan dengan gagasan tambahan bahwa kepercayaan masyarakat internasional bergantung pada bagaimana pola penanganan kasus Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia. Secara tidak langsung, redaktur memberikan praanggapan implisit, bahwa apabila penanganan Covid-19 teratasi dengan baik, maka perekonomian pun dapat lekas diperbaiki.

Selanjutnya, praanggapan ditemukan dalam editorial *Media Indonesia*. Berikut merupakan tampilan beserta analisis praanggapan yang ditunjukkan pada data (161).

- (161) Petahana yang melanggar ketentuan Pasal 71 itu bisa didiskualifikasi sebagai calon oleh KPU setempat. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta. Eloknya, seluruh petahana yang melakukan politisasi bantuan bencana pandemi covid-19 diberi sanksi tegas. Bila perlu didiskualifikasi. Di tengah bencana saja masih mencoba menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan dengan menggunakan uang dari APBN atau APBD, **setelah berkuasa kembali malah kian menjaga-jadi mencuri uang negara atau uang daerah.** (78/MI/11052020/P11/K1-5/Praanggapan)

Data (161) memuat praanggapan dari teks editorial koran *Media Indonesia*. Praanggapan ditunjukkan pada kalimat terakhir dan berisi tentang pengandaian bahwa banyak petahana yang memanfaatkan keadaan pandemi sebagai ajang kampanye dengan memberikan bantuan kepada masyarakat menggunakan uang APBN/APBD, apabila kembali terpilih dan memimpin, maka berpotensi melakukan korupsi. Anggapan tersebut dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* didasarkan atas penyalahgunaan uang negara dalam upaya membantu masyarakat terdampak Covid-19 oleh para calon kepala daerah,

khususnya petahana, atas nama calon kepala daerah, demi meraih simpati masyarakat.

Selain data praanggapan di atas, berikut merupakan data praanggapan yang ditemukan pada editorial *Media Indonesia* edisi 27 Mei 2020. Praanggapan ditunjukkan pada data (162) dan (163) berikut sekaligus analisisnya.

- (162) **Jika pemerintah menerapkan *new normal* dalam waktu dekat, yakni saat kurva belum jelas melandai, pertarungan kita dalam babak baru perang melawan korona ini sesungguhnya amat besar.** Pertaruhan ini kita gantungkan pada kedisiplinan orang per orang. (88/MI/27052020/P6/K1-2/Praanggapan)
- (163) **Selain itu, tentunya pemerintah harus sudah bersiap dengan skenario-skenario cadangan jika *new normal* tidak berhasil atau bahkan memang belum siap.** (92/MI/27052020/P18/K1/Praanggapan)

Data (162) dan (163) merupakan data yang memuat praanggapan pada koran *Media Indonesia* berjudul *Pendisiplinan New Normal*. Praanggapan yang dimunculkan redaktur pada data (162) adalah penerapan tatanan kehidupan normal baru dapat menimbulkan pergolakan besar apabila dilakukan pada waktu dekat, di saat kurva kasus Covid-19 belum turun. Redaktur pun menyampaikan bahwa kedisiplinan setiap oranglah yang menjadi penentu apakah kurva dapat melandai atau justru menjadi naik. Kemudian pada data (163), redaktur mengandaikan normal baru tidak siap atau bahkan tidak berhasil diterapkan dengan baik. Pengandaian tersebut memunculkan kritik agar pemerintah memiliki rencana cadangan terkait kemungkinan tersebut, sebab penerapan normal baru di saat kurva belum melandai, hanya menimbulkan perkiraan bahwa normal baru tidak akan berjalan dengan baik. Edisi lain editorial *Media Indonesia* yang

commit to user

memuat praanggapan ditemukan pada data (164). Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

(164) **Namun, tatanan normal baru juga punya risiko besar. Jika penerapannya sembarangan, ia bisa menjadi bumerang. Jika masyarakat abai dengan rambu-rambu yang ditentukan, ia dapat meninggikan kembali tingkat penularan. Jika pemerintah tak tegas, ia membuka peluang terjadinya penajahan virus gelombang kedua.** (105/MI/28052020/P4/K1-4/Praanggapan)

Data (164) memuat tiga buah praanggapan. Pertama, penerapan normal baru yang sembarangan akan menjadi serangan balik yang dapat menginfeksi banyak orang. Praanggapan kedua yang dimunculkan oleh redaktur adalah penularan Covid-19 yang akan mengalami peningkatan apabila masyarakat tidak acuh terhadap protokol kesehatan, rambu-rambu, dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19. Terakhir, apabila pemerintah tidak tegas dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, diyakini akan memicu terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia. Ketiga praanggapan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah kritik yang disampaikan oleh redaktur kepada publik, masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya, praanggapan ditemukan pada editorial *Media Indonesia* edisi 30 Mei 2020. Berikut merupakan analisis data (165) yang memuat praanggapan.

(165) **Destinasi lain di Tanah Air juga bukan pengecualian dari tren penurunan dan penghentian aktivitas wisata tersebut. Jika hal itu terus berlangsung, kematian industri pariwisata di Tanah Air pun tinggal menunggu waktu.** (120/MI/30052020/P5/K1-2/Praanggapan)

Pada data (165), praanggapan dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* terkait dengan kepariwisataan Indonesia di masa pandemi. Redaktur meyakini bahwa industri pariwisata di Indonesia lambat laun akan mengalami kematian apabila tidak ada inovasi dan terobosan untuk menarik wisatawan internasional mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Redaktur meyakini hal tersebut karena di masa pandemi Covid-19 industri pariwisata sudah mengalami vakum dan mengalami penurunan yang signifikan apalagi jika ditambah dengan keadaan pariwisata Indonesia yang tidak mengikuti perubahan atau membuka sektor pariwisata di era normal baru dengan inovasi baru.

Terakhir, data (166) berikut memuat praanggapan dari editorial *Media Indonesia* edisi 5 Juni 2020. Berikut merupakan analisis data (166).

(166) **Jangan membuat celah terjadinya gelombang kedua penyebaran covid-19. Jika itu sampai terjadi, roda perekonomian bisa kembali terhenti dan aliran modal akan keluar lagi dari Indonesia, buntutnya rupiah berisiko terjerebab seperti Maret lalu.** (141/MI/05062020/P13/K1-2/Praanggapan)

Data (166) merupakan data yang memuat praanggapan dari *Media Indonesia* terkait dengan perekonomian yang akan mengalami kemerosotan apabila persebaran Covid-19 tidak ditekan. Oleh karenanya, redaktur menyampaikan bahwa tidak boleh ada celah yang dapat berpeluang menimbulkan gelombang kedua Covid-19 sebab akan berdampak pada banyak hal, khususnya mengenai roda perekonomian yang akan kesulitan berputar sehingga berpotensi membuat rupiah mengalami penurunan drastis.

H. Paralelisme

Elemen retorik pertama adalah paralelisme. Paralelisme merupakan perangkat retorik berupa pengulangan kata atau frasa yang memainkan peranan spesifik dalam teks. Berikut merupakan data paralelisme yang ditemukan dalam teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia* beserta analisisnya. Struktur paralelisme pertama ditemukan dalam editorial *Kompas* yang ditunjukkan pada data (167) berikut.

(167) Hasil jajak pendapat *Kompas* 15 Juni 2020 menunjukkan 40,3 persen memahami langkah pemerintah melonggarkan aktivitas perekonomian di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Organisasi Kesehatan Dunia (**WHO**) menilai Indonesia belum memenuhi syarat untuk menuju ke tahapan normal baru. **WHO** membeberkan sejumlah prasyarat yang belum dipenuhi Indonesia. Situasi dan kondisi setiap provinsi tentunya sangat berbeda-beda. Apa pun, penilaian **WHO** haruslah diterima sebagai bahan introspeksi dan perbaikan. (51/K/16062020/P6/K1-5/Paralelisme)

Data (167) merupakan data yang memuat elemen retorik berupa paralelisme. Paralelisme dalam data (167) ditemukan berupa pengulangan kata *WHO*, yaitu badan Organisasi Kesehatan Dunia, sebagai badan tertinggi yang berperan dalam hal pemantauan kesehatan melalui koordinasi negara-negara secara universal, terutama di masa pandemi Covid-19. Peran WHO yang begitu penting, menjadi acuan bagi negara-negara dalam melakukan tindakan yang berkenaan dengan kondisi dan perkembangan Covid-19, salah satunya mengenai wacana normal baru di Indonesia. Redaktur melakukan penekanan dengan memberikan pengulangan kata *WHO* dalam data (167) sebagai bentuk pemfokusan atas perihal yang disampaikan oleh WHO sebagai pihak paling

penting dalam upaya penekanan persebaran wabah di dunia. Pada data tersebut, WHO menyampaikan bahwa Indonesia belum memenuhi beberapa syarat yang diperlukan untuk memasuki fase normal baru sehingga redaktur menyampaikan agar saran dari WHO bisa menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia.

Paralelisme lain ditemukan dalam editorial *Media Indonesia* pada data (168) dan (169). Berikut merupakan tampilan beserta analisis data paralelisme.

- (168) Indonesia pun tidak sendiri dalam menuju *new normal*. Beberapa negara Eropa dan juga beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah lebih dulu menjalankan *new normal*, sedangkan Inggris sebentar lagi juga akan menyusul. (84/MI/27052020/P3/K1-2/Paralelisme)
- (169) Selain itu, tentunya pemerintah harus sudah bersiap dengan skenario-skenario cadangan jika *new normal* tidak berhasil atau bahkan memang belum siap. Presiden harus berani memundurkan rencana ataupun memberhentikan *new normal* tanpa harus menunggu tingkat penularan kembali melonjak. (93/MI/27052020/P18-19/K1;K1/Paralelisme)

Data (168) dan (169) merupakan data yang memuat paralelisme dari teks editorial tentang normal baru pada koran *Media Indonesia* berjudul *Pendisiplinan New Normal*. Kedua data tersebut menunjukkan perulangan terhadap frasa *new normal*. *New normal* merupakan bentuk tatanan kehidupan baru yang dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Data (168) berkaitan dengan penerapan normal baru yang sudah mulai diberlakukan di beberapa negara, sedangkan data (169) berkenaan dengan kesiapan pemerintah apabila normal baru yang dijalankan tidak sesuai harapan justru menimbulkan banyak kegagalan dalam pencegahan sehingga membuat kasus Covid-19 naik. Paralelisme ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada frasa *new normal*
commit to user

sebab normal baru merupakan topik utama dari teks editorial tersebut sehingga perlu ditekankan bahwa penerapan normal baru perlu persiapan yang sudah dipertimbangkan dengan baik.

Struktur paralelisme terakhir ditemukan dalam editorial *Media Indonesia*.

Data (170) ini merupakan data yang memuat paralelisme, berikut merupakan analisis data paralelisme editorial *Media Indonesia* edisi 5 Juni 2020..

(170) Pemerintah pusat dan daerah harus seiring dan selaras dalam melaksanakan kebijakan penanganan **covid-19**. Apalagi, pergerakan kasus **covid-19** yang masih tergolong dinamis dengan angka kasus terkonfirmasi masih terus bertambah setiap harinya di sejumlah daerah. Penanganan **covid-19** masih menjadi salah satu pertimbangan investor dalam memercayakan investasinya di Indonesia. Keduanya berjalan bersamaan dan memengaruhi satu sama lain. Pemerintah perlu mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk *new normal* dengan matang. (139/MI/05062020/P11-12/K1-2;K1-3/Paralelisme)

Data (170) merupakan data yang memuat bentuk paralelisme berupa pengulangan kata *Covid-19*. Covid-19 merupakan virus yang menyebar ke seluruh penjuru dunia dan ditetapkan sebagai sebuah wabah. Pada data tersebut, redaktur *Media Indonesia* menyampaikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah harus seiring, karena kasus Covid-19 masih naik-turun dan belum mencapai penurunan yang stabil di tiap daerah. Oleh karena penanganan Covid-19 berdampak pada sentimen pasar, perlu dijalankan secara seimbang antara aspek kesehatan dan ekonomi agar perekonomian Indonesia mengalami perbaikan melalui kepercayaan investor asing.

I. Perbandingan

Perbandingan merupakan bagian dari elemen retorik yang berkaitan dengan pengontrasan atau pembedaan antara dua hal dengan cara dibandingkan. Penanda lingual yang berada di dalam teks wacana adalah penggunaan kata *banding* dan kata turunannya. Perbandingan pada umumnya ditujukan untuk menggambarkan dua hal yang memiliki keterkaitan atau tidak memiliki keterkaitan, akan tetapi dikaitkan untuk dikontraskan. Pada penelusuran data mengenai perbandingan, dari teks editorial normal baru pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*, ditemukan sebuah data. Berikut merupakan tampilan data (171) beserta analisis data perbandingan dari editorial *Media Indonesia*.

(171) **Meski begitu, harus diakui bahwa pemerintah memasuki perang itu dengan kondisi yang berbeda bila dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat.** (85/MI/27052020/P4/K1/Perbandingan)

Data (171) merupakan data dari editorial *Media Indonesia* yang memuat bentuk perbandingan antara dua hal. Redaktur *Media Indonesia* memaparkan bahwa tatanan kehidupan normal baru akan dilaksanakan di beberapa negara. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, dan negara Indonesia sendiri. Namun, redaktur menekankan pada perbedaan antara negara-negara tersebut dalam langkah awal dalam menghadapi Covid-19 sehingga redaktur membandingkan kondisi antara ketiga negara tersebut, mengingat kurva Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan dan masih tentatif naik-turun.

J. Metafora

Metafora merupakan salah satu unsur dari elemen retorik berupa kata atau rangkaian kata yang membentuk makna kiasan. Secara harfiah, metafora adalah bentuk ungkapan, baik perumpamaan, pengibaratan, sindiran, yang dikaitkan dengan proposisi lain. Tujuan penggunaan metafora adalah sebagai bentuk pengekspresian suatu hal oleh komunikator, dalam hal ini adalah redaktur. Berikut merupakan analisis data metafora dari teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*. Data (172) dan (173) berikut merupakan data yang memuat metafora dari editorial *Kompas*.

- (172) **Bak makan buah simalakama**, di tengah upaya penerapan normal baru, justru banyak yang abai protokol kesehatan. Kasus positif Covid-19 pun naik signifikan. (55/K/23062020/P1/K1-2/Metafora)
- (173) Asumsi pemerintah bahwa puncak penularan Covid-19 berlangsung pada bulan Mei ternyata harus direvisi. Hari-hari ini, penambahan angka kasus baru bahkan seperti berkejaran, **“berlomba” untuk memecahkan “rekor”**. (58/K/23062020/P2/K1-2/Metafora)

Data (172) dan (173) merupakan bentuk metafora dari teks editorial normal baru pada koran *Kompas* berjudul *Saatnya Bertindak Tegas*. Data (172) yang dimunculkan oleh redaktur *Kompas* berupa peribahasa *bak makan buah simalakama*. Konsep makna dari peribahasa tersebut diartikan sebagai kondisi dilematis yang dialami Indonesia dalam tahap awal memasuki masa normal baru. Redaktur memaparkan bahwa di tengah penerapan tatanan kehidupan normal baru, justru kasus Covid-19 semakin tinggi karena banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Seharusnya, penerapan tatanan normal baru dapat menekan angka kasus Covid-19. Pemakaian bentuk kiasan tersebut

digunakan untuk mengekspresikan pemikiran redaksi *Kompas* dalam menanggapi fenomena normal baru yang tidak sesuai dengan rencana pemerintah.

Pada data (173), *berlomba untuk memecahkan rekor* merupakan bentuk metafora berupa pengibaratan sekaligus sindiran. Sindiran tersebut ditujukan redaktur kepada seluruh penduduk Indonesia, baik jajaran pemerintah maupun masyarakat sipil terkait kasus Covid-19 yang diibaratkan sebagai sebuah ajang perlombaan yang mengejar rekor tertinggi. Data (173) tersebut dimunculkan oleh redaktur *Kompas* karena didasarkan atas fakta yang terjadi berkebalikan dari asumsi yang dipaparkan Pemerintah Indonesia bahwa pandemi dapat berakhir di bulan Mei 2020.

Selain metafora yang terdapat pada editorial koran *Kompas*, dalam data (174) berikut termuat metafora pada editorial *Media Indonesia*. Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

(174) Salah satu **penyakit** dalam mengelola negara ini ialah buruknya komunikasi dan kurangnya sosialisasi kebijakan kepada rakyat. Penyakit itu tentu tak boleh menulari kebijakan tatanan normal baru karena yang dihadapi ialah penyakit berbahaya bernama covid-19. (111/MI/28052020/P11/K1-2/Metafora)

Data (174) tersebut merupakan data metafora yang diperoleh dari teks editorial *Media Indonesia*. Metafora yang terkandung dalam data tersebut adalah kata *penyakit*. Penyakit diasosiasikan sebagai sebuah kata afektif yang digunakan sebagai makian dan dimaknai sebagai sesuatu yang mendatangkan keburukan. Redaktur *Media Indonesia* menampilkan metafora tersebut sebagai upaya penggambaran kebobrokan Pemerintah Indonesia dalam hal berkomunikasi

dengan masyarakat. Oleh karenanya, redaktur *Media Indonesia* menyampaikan kritik agar kelemahan pemerintah tersebut tidak terjadi pada perihal terkait kebijakan tatanan normal baru.

Terakhir, data (175) berikut memuat metafora yang ditemukan dalam editorial *Media Indonesia* edisi 11 Juni 2020. Berikut merupakan tampilan data beserta uraian analisisnya.

(175) Dalam konteks Indonesia, pemerintah daerah memegang kuasa tak kalah penting dengan pusat. Merekalah yang pegang **kunci** syarat dan tahapan, sudah layak atau belumkah setiap daerah menerapkan *new normal*. Sembarangan membuka **kunci** itu, taruhannya besar, risikonya tinggi. (172/MI/11062020/P10/K1-3/Metafora)

Pada data (175), metafora yang ditampilkan adalah kata *kunci*. Metafora tersebut dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* dalam upaya mengekspresikan peranan pemerintah daerah yang juga memiliki kuasa tak jauh beda dengan pemerintah pusat terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, khususnya di daerah. Redaktur menyampaikan bahwa normal baru hendaknya dilakukan apabila kondisi memang sudah memungkinkan dan layak untuk menerapkan tatanan kehidupan normal baru sesuai dengan indikator nilai yang ditetapkan pemerintah. *Kunci* diibaratkan sebagai sebuah alat paling pokok yang digunakan untuk menjaga agar masyarakat di daerah masing-masing aman dari Covid-19. *Kunci* hanya dibuka manakala kesiapan daerah telah teruji dan kurva sudah turun atau bahkan sudah R0 (R naught).

Analisis struktur teks wacana editorial tentang normal baru dalam masa pandemi Covid-19 pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*, secara ringkas,
commit to user

didasarkan atas data struktur teks. Model struktur teks yang digagas oleh van Dijk berupa: (a) makrostruktur yang memuat topik makroglobal wacana; (b) superstruktur yang memuat skema wacana; dan (c) mikrostruktur yang memuat elemen-elemen mikro pembangun wacana seperti: (i) sintaksis berupa bentuk kalimat, kata ganti, dan leksikon; (ii) semantik berupa koherensi (fungsional dan kondisional) juga praanggapan; serta elemen retorik berupa paralelisme, perbandingan, dan metafora. Khusus pada elemen-elemen mikro pembangun wacana, masih diklasifikasikan lagi sesuai dengan sub-elemen sebagai kategori yang merupakan wujud spesifik atas mikrostruktur teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas dan Media Indonesia*.

Ragam data struktur teks yang terkandung di dalamnya terhitung sejumlah 175 data. Total data tersebut merupakan akumulasi dari frekuensi kemunculan data berdasarkan model struktur teks analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh van Dijk sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Frekuensi kemunculan data yang termuat di dalam teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas dan Media Indonesia* tersebut dipetakan sesuai klasifikasi struktur teks dan perincian sebagaimana tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Data Struktur Teks dalam Teks Editorial
tentang Normal Baru pada Koran *Kompas* dan *Media Indonesia*

Koran	Makro	Super	Mikro																		Total
			BK		KG		LEKS			KF		KK		PRA	PAR	PER	MET				
			Ak	Pas	Us	Th	Pos	Neg	Spe	Kon	Adi	Pen	Kau				Tem	Pb	Pr	Sin	
<i>Kompas</i>	6	6	1	5	10	3	0	1	1	12	2	1	14	2	1	1	0	1	1	0	68
<i>Media Indonesia</i>	7	7	2	5	17	2	2	5	2	11	1	2	24	8	6	3	1	0	1	1	107
Total	13	13	3	10	27	5	2	6	3	23	3	3	38	10	7	4	1	1	2	1	175

Keterangan:

Adi : Aditif	KK : Koherensi Kondisional	Pas : Pasif	PRA : Praanggapan
Ak : Aktif	Kon : Kontras	Pb : Peribahasa	Sin : Sindiran
BK : Bentuk Kalimat	LEKS : Leksikon	Pen : Penegasan	Spe : Spesifikasi
Kau : Kausalitas	MET : Metafora	PER : Perbandingan	Tem : Temporal
KF : Koherensi Fungsional	Neg : Negatif	Pos : Positif	Th : <i>Them</i> (mereka)
KG : Kata Ganti	PAR : Paralelisme	Pr : Perumpamaan	Us : <i>Us</i> (kita)

Tabel tersebut berisi data makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur yang ditemukan dalam teks editorial pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia*. Data makrostruktur dari koran *Kompas* dan *Media Indonesia* berjumlah 13 data, dengan perincian, makrostruktur pada editorial *Kompas* sebanyak 6 data, sedangkan *Media Indonesia* sebanyak 7 data. Demikian pula, data superstruktur yang mengandung *lead* skema dari teks editorial juga berjumlah 13 data dengan perincian yang sama, *Kompas* 6 data dan *Media Indonesia* 7 data. Data makrostruktur dan superstruktur dari masing-masing koran tersebut juga merepresentasikan teks editorial yang digunakan sebagai sumber data.

Struktur selanjutnya adalah mikrostruktur. Mikrostruktur terbangun atas elemen sintaksis, semantik, dan retorik. Pada elemen sintaksis, terdapat bentuk kalimat, kata ganti, dan leksikon. Data bentuk kalimat berwujud kalimat aktif dan pasif yang diambil dari setiap kalimat pertama dari *lead* masing-masing editorial, sehingga total data bentuk kalimat adalah 13 data. Ketiga belas data tersebut diperinci, 1 kalimat aktif dan 5 kalimat pasif pada editorial *Kompas*, serta 2 kalimat aktif dan 5 kalimat pasif pada editorial *Media Indonesia*.

Sementara itu, terdapat 32 data kata ganti, dengan perincian, kata ganti *kita* pada koran *Kompas* sebanyak 10 data dan *Media Indonesia* sebanyak 17 data. Kemudian, kata ganti *mereka* pada koran *Kompas* sebanyak 3 data dan *Media Indonesia* sebanyak 2 data. Data kata ganti *kita* didominasi oleh *Media Indonesia*, sedangkan kata ganti *mereka* didominasi oleh *Kompas*. Selanjutnya, data leksikon positif-negatif ditemukan sejumlah 8 data, dengan perincian, tidak ada leksikon

positif dalam editorial *Kompas*, hanya ada 1 data leksikon negatif. Sementara itu, pada editorial *Media Indonesia* terdapat 2 leksikon positif dan 5 leksikon negatif.

Semantik sebagai elemen kedua berisikan koherensi fungsional dan kondisional, serta praanggapan. Jumlah koherensi fungsional yang ditemukan adalah 32 data, dengan perincian, bentuk spesifikasi pada koran *Kompas* sejumlah 1 data dan pada *Media Indonesia* terdapat 2 data. Selanjutnya, pada bentuk kontras terdapat 12 data pada koran *Kompas* dan 11 data pada *Media Indonesia*. Pada bentuk aditif, *Kompas* memuat 2 data, sedangkan *Media Indonesia* memuat 1 data. Sebaliknya, pada bentuk penegasan, *Kompas* hanya menampilkan 1 data, sedangkan *Media Indonesia* menampilkan 2 data.

Kemudian, data koherensi kondisional berupa bentuk kausalitas dan bentuk temporal. Total koherensi kondisional yang ditemukan adalah 48 data, dengan perincian, bentuk kausalitas pada koran *Kompas* sebanyak 14 data, sedangkan pada *Media Indonesia* sebanyak 24 data. Kemudian pada bentuk temporal, *Kompas* memuat 2 data dan *Media Indonesia* memuat 8 data. Unsur semantik terakhir, praanggapan, ditemukan sebanyak 7 data, dengan perincian, 1 data pada koran *Kompas* dan 6 data dari *Media Indonesia*. Artinya, data koherensi kondisional dan praanggapan didominasi oleh *Media Indonesia*.

Pada elemen retorik, terdapat paralelisme, perbandingan, dan metafora. Paralelisme berjumlah 4 data, dengan perincian, 1 data pada koran *Kompas* dan 3 data pada *Media Indonesia*. Selanjutnya, untuk unsur perbandingan, hanya ditemukan 1 data dari teks editorial *Media Indonesia*. Terakhir, metafora pada koran *Kompas* dan *Media Indonesia* berjumlah 4 data, dengan perincian, 1 data

peribahasa dari koran *Kompas*, 1 data perumpamaan dari masing-masing koran sehingga jumlah data perumpamaan adalah 2 data, dan bentuk sindiran sebanyak 1 data dari *Media Indonesia*.

Berdasarkan pemetaan dalam tabel data, diketahui bahwa data struktur teks tersebut terakumulasi dari sejumlah data dari koran *Kompas* dan *Media Indonesia*. Jumlah data dengan frekuensi seimbang dari kedua koran terletak pada bentuk kalimat pasif, masing-masing sejumlah 5 data dan pada perumpamaan, masing-masing sejumlah 1 data. Selain itu, frekuensi kemunculan data struktur teks didominasi *Media Indonesia*, mulai dari bentuk kalimat aktif, kata ganti *kita*, leksikon positif dan negatif, spesifikasi dan penegasan pada koherensi fungsional, bentuk kausalitas dan temporal pada koherensi kondisional, praanggapan, paralelisme, dan perbandingan. Di sisi lain, *Kompas* mendominasi data pada kata ganti *mereka*, bentuk kontras dan aditif pada koherensi fungsional, serta peribahasa. Simpulannya, 175 data struktur teks yang termuat dalam teks editorial terdiri atas 68 data dari *Kompas* dan 107 data dari *Media Indonesia*.

II. Ideologi dalam Editorial *Kompas* dan *Media Indonesia*

Ideologi, sebagaimana pandangan van Dijk, merupakan kepercayaan fundamental suatu kelompok beserta para anggotanya. Kepercayaan tersebut tumbuh dan berkembang, kemudian disebarluaskan secara sosial oleh kelompok dengan tujuan tertentu. Salah satu kelompok yang mengusung ideologi bersama adalah media. Media sebagai kelompok pers dan kejournalistikan, memiliki akses preferensial, kuasa, dan kontrol atas wacana publik yang dianut. Ideologi media

dapat disisipkan pada produk wacana sebagai bentuk praktik diskursus. Salah satu wacana yang diproduksi oleh media adalah teks editorial.

Teks editorial merupakan produk wacana yang memuat pandangan media terhadap suatu hal. Penelitian ini, menganalisis ideologi koran *Kompas* dan *Media Indonesia* terkait dengan wacana normal baru dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Analisis ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana arah pandang media dan keberpihakannya atas wacana normal baru, didasarkan atas struktur ideologis dari bangun wacana editorial yang diciptakan. Rangkaian struktur ideologis tersebut adalah mikrostruktur wacana berupa: (1) bentuk kalimat; (2) kata ganti; (3) leksikon; (4) koherensi fungsional; (5) koherensi kondisional; (6) praanggapan; (7) paralelisme; (8) perbandingan; dan (9) metafora. Berikut merupakan hasil analisis dan pembahasan atasnya.

A. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat merupakan struktur ideologis yang berkaitan dengan pola sintaktik dari susunan kata dan bentuk aktif-pasif. Konsep ideologis yang termuat dalam bentuk kalimat, khususnya pada susunan kata, adalah topikalisasi atau *down-graded*. Urutan kanonis dalam bahasa Indonesia adalah subjek-predikat-objek yang disesuaikan dengan peran semantisnya. Bersambung dengan bentuk aktif-pasif, pada umumnya susunan kalimat yang sesuai standar berbentuk aktif. Di sisi lain, bentuk pasif berpeluang untuk menghilangkan subjek *agentive* dan terbentuk pasivasi atau nominalisasi, sehingga tidak sesuai dengan susunan

standar dan memunculkan strategi ideologis *down-graded*. Berikut adalah analisis dan pembahasan struktur ideologis data (176) dan (177) berupa bentuk kalimat.

(176) Wacana pelonggaran PSBB **mengemuka**, antara lain, karena pembatasan sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti. (6/K/03062020/P3/K1-2/Bentuk Kalimat)

(177) Pelonggaran aktivitas ekonomi **mulai dilakukan**. (37/K/10062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (176) dan (177) merupakan contoh struktur ideologis berupa bentuk kalimat dalam teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas*. Data (176) merupakan bentuk kalimat aktif, sedangkan data (177) adalah bentuk kalimat pasif. Data (176) tersusun atas fungsi subjek dan predikat. Bentuk kalimat pada data (176) merupakan kalimat aktif sebab terdapat verba aktif intransitif yang dihadirkan oleh redaktur, yaitu *mengemuka*. Walaupun bentuk kalimat pada data (176) berpola kalimat aktif, satuan lingual yang menempati fungsi subjek merupakan subjek *non-agentive*, bukan persona. Oleh karenanya, diketahui bahwa *Kompas* tidak menghadirkan persona atau pelaku di dalam kalimat aktif wacana editorial. Meskipun data (176) merupakan kalimat aktif, kealpaan subjek *agentive* di dalam kalimat pada data (176) memunculkan muatan ideologis pada data (176) menjadi *down-graded*.

Peniadaan persona dalam kalimat pada data (176) tersebut membuat pemaknaan atasnya, bahwa wacana pelonggaran PSBB terjadi secara spontan yang disertai dengan kontinuitas tanpa ada oknum sebagai pencetus dan penyebar wacana pelonggaran PSBB, sampai wacana tersebut menjadi “mengemuka” di kalangan masyarakat. Pada realitasnya, wacana pelonggaran PSBB menjadi

mengemuka karena adanya pencetus, yaitu pemerintah, dan penyebar, yaitu media pers. Wacana tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang di masyarakat apabila tidak disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pelesapan subjek *agentive* atau persona dalam kalimat berpengaruh terhadap pemaknaannya.

Sementara itu, data (177) yang berbentuk pasif juga tersusun atas fungsi sintaktik subjek dan predikat. Bentuk pasif yang diperlihatkan adalah satuan lingual berupa verba pasif intransitif, yaitu *mulai dilakukan*. Data (177) tersebut merupakan data bentuk kalimat yang memiliki kesamaan dengan data (176), yaitu tidak dicantumkannya subjek *agentive* oleh redaktur di dalam kalimat. Senada dengan data (176), data (177) tersebut tidak menghadirkan persona atau pelaku sebagai subjek di dalam kalimat.

Pasivasi yang dilakukan redaktur *Kompas* pada data (177) dimaknai bahwa terjadi pelesapan subjek *agentive* yang melakukan pelanggaran aktivitas ekonomi. Kalimat pada data (177) tersebut apabila ditinjau dari aspek kebahasaan dapat ditambahkan pelaku atau persona, tetapi ditempatkan sebagai fungsi sintaktik objek. Objek *agentive* pada akhirnya menunjukkan konsep ideologis *deemphasized* karena tidak ada penekanan atas subjek *agentive* sebagai pelaku di dalam kalimat.

Kealpaan subjek *agentive* di dalam data (176) dan (177) sebagai struktur ideologis bentuk kalimat tersebut menunjukkan konsep ideologis *down-graded* dan *deemphasized* yang dilakukan oleh redaktur *Kompas*. Hal tersebut dimaknai bahwa tendensi *Kompas* bukan terpusat pada persona atau pelaku, melainkan pada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan wacana normal baru dalam masa pandemi

Covid-19. Peristiwa yang ditampilkan adalah pelanggaran PSBB dan pelanggaran aktivitas ekonomi. Pemaknaan atas struktur ideologis teks editorial koran *Kompas* tersebut dapat dibandingkan dengan struktur ideologis bentuk kalimat pada teks editorial koran *Media Indonesia* sebagaimana data (178) dan data (179) beserta analisisnya berikut ini.

(178) PASAR **merespons** positif atas kebijakan transisi menuju kenormalan baru. (128/MI/05062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

(179) SETELAH diperpanjang tiga kali berturut-turut, masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta **kembali diperpanjang** untuk keempat kalinya. (144/MI/06062020/P1/K1/Bentuk Kalimat)

Data (178) dan (179) merupakan contoh struktur ideologis berupa bentuk kalimat dalam teks editorial tentang normal baru pada koran *Media Indonesia*. Data (178) merupakan bentuk kalimat aktif, sedangkan data (179) adalah bentuk kalimat pasif. Data (178) tersusun atas fungsi subjek-predikat-objek. Bentuk kalimat pada data (178) merupakan kalimat aktif, karena terdapat verba aktif transitif yang dihadirkan oleh redaktur, yaitu *merespons*. Walaupun bentuk kalimat pada data (178) berpola kalimat aktif, satuan lingual yang menempati fungsi subjek merupakan subjek *non-agentive*, bukan persona, sehingga diketahui bahwa *Media Indonesia* tidak menghadirkan persona atau pelaku di dalam kalimat aktif wacana editorial. Oleh karena itu, kealpaan subjek *agentive* di dalam kalimat pada data (178) memunculkan muatan ideologis yaitu *downgraded*.

Peniadaan persona dalam kalimat pada data (178) tersebut membuat pemaknaan atasnya, bahwa pasar modal sebagai moda transaksi untuk instrumen *commit to user*

keuangan jangka panjang, menunjukkan progres yang baik atas kebijakan transisi menuju normal baru tanpa memunculkan campur tangan orang sebagai pelaku. Redaktur *Media Indonesia* menggunakan kata *merespons* sebagai predikat untuk menggambarkan kondisi pasar yang merespons secara positif terkait penawaran, permintaan, dan pertukaran. Pada realitasnya, pasar sebagai instrumen keuangan dapat kembali berjalan di masa pandemi Covid-19 karena masuknya investor-investor yang kembali menginvestasikan modal di Indonesia. Namun, kalimat pada data (178) tersebut tidak memunculkan persona investor sebagai subjek *agentive*, melainkan memunculkan alasan lain di balik progres pasar, yaitu kebijakan terkait transisi menuju normal baru. Oleh karena itu, pelesapan yang dilakukan tersebut berpengaruh terhadap pemaknaan kalimat.

Di sisi lain, data (179) yang berbentuk pasif, tersusun atas fungsi sintaktik keterangan-subjek-predikat-keterangan. Bentuk pasif yang diperlihatkan adalah satuan lingual berupa verba pasif intransitif, yaitu *kembali diperpanjang*. Data (179) tersebut merupakan data bentuk kalimat yang memiliki kesamaan dengan data (178), yaitu tidak dicantumkannya subjek *agentive* oleh redaktur di dalam kalimat. Senada dengan data (178), data (179) tersebut tidak menghadirkan persona atau pelaku sebagai subjek di dalam kalimat.

Pasivasi yang dilakukan redaktur *Media Indonesia* pada data (179) dimaknai bahwa terjadi pelesapan subjek *agentive* yang melakukan perpanjangan atas masa PSBB di DKI Jakarta untuk keempat kalinya. Kalimat pada data (179) tersebut, apabila ditinjau dari aspek kebahasaan, dapat

ditambahkan pelaku atau persona, tetapi ditempatkan sebagai fungsi sintaktik objek. Objek *agentive* pada akhirnya menunjukkan konsep ideologis *deemphasized* karena tidak ada penekanan atas subjek *agentive* sebagai pelaku di dalam kalimat.

Kealpaan subjek *agentive* di dalam data (178) dan (179) sebagai struktur ideologis bentuk kalimat tersebut menunjukkan konsep ideologis *down-graded* dan *deemphasized* yang dilakukan oleh redaktur *Media Indonesia* sebagaimana redaktur *Kompas*. Hal tersebut dimaknai bahwa tendensi *Media Indonesia* tidak terpusat pada persona atau pelaku, melainkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dan memiliki keterkaitan dengan wacana normal baru dalam masa pandemi Covid-19. Peristiwa yang ditampilkan adalah progres pasar modal di masa transisi PSBB sebelum menuju kenormalan baru dan perpanjangan masa PSBB di DKI Jakarta.

Poin yang dapat ditarik atas analisis tersebut adalah adanya pola-pola tertentu yang digunakan oleh media dalam mengolah informasi ke dalam sebuah kalimat. Penggunaan kalimat aktif tanpa keberadaan subjek *agentive*, pada konteks tertentu dapat disetarakan dengan pasivasi yang juga menghilangkan subjek *agentive*. Pada analisis struktur ideologis bentuk kalimat, kecondongan antara *Kompas* dan *Media Indonesia* dengan tidak menampilkan persona atau pelaku di dalam kalimat adalah bentuk penurunan nilai (*down-graded*) dan melepaskan (*deemphasized*) atas persona. Kedua media tersebut tidak menonjolkan pelaku dan cenderung menyembunyikan pelaku dengan cara meniadakan subjek *agentive* dan membentuk pasivasi kalimat.

B. Kata ganti

Kata ganti adalah salah satu struktur ideologis yang berkenaan dengan *group-self schema*. Hal tersebut diartikan bahwa penggunaan kata ganti dalam suatu produk wacana mengarah pada pengelompokan-pengelompokan yang diciptakan oleh media dengan menunjukkan polarisasi *ingroup-outgroup*. Polarisasi *ingroup-outgroup* tercipta dengan pasangan kata ganti *Us vs Them* atau dapat dikontraskan *kita* dengan *mereka* dalam pronomina bahasa Indonesia. Polarisasi tersebut pada akhirnya akan membentuk perasaan subjektif sebagai bagian dari kelompok atau sebaliknya, yaitu memisahkan diri dari suatu kelompok. Berikut adalah analisis dan pembahasan struktur ideologis kata ganti yang termaktub pada data (180) dan (181).

- (180) Di sisi lain, angka penularan Covid-19 masih belum bisa sepenuhnya diredam. Setiap hari **kita** menyaksikan angka **mereka** yang terpapar infeksi terus meningkat, artinya bahaya penularan virus korona masih mengintai. (16/K/04062020/P3/K1-2/Kata Ganti)
- (181) Sebagai persiapan memasuki era kenormalan baru, **kita** menilai keputusan untuk menetapkan secara khusus periode PSBB transisi tersebut dapat diterima. Sebelum memasuki era kenormalan baru, masyarakat memang perlu melatih kebiasaan untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin agar saat beraktivitas dan berproduktivitas kembali, **mereka** tetap terlindung dari bahaya covid-19. (152/MI/06062020/P8/K1-2/Kata Ganti)

Data (180) merupakan struktur ideologis berupa kata ganti yang dimunculkan oleh redaktur *Kompas*. Sementara itu, data (181) merupakan data kata ganti yang dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia*. Data (180) dan (181) tersebut, masing-masing memuat kata ganti berupa pronomina persona pertama jamak inklusif dan pronomina ketiga jamak. Persona pertama jamak inklusif pada

data (180) adalah *kita* dan pronomina ketiga jamak *mereka*. Demikian pula pada data (181) yang memuat kedua kata ganti sebagaimana data (180).

Data (180) yang memuat kontras dengan menampilkan kata ganti *kita* dan *mereka* di dalam satu paragraf. Hal tersebut menunjukkan perbedaan antara dua hubungan imajinatif yang dibatasi hal-hal tertentu sehingga kedua kata ganti tersebut dimaknai secara berbeda. Kata ganti *kita* pada data (180) merupakan bentuk hubungan imajinatif yang diciptakan redaktur, merujuk pada *Kompas* dan khalayak pembaca. Penggambaran tersebut disandarkan pada batas pengelompokan, bahwa *kita* di dalam wacana editorial tersebut adalah orang yang tidak terpapar Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan kata *menyaksikan* sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh *kita*. Selain itu, terdapat pembuktian lain, yaitu keberadaan kata ganti *mereka* yang dihadirkan di dalam teks. Kata ganti *mereka* digambarkan sebagai orang yang terinfeksi Covid-19 oleh redaktur.

Pengelompokan-pengelompokan tersebut pada akhirnya menunjukkan konsep ideologis terkait dengan polarisasi *ingroup-outgroup*. Polarisasi yang dilakukan oleh *Kompas* ditunjukkan secara langsung melalui uraian kata ganti *kita* dan *mereka*. Tendensi *Kompas* adalah menyatukan diri dengan khalayak pembaca yang tidak terinfeksi Covid-19 (*ingroup*) dan memisahkan diri dari orang yang terpapar Covid-19 (*outgroup*). Pembentukan hubungan imajinatif tersebut berdampak pada perasaan subjektif yang tercipta agar khalayak pembaca merasa ditempatkan pada posisi yang sama dengan *Kompas*. Hal tersebut secara tidak

langsung ditujukan agar informasi implisit pada data (180) dapat dipahami oleh masyarakat, bahwa perlu berhati-hati dan waspada terhadap Covid-19.

Sementara itu, data (181) yang merupakan struktur ideologis kata ganti dari *Media Indonesia* juga memuat kontras berupa kata ganti *kita* dan *mereka* dalam satu paragraf. Kata ganti *kita* pada data (181) merupakan wujud hubungan imajinatif antara khalayak pembaca dengan redaktur yang dimunculkan oleh *Media Indonesia* yang merujuk pada bentuk kesetujuan atas kebijakan pelanggaran PSBB transisi sebelum menuju normal baru. Di sisi lain, penggunaan kata ganti *mereka* merujuk pada masyarakat sipil yang perlu menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masa PSBB transisi sebelum memasuki masa normal baru diterapkan.

Pengelompokan yang dilakukan oleh *Media Indonesia* menunjukkan konsep ideologis yang diusung adalah polarisasi *ingroup-outgroup*. *Media Indonesia* menyatukan diri dengan orang-orang yang menyetujui kebijakan pemerintah terkait PSBB transisi (*ingroup*) dan memisahkan diri dari masyarakat sipil yang terkena kebijakan pemerintah (*outgroup*). Redaktur menggunakan kata ganti *kita* agar seolah khalayak pembaca berada di posisi yang sama dengan *Media Indonesia* dalam menyikapi PSBB transisi.

Atas analisis tersebut, dapat diketahui bahwa *Kompas* bertendensi agar menyatukan diri dengan masyarakat dan menempatkan diri menjadi bagian dari kelompok masyarakat. Di sisi lain, *Media Indonesia* cenderung menempatkan diri berada dengan jajaran pembentuk kebijakan atau pemerintah. Perbedaan tendensi kedua media tersebut didasarkan atas tujuan dari setiap media untuk mendapat

dukungan dari kelompok sasaran masing-masing. Selain itu, terdapat beberapa data yang menunjukkan perbedaan tendensi antara *Kompas* dan *Media Indonesia* sebagaimana analisis yang ditunjukkan pada data (182) dan (183) berikut.

- (182) Secara keseluruhan, **kita** menggarisbawahi bahwa pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka hingga saat ini belum didukung oleh pijakan yang kuat. **Kita** berpandangan, yang bisa dilakukan adalah sekolah mempersiapkan segala fasilitas yang diperlukan untuk penegakan normal baru, termasuk protokol kesehatan yang akan diterapkan, dan pada sisi lain **kita** harus sabar menunggu angka penularan menurun hingga pada tingkat aman. Sekali lagi **kita** diingatkan agar menyangkut urusan penting, seperti pendidikan, jangan **kita** didikte oleh kemendesakan apa pun. (25/K/04062020/P10/K1-3/Kata Ganti)
- (183) Tatanan normal baru atau *new normal* ialah pilihan rasional. Ia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalani karena sampai detik ini belum diketahui kapan ekspansi covid-19 akan usai. **Kita** jelas tidak mungkin terus menunggu dalam ketidakpastian, sementara ekonomi harus kembali menggeliat demi menopang kehidupan rakyat. (99/MI/28052020/P2/K1-3/Kata Ganti)

Data (182) merupakan data yang memuat struktur ideologis kata ganti dari *Kompas*, sedangkan data (183) adalah data yang berasal dari *Media Indonesia*. Kedua data tersebut sama-sama memuat data kata ganti berupa persona pertama jamak inklusif, yaitu *kita*. Data (182) dan (183) memiliki kesamaan topik paragraf, yaitu penerapan normal baru. Menurut *Kompas*, penerapan normal baru tidak boleh sembarangan dan terburu-buru dilakukan, terlebih menyangkut urusan penting seperti pendidikan, bahkan jika terdapat perihal kemendesakan sekalipun. *Kompas* menekankan perihal keselamatan nyawa masyarakat. Sebaliknya, *Media Indonesia* menyatakan bahwa penerapan tatanan kehidupan normal baru merupakan sebuah opsi paling rasional yang harus dijalani untuk menyokong perekonomian rakyat. *commit to user*

Kontras yang tampak atas data (182) dan (183) menunjukkan dikotomi antara *Kompas* dan *Media Indonesia* dalam menyikapi normal baru. Namun, keduanya menunjukkan ide atas kontras tersebut dengan strategi yang sama, yaitu penggunaan kata ganti persona pertama jamak inklusif, *kita*. Penggunaan kata ganti *kita* digunakan untuk membentuk hubungan imajinatif antara redaktur dan khalayak pembacanya masing-masing. Hal tersebut menimbulkan perasaan kebersatuan media dengan publik sehingga dapat mendulang dukungan secara sukarela dan membuat khalayak pembaca mengiakan posisi yang sama dengan media.

Namun, atas kontras yang tercipta dari kedua data tersebut, dapat diketahui bahwa tendensi *Kompas* tidak mendukung dengan penuh wacana normal baru. Di sisi lain, *Media Indonesia* mendukung penuh, bahkan tergesa untuk menerapkan normal baru. Selain data (182) dan (183) yang menunjukkan kontras antara *Kompas* dan *Media Indonesia*, data (184) dan (185) berikut juga merupakan analisis struktur ideologis kata ganti yang menampilkan perbedaan perspektif antara kedua media tersebut.

- (184) Masyarakat harus diyakinkan dalam bahasa terang bahwa situasinya belum normal dan belum aman! Ketika pemerintah mengambil sikap beradaptasi dengan Covid-19, saatnya **kita** melindungi diri **kita** sendiri agar tidak tertular atau menulari orang lain. Kelompok paling berisiko tidak perlu ke luar rumah. Kalau terpaksa harus ke luar rumah, patuhilah protokol kesehatan. Disiplin menjadi kata kunci! (54/K/16062020/P8/K1-5/Kata Ganti)
- (185) Di era *new normal*, **kita** bisa tetap menjalankan aktivitas normal, tapi mesti membarenginya dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. Di sini, perubahan perilaku menjadi kunci. (101/MI/28052020/P3/K1-2/Kata Ganti)

Data (184) dan (185) juga merupakan struktur ideologis yang masing-masing dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia*. Keduanya memuat pronomina persona pertama jamak inklusif, *kita*, sebagaimana data-data sebelumnya. Konteks pada data (184) adalah telah dibukanya pelonggaran aktivitas ekonomi atau dapat disebut sebagai tatanan hidup normal baru. *Kompas* memaparkan bahwa pemerintah perlu mencanangkan antisipasi lonjakan kasus saat normal baru diterapkan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan cara menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa keadaan masih sama berbahayanya dengan sebelumnya.

Selain kritik bagi pemerintah, *Kompas* juga memaparkan bahwa masyarakat perlu melindungi diri agar tidak tertular atau menulari orang lain. Pada proposisi akhir, redaktur menyatakan bahwa disiplin merupakan kunci suksesnya penerapan normal baru. Penggunaan kata ganti *kita* pada data (184) tersebut digunakan sebagai pembentuk hubungan imajinatif agar khalayak pembaca dapat melindungi diri sendiri di masa normal baru. Selain itu, juga ditujukan untuk mengusung konsep ideologis agar pembaca memposisikan diri sebagaimana posisi media dan merasa menjadi bagian dari kelompok (*ingroup*).

Sementara itu, *Media Indonesia* menyatakan bahwa di masa normal baru, masyarakat perlu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sebagai pencegahan penularan Covid-19. Kata ganti *kita* pada data (185) tersebut merujuk pada masyarakat dan ditujukan agar masyarakat memahami tatanan hidup normal baru. Penggunaan kata ganti *kita* digunakan oleh *Media Indonesia* untuk membentuk polarisasi *ingroup* dengan masyarakat. Hal tersebut merupakan *commit to user*

bentuk hubungan imajinatif yang didesain agar menimbulkan kesan kebersatuan antara media dan khalayak pembaca.

Perbedaan antara data (184) dan (185) adalah tendensi antara kedua media yang membedakan kunci dari berhasil atau tidaknya penerapan tatanan kehidupan normal baru di masa pandemi. *Kompas* menyatakan bahwa kunci berhasilnya normal baru adalah kedisiplinan setiap orang. Di sisi lain, *Media Indonesia* menyatakan bahwa kunci keberhasilan normal baru adalah perubahan perilaku masyarakat. Kedua hal tersebut menunjukkan perbedaan perspektif antara *Kompas* dan *Media Indonesia*.

Selanjutnya, data yang menampilkan perbedaan antara *Kompas* dan *Media Indonesia* tampak pada data (186) dan (187). Berikut merupakan analisis data kata ganti dari data-data tersebut.

- (186) Pemicu peningkatan kasus mengerucut pada dua hal: masyarakat yang tidak disiplin dan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak tegas. **Kita** melihat, negara-negara yang berhasil menangani Covid-19 memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dan tegas menegakkan aturan. Sebutlah di antaranya Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. (60/K/23062020/P6/K1-3/Kata Ganti)
- (187) Kolaborasi manis antara negara dan masyarakat ini yang akan menjadi kunci sukses tahapan *new normal*. Ketika keseriusan, konsistensi, dan ketegasan pemerintah bertemu dengan kepatuhan dan kedisiplinan publik menjalankan protokol kesehatan, pada saat itulah **kita** bisa benar-benar merasakan sebuah kehidupan normal yang baru, bahkan ketika pandemi ini sudah berakhir. (175/MI/11062020/P14/K1-2/Kata Ganti)

Data (186) dan (187) merupakan contoh terakhir dari struktur ideologis kata ganti yang menunjukkan perbedaan pandangan antara *Kompas* dan *Media Indonesia* terkait dengan penerapan normal baru. Pada data (186), *Kompas*
Commit to user

menampilkan kata ganti berupa pronomina persona pertama jamak inklusif, yaitu *kita*. Senada dengan *Kompas*, redaktur *Media Indonesia* juga memunculkan kata ganti *kita* dalam data (187). Tujuan penggunaan kata ganti dari kedua media tersebut sama, yaitu membentuk hubungan imajinatif antara redaktur dan khalayak pembaca dari masing-masing media.

Kompas menghadirkan informasi terkait perihal-perihal yang menyebabkan lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Terdapat dua hal pokok yang menjadi sorotan *Kompas*, yaitu masyarakat yang tidak disiplin dan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak tegas. Hal tersebut merupakan bentuk kritikan tajam *Kompas* terhadap kedua pihak antara masyarakat sipil dan Pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan tanggung jawab masing-masing. Kemudian *Kompas* memunculkan kata ganti *kita* agar memposisikan khalayak pembaca agar sepadan dengan pandangan *Kompas*.

Pandangan yang diarahkan oleh *Kompas* adalah keterkaitan antara keberhasilan beberapa negara dalam menangani Covid-19 dan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Namun, melihat kegagalan penanganan Covid-19 di era normal baru, membuat *Kompas* meyakini bahwa wacana normal baru memang belum selayaknya diterapkan saat lonjakan kasus semakin besar. Selain itu, tingkat kedisiplinan dan ketidaktegasan pemerintah tidak dapat menjadi penghambat penularan infeksi Covid-19, melainkan menambah potensi grafik penularan.

Di sisi lain, *Media Indonesia* menyajikan informasi terkait dengan perihal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar normal baru berjalan lancar. Hal-hal tersebut di antaranya adalah keseriusan, konsistensi, dan ketegasan pemerintah.

Selain itu, *Media Indonesia* memunculkan kata ganti *kita* di dalam proposisi yang mengarahkan khalayak pembaca agar patuh dan disiplin terhadap kebijakan pemerintah terkait normal baru. Meskipun substansi tersebut hampir sama dengan yang disampaikan *Kompas*, akan tetapi pola penyampaian yang berbeda akan menunjukkan pandangan dan tendensi yang berbeda juga.

Berdasarkan penyampaian pada data (186) dan (187), diketahui bahwa *Kompas* dan *Media Indonesia* memiliki perspektif yang berbeda. *Kompas* cenderung meragukan normal baru sebab penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan kedisiplinan masyarakat yang rendah. Di sisi lain, *Media Indonesia* cenderung mendukung normal baru dengan memberikan arahan yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghadapi pandemi Covid-19. Apabila ditinjau dari data-data sebelumnya, perbedaan antara *Kompas* dan *Media Indonesia* tidak terlalu signifikan sebab substansi yang hampir sama. Namun, setelah dianalisis, tampak bahwa terdapat kontras antara *Kompas* dan *Media Indonesia*.

C. Leksikon

Leksikon merupakan bagian dari *stylistic-style* yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari struktur ideologis bangun wacana. Leksikon dijadikan sebagai bentuk ekspresi terhadap suatu hal oleh media. Pengekspresian tersebut dimunculkan dalam bentuk leksikon yang memiliki dua kemungkinan, yaitu bernilai rasa positif dan bernilai rasa negatif. Pemunculan leksikon tersebut pada umumnya mengacu pada konteks, posisi, peranan, dan tujuan dari media terkait

hal yang disampaikan dalam wacana. Penggunaan leksikon dengan nilai rasa positif-negatif akan menunjukkan polarisasi dan kecondongan media. Berikut merupakan analisis dan pembahasan data (188) yang memuat struktur ideologis leksikon.

(188) Indonesia mengambil putusan politik berisiko, dengan melonggarkan kegiatan ekonomi di tengah pandemi, dengan diksi berbeda-beda. Ada yang menyebut “transisi”, ada yang mengatakan “normal baru”. Frase “**normal baru**” yang diperkenalkan pemerintah bisa disalahpersepsikan. Publik bisa salah membaca seakan kondisinya sudah benar-benar normal. Kenyataannya, ancaman penularan Covid-19 masih nyata. Kurva penularan secara nasional belum terlihat melandai. (40/K/10062020/P4/K1-6/Leksikon)

Data (188) merupakan contoh struktur ideologis berupa leksikon dalam teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas*. Leksikon pada data (188) tersebut adalah satuan lingual berupa frasa *normal baru*. Frasa *normal baru* merujuk pada suatu kehidupan normal yang baru, yang dilaksanakan sebagai gaya hidup alternatif di masa pandemi Covid-19 dan mengutamakan asas keselamatan diri. Frasa tersebut menjadi struktur ideologis leksikon dengan nilai rasa negatif.

Redaktur *Kompas* memunculkan frasa tersebut di dalam paragraf dengan penggambaran negatif normal baru sebagai suatu tindakan yang menimbulkan mispersepsi di antara masyarakat, bahwa kehidupan di masa pandemi sudah kembali normal sebagaimana biasanya. Bahkan, *Kompas* menyatakan bahwa keputusan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan terkait normal baru merupakan sebuah putusan politik berisiko. Konteks risiko pada hal tersebut adalah keamanan dan keselamatan masyarakat. Faktanya, normal baru yang diwacanakan oleh pemerintah merupakan suatu tindakan penyelamatan ekonomi.

Nilai rasa dalam struktur ideologis leksikon pada data (188), merupakan bentuk representasi ekspresi *Kompas* atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yaitu menggaungnya wacana penerapan normal baru di Indonesia. Oleh karena nilai rasa yang dimunculkan pada leksikon tersebut adalah nilai rasa negatif, maka dapat diketahui bahwa *Kompas* andil dalam polarisasi *ingroup-outgroup*. *Kompas* cenderung menolak adanya normal baru yang diterapkan secara tergesa di tengah pandemi saat kurva penularan sedang naik. Atas hal tersebut, dapat ditarik ikhtisar bahwa *Kompas* melakukan polarisasi *outgroup* dengan Pemerintah Indonesia terkait wacana normal baru.

Analisis struktur ideologis leksikon pada koran *Kompas* tersebut dapat dibandingkan dengan struktur ideologis dari *Media Indonesia* sebagaimana data (189) berikut.

- (189) Penerapan tatanan normal baru **pantang gampang**. Sejumlah kriteria ketat yang telah ditetapkan mutlak dipatuhi tanpa ada kompromi. Tiga indikator utama untuk menilai kesiapan daerah, yaitu gambaran epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatannya, harus dijadikan dasar yang tak bisa ditawar-tawar. (106/MI/28052020/P5/K1-3/Leksikon)

Data (189) merupakan contoh struktur ideologis berupa leksikon dalam teks editorial tentang normal baru pada koran *Media Indonesia*. Leksikon pada data (189) tersebut adalah satuan lingual berupa frasa *pantang gampang*. Frasa *pantang gampang* merujuk pada suatu hal yang perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Konteks *pantang gampang* tersebut dikaitkan dengan normal baru, yaitu kehidupan normal yang baru, yang dilaksanakan

sebagai gaya hidup alternatif di masa pandemi Covid-19. Frasa tersebut, pada data (189) menjadi struktur ideologis leksikon dengan nilai rasa positif.

Redaktur *Media Indonesia* memunculkan frasa tersebut di dalam paragraf dengan penggambaran positif mengenai bagaimana perlunya kehati-hatian dalam menjalankan normal baru secara meluas di masyarakat. Bahkan, *Media Indonesia* menyatakan bahwa keputusan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan terkait normal baru harus diikuti dengan indikator penilaian kesiapan setiap daerah terkait dengan normal baru. Beberapa hal yang perlu dipenuhi adalah gambaran epidemiologi setiap daerah, lalu surveilans atau pengamatan atas kesehatan masyarakat, dan yang paling utama adalah sistem pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Ketiga hal tersebut menjadi kriteria yang harus dipenuhi sebelum mencapai tatanan hidup normal baru yang tidak mudah dilakukan.

Nilai rasa dalam struktur ideologis leksikon pada data (189), merupakan bentuk representasi ekspresi *Media Indonesia* atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yaitu menggaungnya wacana penerapan normal baru di Indonesia. Oleh karena nilai rasa yang dimunculkan pada leksikon tersebut adalah nilai rasa positif, dapat diketahui bahwa *Media Indonesia* andil dalam polarisasi *ingroup-outgroup*. Berbeda dengan *Kompas*, *Media Indonesia* cenderung mendukung adanya normal baru, dengan memunculkan beberapa kriteria untuk memenuhi rencana normal baru atau dapat dikatakan sebagai sebuah syarat mutlak. Atas hal tersebut, dapat ditarik ikhtisar bahwa *Media Indonesia* melakukan polarisasi *ingroup* dengan Pemerintah Indonesia terkait wacana normal baru.

D. Koherensi Fungsional

Struktur ideologis yang berkaitan dengan makna adalah koherensi. Terdapat dua jenis koherensi, yaitu fungsional dan kondisional. Koherensi fungsional didasarkan atas proposisi yang terbentuk sebagai bangun kalimat. Koherensi fungsional dapat berupa bentuk generalisasi, spesifikasi, kontras, aditif, dan penegasan. Oleh karena itu, koherensi fungsional memegang peranan penting dalam pembentukan ideologi baik dengan penggambaran positif-negatif maupun polarisasi yang dikelola oleh media dengan cara melegitimasi suatu pernyataan melalui strategi-strategi tersebut. Berikut merupakan analisis dan pembahasan data (190) dan (191) yang memuat struktur ideologis koherensi fungsional.

- (190) Pembangunan rumah murah dan sederhana akan membantu memberikan tempat tinggal bagi pekerja **yang tinggal berjubel di rumah kontrak yang tidak memenuhi standar kesehatan**. Industri farmasi, termasuk berbahan herbal di daerah, perlu diberi perhatian untuk membuat rakyat sehat. (11/K/03062020/P10/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (191) SALAH satu penentu sukses atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan ialah seberapa besar partisipasi masyarakat. Pun demikian dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru di tengah pandemi covid-19 **yang masih menyandera bangsa ini**. (97/MI/28052020/P1/K1-2/Koherensi Fungsional)

Data (190) dan data (191) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi fungsional. Data (190) merupakan data yang berasal dari koran *Kompas*, sedangkan data (191) merupakan data dari koran *Media Indonesia*. Jenis koherensi fungsional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk spesifikasi. Spesifikasi diwujudkan dengan perincian atas suatu hal pada proposisi di dalam paragraf yang ditandai dengan kehadiran satuan lingual *yang*.

Kompas menghadirkan spesifikasi pada data (190) sebagai bentuk perincian atas kata *pekerja*, yaitu yang tinggal berjubel di rumah kontrak yang tidak memenuhi standar kesehatan. Paragraf pada data (190) memuat informasi terkait wacana pembangunan rumah murah bagi para pekerja tertentu sesuai dengan spesifikasi yang dijabarkan, yaitu tinggal di rumah kontrak. Kemudian dispesifikkan kembali khusus rumah kontrak yang tidak memenuhi standar kesehatan. Tujuan pembuatan rumah murah tersebut agar masyarakat memiliki papan yang laik sesuai standar kesehatan untuk hidup.

Konsep ideologis yang terkandung pada data (190) adalah adanya *positive self-representation* yang mencerminkan gagasan *Kompas* terkait dengan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi PSBB dan masa-masa menuju normal baru. Penggambaran positif tersebut menimbulkan sebuah formulasi yang baik di mata masyarakat atas citra diri *Kompas* beserta gagasannya yang apik dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi di masa PSBB dan di sisi lain dengan pertimbangan kesehatan yang perlu diperhatikan. Selain mencerminkan konsep ideologis *positive self-representation*, *Kompas* juga secara implisit menampilkan *negative self-representation* atas Pemerintah Indonesia. Penggambaran negatif yang terimplikasi di dalam data (190) adalah ketidakcekan pemerintah dalam merencanakan PSBB secara terstruktur dalam segi ekonomi maupun kesehatan secara sekaligus. Hal tersebut secara tidak langsung ditujukan *Kompas* kepada Pemerintah Indonesia.

Bentuk spesifikasi lain dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* sebagaimana data (191). Perincian yang ditampilkan pada data tersebut

merupakan spesifikasi atas frasa *pandemi Covid-19*, yaitu yang masih *menyandera bangsa ini*. Paragraf pada data (191) memuat informasi terkait pengimplementasian kebijakan normal baru oleh Pemerintah Indonesia pada masa pandemi Covid-19 yang masih mengekang negara Indonesia dengan penularan yang terus terjadi setiap harinya. Secara tidak langsung, *Media Indonesia* menggiring khalayak pembaca agar patuh terhadap kebijakan pemerintah.

Konsep ideologis yang ditampilkan *Media Indonesia* pada data (191) adalah *positive self-representation* atas Pemerintah Indonesia yang membuat kebijakan normal baru. Hal tersebut didukung proposisi pertama yaitu, *salah satu penentu sukses tidaknya implementasi sebuah kebijakan ialah seberapa besar partisipasi masyarakat*. Berbeda dengan *Kompas* yang menggambarkan Pemerintah Indonesia secara negatif, *Media Indonesia* menempatkan masyarakat sebagai objek yang dikenai *negative self-representation* yang mengimplikasikan bahwa masyarakat sulit mematuhi pemerintah dan menerapkan kebijakan yang dibuat.

Analisis data (190) dan (191) yang dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia* tersebut menghasilkan pokok yang perlu diketahui bahwa tendensi antara kedua media tersebut saling bertentangan. *Kompas* cenderung menggambarkan dirinya dengan penggambaran positif, sedangkan menggambarkan pemerintah dengan cerminan negatif. Di sisi lain, *Media Indonesia* menggambarkan pemerintah dengan positif dan penggambaran negatif ditujukan pada masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya menunjukkan polarisasi bahwa *Kompas* tidak berpihak pada pemerintah, sedangkan *Media Indonesia*

menunjukkan keberpihakan pada pemerintah. Perbedaan lain antara kedua media tersebut ditemukan pada data (192) dan (193) berupa struktur ideologis koherensi fungsional sebagaimana analisis berikut.

- (192) Sebagaimana disampaikan pakar epidemiologi, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar normal baru bisa diterapkan dengan aman dan sukses. Ada tuntutan kemendesakan, **tetapi** hal ini tidak boleh dengan mengompromikan keamanan kesehatan. (23/K/04062020/P9/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (193) Di era *new normal*, kita bisa tetap menjalankan aktivitas normal, **tapi** mesti membarenginya dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. Di sini, perubahan perilaku menjadi kunci. (102/MI/28052020/P3/K1-2/Koherensi Fungsional)

Data (192) dan data (193) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi fungsional dari koran *Kompas* dan *Media Indonesia*. Jenis koherensi fungsional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk kontras. Kontras diwujudkan pada proposisi di dalam paragraf yang ditandai dengan kehadiran satuan lingual *tetapi* dan *tapi*. Data (192) memuat pengontrasan antara kemendesakan terkait pelanggaran aktivitas pendidikan juga sektor lain di tengah pandemi dan prioritas utama pada keamanan, keselamatan, serta kesehatan masyarakat. Di samping itu, data (193) memuat pengontrasan antara aktivitas normal dan penerapan protokol kesehatan yang perlu diterapkan di masa pandemi Covid-19.

Konsep ideologis yang ditampilkan *Kompas* pada data (192) adalah bentuk *positive self-representation*. Hal tersebut dibuktikan bahwa *Kompas* menghadirkan frasa *pakar epidemiologi* sebagai tokoh untuk mendukung dan melegitimasi opininya. Dapat diartikan bahwa *Kompas* menjadikan pakar *commit to user*

epidemiologi sebagai patokan kemudian menjadi bentuk polarisasi atas wacana normal baru. Oleh karena itu, *Kompas* berani menunjukkan kontrasnya dengan *negative self-representation* atas bentuk-bentuk kemendesakan normal baru oleh pemerintah yang tidak seharusnya didahulukan di atas keamanan dan keselamatan rakyat. Data (192) merepresentasikan kecenderungan *Kompas* dalam menyatakan ketidaksiapan normal baru dan ketidaksetujuannya terhadap pemerintah secara tidak langsung dan literal.

Sementara itu, konsep ideologis pada data (193) oleh redaktur *Media Indonesia* menunjukkan *positive self-representation* atas wacana normal baru yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Pengontraskan yang ditampilkan pada data (193) menunjukkan kecenderungan *Media Indonesia* dalam menyatakan dukungan atas wacana normal baru, yang juga mensyaratkan adanya pematuhan protokol kesehatan untuk menghindari penularan. Data (193) dimaknai sebagai representasi atas pandangan *Media Indonesia* dalam menyatakan kesetujuan terhadap wacana normal baru oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan kontras antara *Kompas* dan *Media Indonesia*. Data (194) dan (195) berikut menunjukkan kontras yang lain antara kedua media tersebut.

- (194) Perilaku masyarakat yang “sembarangan” bertemu dengan kebijakan pemerintah yang membingungkan dan kurang tegas. Harus diakui, penyangkalan pemerintah terhadap risiko di awal-awal, sekarang telah membawa dampak peningkatan kasus yang memprihatinkan. **Akan tetapi**, tidak ada gunanya menyesali yang sudah terjadi. Maka, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar penularan tidak semakin meluas? (32/K/09062020/P6/K1-4/Koherensi Fungsional)
- (195) Syaratnya berat. Tahapannya pun mesti ketat. Kehidupan *new normal* menuntut kemampuan adaptasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang mengacu pada protokol kesehatan. **Namun**, di lain sisi, *new normal* juga membutuhkan

aturan berikut penegakan aturan yang lebih jelas, lebih tegas. (167/MI/11062020/P8/K1-4/Koherensi Fungsional)

Data (194) dan data (195) adalah data dari koran *Kompas* dan *Media Indonesia* yang memuat struktur ideologis berupa koherensi fungsional berbentuk kontras. Kontras diwujudkan pada proposisi di dalam paragraf yang ditandai dengan kehadiran satuan lingual *akan tetapi* dan *namun*. Data (194) memuat pengontrasan antara hasil dari perangai masyarakat yang tidak disiplin ditambah kebijakan pemerintah yang tidak jelas dan penyesalan atasnya. Di samping itu, data (195) memuat pengontrasan antara bentuk adaptasi ditambah kepatuhan masyarakat dan penegakan aturan mengenai normal baru di masa pandemi Covid-19.

Konsep ideologis yang ditampilkan *Kompas* pada data (194) adalah bentuk *negative self-representation*. Representasi negatif tersebut ditujukan pada masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut dibuktikan pada proposisi pertama dan kedua yang didukung dengan satuan lingual *sembarangan* untuk mengilustrasikan perilaku masyarakat dan *kurang tegas* untuk mengilustrasikan kebijakan pemerintah. Pengontrasan *Kompas* dilakukan dengan menjelaskan tidak perlu adanya penyesalan atas lonjakan kasus yang terjadi akibat dua hal tersebut. Meskipun menyatakan bentuk kepasrahan atas peningkatan kasus infeksi Covid-19, representasi negatif pada data (194) menunjukkan tendensi *Kompas* dalam menyatakan bentuk ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi normal baru dan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara itu, konsep ideologis pada data (195) oleh redaktur *Media Indonesia* menunjukkan *negative self-representation* atas sulitnya masyarakat Indonesia menerapkan kebiasaan baru dan beradaptasi di masa normal baru, bahkan dengan aturan yang ketat sekalipun. Pengontrasan yang ditampilkan pada data (195) menunjukkan kecenderungan *Media Indonesia* dalam mendukung pemerintah untuk membuat aturan lain yang lebih jelas dan tegas demi menyokong kebijakan yang sudah digagas sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tendensi antara *Kompas* dan *Media Indonesia* berbeda. *Kompas* menggambarkan masyarakat dan pemerintah secara negatif, sedangkan *Media Indonesia* hanya menggambarkan secara negatif atas masyarakat, selebihnya merupakan kesetujuan atas pemerintah beserta kebijakannya.

Selain data di atas, data (196) dan (197) berikut merupakan data yang menunjukkan perbedaan antara *Kompas* dan *Media Indonesia*. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis berikut.

- (196) Pelonggaran aktivitas ekonomi mulai dilakukan. **Namun**, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap ancaman infeksi Covid-19. (38/K/10062020/P1/K1-2/Koherensi Fungsional)
- (197) Penanganan dan pengendalian virus korona terus dimaksimalkan, **tetapi** di sisi lain, aktivitas ekonomi juga sudah saatnya diberi ruang untuk bergerak. Semestinya memang tidak ada dikotomi antara persoalan kesehatan dan ekonomi, mana di antara keduanya yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh para pembuat kebijakan. (162/MI/11062020/P2/K1-2/Koherensi Fungsional)

Data (196) dan data (197) adalah data dari koran *Kompas* dan *Media Indonesia* yang memuat struktur ideologis berupa koherensi fungsional berbentuk kontras. Kontras diwujudkan pada proposisi di dalam paragraf yang ditandai

dengan kehadiran satuan lingual *namun* dan *tetapi*. Data (196) memuat pengontraskan antara pelanggaran aktivitas ekonomi dan kelalaian atas ancaman Covid-19. Di samping itu, data (197) memuat pengontraskan penanganan Covid-19 dan pelanggaran ekonomi yang perlu diberi ruang di masa pandemi Covid-19.

Konsep ideologis yang ditampilkan *Kompas* pada data (196) adalah bentuk *negative self-representation*. Representasi negatif tersebut ditujukan pada pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan pada proposisi kedua, yang didukung dengan satuan lingual *lengah* untuk mengilustrasikan bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia sempat lalai dalam menghadapi Covid-19 sebelum pelanggaran aktivitas ekonomi diterapkan. Pengontraskan *Kompas* dilakukan dengan menjelaskan pelanggaran tersebut tidak seharusnya membuat pemerintah dan masyarakat kurang berhati-hati sebab semakin banyak orang yang kembali beraktivitas di tengah pandemi. Meskipun memunculkannya dalam bentuk saran, representasi negatif pada data (196) menunjukkan tendensi *Kompas* yang menuntut ketegasan dan kedisiplinan pemerintah serta masyarakat.

Sementara itu, konsep ideologis pada data (197) oleh redaktur *Media Indonesia*, menunjukkan *positive self-representation* yang mencerminkan gagasan *Media Indonesia* terkait dengan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyetarakan kepentingan kesehatan dan ekonomi. Penggambaran positif tersebut menimbulkan sebuah formulasi yang baik di mata masyarakat atas citra diri *Media Indonesia* beserta gagasannya yang apik dalam menanggapi aspek kesehatan dan perekonomian yang perlu diselesaikan secara bersamaan. Pengontraskan yang ditampilkan pada data (197) menunjukkan

kecenderungan *Media Indonesia* dalam mendukung pelonggaran ekonomi di samping penanganan pandemi.

Koherensi fungsional yang ditemukan dalam editorial *Kompas* dan *Media Indonesia*, khususnya pada data (198) dan (199) berikut memuat perbedaan antara kedua media. Hal tersebut ditunjukkan pada analisis data berikut.

- (198) Karakteristik masyarakat Indonesia memang khas menghadapi bencana. Tatkala tsunami Aceh melanda 2004, misalnya, rakyat lebih mudah menerima kondisi karena menganggap itu bagian dari takdir. Mereka bisa cepat bangkit. **Namun**, di sisi lain, orang jadi tidak belajar dari bencana. (62/K/23062020/P7/K1-4/Koherensi Fungsional)
- (199) Survei itu menyebut masyarakat memang masih khawatir tertular covid-19. **Akan tetapi**, jauh lebih banyak yang merasa takut tidak dapat bekerja dan tidak menerima penghasilan alias takut kelaparan. (163/MI/11062020/P4/K1-2/Koherensi Fungsional)

Data (198) dan data (199) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi fungsional berbentuk kontras. Kontras diwujudkan pada proposisi di dalam paragraf yang ditandai dengan kehadiran satuan lingual *namun* dan *akan tetapi*. Data (198) memuat pengontraskan tipikal masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana dengan masyarakat yang tidak mengambil pembelajaran atas bencana yang terjadi. Di samping itu, data (199) memuat pengontraskan antara masyarakat yang khawatir terinfeksi Covid-19 dan masyarakat yang khawatir apabila tidak bekerja dan mendapat penghasilan.

Konsep ideologis yang ditampilkan *Kompas* pada data (198) adalah bentuk *negative self-representation*. Representasi negatif tersebut ditujukan pada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan pada proposisi pertama, yang didukung dengan satuan lingual *khas* untuk mengilustrasikan bahwa masyarakat Indonesia

memiliki karakteristik yang lain dibanding masyarakat luar terkait menanggapi bentuk-bentuk bencana. Pengontrasan *Kompas* dilakukan dengan menjelaskan dikotomi masyarakat Indonesia yang mudah menerima bencana sebagai takdir, tetapi tidak dapat belajar atas bencana yang terjadi sebagai bekal menghadapi bencana lain di waktu setelahnya. *Kompas* menampilkan representasi negatif atas masyarakat terkait dengan kebencanaan.

Demikian pula, konsep ideologis pada data (199) oleh redaktur *Media Indonesia* menunjukkan *negative self-representation* yang juga ditujukan pada masyarakat terkait ketakutan masyarakat terinfeksi virus dan keinginan memenuhi kebutuhan harian. Pengontrasan yang ditampilkan pada data (198) dan (199) menunjukkan kecenderungan *Kompas* dan *Media Indonesia* dalam menyokong gagasan dan opininya sendiri dan menyudutkan perilaku masyarakat Indonesia yang memunculkan oposisi atas perilakunya sendiri. Meskipun jenis dan pola pengontrasan sama, bobot representasi negatif antara keduanya berbeda. *Kompas* menunjukkan hal yang saling berkebalikan, sedangkan *Media Indonesia* lebih menonjolkan pada hal-hal berlainan yang berjalan beriringan.

Selanjutnya masih merupakan struktur ideologis koherensi fungsional yang menunjukkan kontras antara data (200) dan data (201). Berikut merupakan analisis dan pembahasan atasnya.

- (200) Politik identitas yang marak belakangan menambah ruwet persoalan. Banyak yang merasa benar sendiri sehingga muncullah perilaku mencuri jenazah, mengusir petugas kesehatan di lingkungannya, **bahkan** menolak tes massal. Padahal, kita tahu, hanya dengan surveilans, tes massal, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat, kita bisa menekan angka penularan dan selamat dari Covid-19. (64/K/23062020/P8/KI-3/Koherensi Fungsional)

(201) Pada poin itulah sesungguhnya tantangan *new normal*. Menyinkronkan antara penanganan virus yang hingga hari ini masih berkeliaran --**bahkan** kurva penyebaran covid-19 secara nasional belum menunjukkan tren turun-- dan upaya menggerakkan roda ekonomi setelah tiga bulan masa pandemi nyaris berhenti, jelas bukan pekerjaan mudah. (166/MI/11062020/P7/K1-2/Koherensi Fungsional)

Data (200) dan data (201) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi fungsional dari koran *Kompas* dan *Media Indonesia*. Jenis koherensi fungsional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk penegasan. Penegasan diwujudkan pada proposisi di dalam paragraf yang ditandai dengan kehadiran satuan lingual *bahkan*. Data (200) memuat penegasan atas munculnya politik identitas yang menyebabkan perilaku-perilaku yang tidak bertolak dari perikemanusiaan. Di samping itu, data (201) memuat penegasan terkait sinkronisasi antara penanganan penyebaran Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi.

Konsep ideologis yang ditampilkan *Kompas* pada data (200) adalah bentuk *negative self-representation*. Representasi negatif tersebut ditujukan pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut dibuktikan pada proposisi kedua yang mengilustrasikan bahwa masyarakat Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan di masa pandemi Covid-19. Penegasan *Kompas* dilakukan dengan menjelaskan betapa buruknya perangai masyarakat yang menjadi sebab naiknya kasus penularan Covid-19. Hal tersebut secara tidak langsung ditampilkan *Kompas* pada proposisi terakhir mengenai cara-cara dan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan baik oleh masyarakat untuk menekan penularan dan melandaikan kurva kasus Covid-19.

Sementara itu, konsep ideologis pada data (201) oleh redaktur *Media Indonesia*, menunjukkan *positive self-representation* atas sulitnya Pemerintah Indonesia menghadapi segala tantangan di masa normal baru. Penegasan yang ditampilkan pada data (201) menunjukkan kecenderungan *Media Indonesia* dalam mendukung pemerintah untuk bersegera menjalankan roda perekonomian Indonesia yang sebelumnya terhadang pandemi selama tiga bulan. Hal tersebut dibuktikan dengan proposisi terakhir, khususnya pada klausa *jelas bukan pekerjaan mudah* yang menunjukkan bahwa *Media Indonesia* membuat pembelaan atas ketidaksiapan Pemerintah Indonesia membuka ekonomi di tengah pandemi. Hal tersebut juga membuktikan bahwa tendensi antara *Kompas* dan *Media Indonesia* berbeda. *Kompas* menggambarkan masyarakat secara negatif, sedangkan *Media Indonesia* menggambarkan secara positif setiap tindakan dari pemerintah.

Perbedaan antara *Kompas* dan *Media Indonesia* dalam menanggapi wacana normal baru yang diketahui dari analisis struktur ideologis koherensi fungsional menunjukkan bahwa kedua media tersebut memiliki tendensi yang berbeda dalam menunjukkan dukungan atau tidaknya pada suatu kelompok dan/atau pandangan kelompok yang merepresentasikan citra diri. Atas analisis tersebut, secara general dapat disimpulkan bahwa *Kompas* cenderung menunjukkan ketidaksetujuan wacana normal baru sebab ketidaksiapan masyarakat dan pemerintah, khususnya pada aspek kesehatan. Di sisi lain, *Media Indonesia* menunjukkan dukungan pada pemerintah, terutama mengenai tujuan normal baru yang mengarah pada perbaikan ekonomi negara Indonesia.

E. Koherensi Kondisional

Koherensi kondisional sebagai salah satu struktur ideologis yang berkaitan dengan makna, merupakan jenis koherensi lokal yang menautkan fakta-fakta dengan membentuk hubungan atasnya. Hubungan antarfakta tersebut dapat dilakukan dengan strategi kondisional berupa bentuk kausalitas atau bentuk temporal. Koherensi kondisional mewujudkan bentuk ideologi yang terkontrol sebab fakta-fakta yang dihubungkan menjadi koheren secara lokal. Oleh karena itu, penggunaan koherensi kondisional dapat mengakibatkan adanya kebiasaan dalam wacana. Data (202) dan (203) berikut menunjukkan koherensi kondisional dalam *Kompas* dan *Media Indonesia*. Berikut adalah analisis dan pembahasan dua data struktur ideologis koherensi kondisional.

- (202) Wacana normal baru mengemuka **setelah sekitar tiga bulan** dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Kesehatan harus menjadi pertimbangan utama. (2/K/03062020/P1/K1-2/Koherensi Kondisional)
- (203) **SETELAH diperpanjang tiga kali berturut-turut**, masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta kembali diperpanjang untuk keempat kalinya. (145/MI/06062020/P1/K1/Koherensi Kondisional)

Data (202) dan data (203) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi kondisional. Data (202) merupakan data yang berasal dari *Kompas*, sedangkan data (203) merupakan data dari *Media Indonesia*. Jenis koherensi kondisional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk temporal. Bentuk temporal tersebut menunjukkan keterangan waktu suatu peristiwa yang berhubungan dengan pandemi Covid-19, yaitu pembatasan sosial berskala besar.

Kompas menghadirkan bentuk temporal pada data (202) sebagai penanda waktu mengemukakan wacana normal baru. Paragraf pada data (202) memuat informasi terkait wacana normal baru oleh Pemerintah Indonesia yang terjadi tiga bulan setelah pemberlakuan PSBB. Selain itu, informasi lain yang tampak di dalamnya adalah penekanan atas aspek kesehatan yang harus menjadi pertimbangan utama sebelum diterapkannya tatanan kehidupan normal baru.

Konsep ideologis yang terkandung pada data (202) adalah adanya pertautan antarfakta terkait wacana normal baru yang merupakan tujuan akhir dari penerapan PSBB. Hal tersebut ditampilkan redaktur *Kompas* pada proposisi pertama dalam data (202). Hubungan yang terbentuk atasnya adalah penerapan PSBB yang telah terlaksana selama tiga bulan menghadirkan hubungan temporal antara PSBB dan wacana normal baru sebagai bentuk kontinuitas yang berkaitan satu sama lain. Poin tersebut diinterpretasikan *Kompas* sebagai kurun waktu yang tidak cukup bagi masyarakat Indonesia untuk membatasi aktivitas sosial, baik pada sektor pendidikan, ekonomi, bahkan politik pemerintahan. Interpretasi tersebut dibentuk oleh *Kompas* atas adanya pemunculan proposisi kedua terkait kesehatan sebagai sesuatu yang perlu diutamakan di atas berbagai hal. Secara implisit, *Kompas* menyisipkan konsep ideologis bahwa aspek kesehatan belum menjadi perhatian utama pemerintah, bahkan setelah wacana normal baru hadir di tengah masyarakat.

Bentuk temporal lain dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* sebagaimana tampak pada data (203). Perincian yang ditampilkan pada data tersebut merupakan penanda waktu atas peristiwa perpanjangan masa PSBB yang

dilakukan keempat kalinya oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Konsep ideologis yang ditampilkan *Media Indonesia* pada data (203) adalah pertautan antarfakta terkait pembatasan sosial yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali berturut-turut dengan pembatasan sosial yang kembali diperpanjang pada kali keempat. Pada konteksnya, perpanjangan keempat diasumsikan sebagai sebuah masa transisi sebelum memasuki normal baru. Redaktur *Media Indonesia* menginterpretasikan PSBB keempat sebagai bentuk kontinu dari PSBB sebelumnya. *Media Indonesia* menyisipkan konsep ideologis dan interpretasi atas perpanjangan keempat sebagai sebuah kesetujuan atas perpanjangan masa PSBB transisi menuju normal baru.

Atas analisis data (202) dan (203) yang dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia* tersebut, diketahui bahwa tendensi antara kedua media tersebut saling bertentangan. *Kompas* cenderung meragukan wacana normal baru yang akan dilaksanakan tiga bulan setelah pemberlakuan PSBB, kurun waktu tiga bulan sebagai waktu beradaptasi terhadap pandemi global bukan merupakan hal yang mudah dilakukan terlebih bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, *Media Indonesia* menunjukkan persetujuan atas diberlakukannya PSBB transisi oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai persiapan sebelum memasuki tahapan normal baru. Perbedaan lain antara kedua media tersebut ditemukan pada data (204) dan (205) yang memuat struktur ideologis koherensi kondisional berikut.

- (204) Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi virus Covid-19 menuju situasi normal baru menuntut kesadaran bersama. Kesadaran, bahwa persoalan kita saat ini **disebabkan** merebaknya virus Covid-19 dan **karena** itu penularan Covid-19 harus diselesaikan dahulu. (4/K/03062020/P2/K1-2/Koherensi Kondisional)

commit to user

(205) Jujur diakui bahwa tekanan **akibat** covid-19 membuat pasar modal mengalami guncangan. Namun, sejumlah kebijakan yang diambil otoritas mampu memicu sentimen positif. IHSG mulai kembali hijau. (137/MI/05062020/P9/K1-3/Koherensi Kondisional)

Data (204) dan data (205) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi kondisional. Data (204) merupakan data yang berasal dari koran *Kompas*, sedangkan data (205) merupakan data dari koran *Media Indonesia*. Jenis koherensi kondisional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk kausalitas. Bentuk kausal tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat terkait peristiwa yang berhubungan dengan pandemi, yaitu hal-hal yang terjadi di masyarakat akibat adanya Covid-19.

Kompas menghadirkan bentuk kausalitas pada data (204) sebagai penanda sebab-akibat antara pandemi Covid-19 dan segala permasalahan yang timbul di Indonesia. Paragraf pada data (204) memuat informasi terkait perlunya kesadaran diri pada saat pelanggaran PSBB yang dilaksanakan sebelum normal baru diterapkan. Sebelumnya, PSBB diberlakukan karena pandemi Covid-19. Pelanggaran tersebut dilakukan karena wacana normal baru sudah dipublikasikan. Selain itu, informasi lain yang termuat di dalamnya adalah perlunya kesadaran bersama bahwa segala problematika yang menyebabkan Indonesia berada dalam kondisi tidak baik merupakan akibat dari pandemi Covid-19. Oleh karenanya, hal pertama yang perlu ditangani adalah pandemi Covid-19, dimulai dari pencegahan penularan.

Konsep ideologis yang terkandung pada data (204) adalah adanya pertautan antarfakta terkait segala persoalan dan masalah yang disebabkan oleh

pandemi Covid-19. Hal tersebut ditampilkan redaktur *Kompas* pada proposisi kedua dalam data (204). Hubungan yang terbentuk atasnya adalah adanya pandemi Covid-19 berakibat pada masalah-masalah lain yang bermunculan seiring bertambahnya kasus positif Covid-19. Poin tersebut diinterpretasikan *Kompas* sebagai sumber dari segala masalah. Interpretasi tersebut dibentuk oleh *Kompas* atas adanya pemunculan proposisi kedua terkait penularan Covid-19 yang perlu diutamakan di atas berbagai masalah untuk diselesaikan. Secara implisit, *Kompas* menyisipkan konsep ideologis bahwa aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat masih diabaikan dan tidak diberi perhatian khusus, padahal pandemi merupakan akar dari permasalahan yang timbul di Indonesia.

Bentuk kausalitas lain dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* sebagaimana tampak pada data (205). Bentuk kausalitas yang ditampilkan pada data tersebut merupakan penanda sebab-akibat atas pandemi Covid-19 yang menyebabkan pasar modal mengalami kegoyahan. Konsep ideologis yang ditampilkan *Media Indonesia* pada data (205) adalah pertautan antarfakta terkait pandemi dengan dampaknya pada pasar modal. Namun, hal tersebut dapat diselamatkan karena kebijakan pemerintah. Redaktur *Media Indonesia* menginterpretasikan kedua hal tersebut sebagai sebuah hal yang bertautan dan saling memengaruhi satu sama lain. *Media Indonesia* menyisipkan konsep ideologis dan interpretasi atas terselamatkannya pasar modal Indonesia di kancah internasional karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Analisis data (204) dan (205) yang dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia* tersebut menghasilkan inti sari, bahwa tendensi antara kedua media

tersebut saling bertentangan. *Kompas* cenderung mendorong agar kesehatan dan keselamatan rakyat diutamakan. Di sisi lain, *Media Indonesia* menunjukkan dukungan atas kebijakan pemerintah yang mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia, khususnya pasar modal di masa pandemi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa orientasi ideologis *Kompas* berkaitan dengan perihal kemanusiaan, sedangkan *Media Indonesia* pada perihal materialistis.

Selanjutnya masih merupakan analisis struktur ideologis koherensi kondisional yang ditemukan dalam editorial *Kompas* dan *Media Indonesia* pada data (206) dan (207). Berikut merupakan tampilan data beserta analisisnya.

- (206) **Setelah melonggarkan ekonomi**, masih ada agenda politik, yakni pemilihan kepala daerah, Desember 2020. Pelaksanaan pilkada itu menimbulkan pro dan kontra. Selain tak memiliki pengalaman menggelar pilkada di era pandemi, pilkada juga pasti akan menambah anggaran. Hasil survei daring Litbang *Kompas*, 24-25 Mei 2020, menunjukkan, sebanyak 91,8 responden setuju dengan penundaan pilkada ke tahun 2021, sebanyak 2,5 persen tidak setuju, dan 5,7 persen tidak tahu. (41/K/10062020/P5/K1-4/Koherensi Kondisional)
- (207) Bila dilihat dari sisi domestik, pemberlakuan skenario kenormalan baru (*new normal*) ditanggapi pasar secara positif. **Setelah dua bulan terakhir pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia untuk menghambat laju penyebaran covid-19**, kini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengeksplorasi dan mempersiapkan kebijakan kenormalan baru dalam menyikapi pandemi ini. (133/MI/05062020/P5/K1-2/Koherensi Kondisional)

Data (206) dan data (207) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi kondisional. Data (206) merupakan data yang berasal dari koran *Kompas*, sedangkan data (207) merupakan data dari koran *Media Indonesia*. Jenis koherensi kondisional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk

temporal. Bentuk temporal tersebut menunjukkan keterangan waktu suatu peristiwa yang berhubungan dengan pandemi Covid-19, yaitu normal baru khususnya pada pelaksanaan pilkada dan agenda pelonggaran ekonomi.

Kompas menghadirkan bentuk temporal pada data (206) sebagai penanda waktu agenda politik Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah. Paragraf pada data (206) memuat informasi terkait wacana pilkada yang akan dilaksanakan setelah pelonggaran ekonomi dilakukan oleh pemerintah pada bulan Desember 2020. Selain itu, informasi lain yang tampak di dalamnya adalah ditampilkannya bentuk pro dan kontra atas wacana pilkada di tengah pandemi Covid-19. *Kompas* juga turut melampirkan hasil survei yang menunjukkan banyaknya responden yang setuju jika pilkada ditunda sampai pada tahun 2021.

Konsep ideologis yang terkandung pada data (206) adalah adanya pertautan antarfakta terkait wacana pilkada yang merupakan agenda yang menjadi tujuan pemerintah setelah pelonggaran ekonomi. Hal tersebut ditampilkan redaktur *Kompas* pada proposisi pertama dalam data (206). Hubungan yang terbentuk atasnya adalah pelonggaran aktivitas ekonomi di masa pandemi menghadirkan hubungan temporal dengan wacana pilkada sebagai bentuk agenda kontinuitas yang ditampilkan dan dihubungkan oleh *Kompas* sebagai sebuah *event* yang berkaitan satu sama lain.

Poin tersebut diinterpretasikan *Kompas* sebagai kurun waktu yang tidak cukup bagi masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam hal pelaksanaan pilkada di akhir tahun 2020. Interpretasi tersebut dibentuk oleh *Kompas* atas adanya pemunculan proposisi ketiga terkait banyaknya responden

dari survei Litbang *Kompas* terkait penundaan pilkada. Secara implisit, *Kompas* menyisipkan konsep ideologis bahwa tidak sepatasnya pilkada dilakukan pada saat pandemi yang bahkan di masa awal pemberlakuan normal baru tidak menunjukkan kurva turun.

Bentuk temporal lain dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* sebagaimana tampak pada data (207). Bentuk temporal yang ditampilkan pada data tersebut merupakan penanda waktu atas agenda pemerintah dalam melakukan eksplorasi dan mempersiapkan kebijakan terkait normal baru setelah pemberlakuan PSBB dilaksanakan selama dua bulan sebelumnya. Konsep ideologis yang ditampilkan *Media Indonesia* pada data (207) adalah pertautan antarfakta terkait pembatasan sosial dan agenda pemerintah untuk mempersiapkan normal baru dengan kebijakan-kebijakan yang direncanakan. Hubungan yang terbentuk atasnya adalah PSBB selama dua bulan di masa pandemi Covid-19 menghadirkan hubungan temporal dengan wacana pemerintah dalam mengeksplorasi kebijakan normal baru sebagai bentuk agenda kontinuitas yang ditampilkan dan dihubungkan oleh *Media Indonesia* sebagai sebuah *event* yang berkaitan satu sama lain.

Poin tersebut diinterpretasikan *Media Indonesia* sebagai kurun waktu yang sudah cukup bagi Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam hal penancangan kebijakan dan pelaksanaan normal baru di masa pandemi Covid-19. Interpretasi tersebut dibentuk oleh *Media Indonesia* atas adanya pemunculan proposisi pertama terkait respons pasar yang menunjukkan tren positif atas wacana normal baru yang sempat dikemukakan pada publik. Secara implisit,

Media Indonesia menyisipkan konsep ideologis bahwa sudah saatnya Indonesia bergerak dalam menanggapi pasar domestik di masa pandemi dan mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang didapat atasnya.

Atas analisis data (206) dan (207) yang dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia* tersebut, diketahui bahwa tendensi antara kedua media tersebut saling bertentangan. *Kompas* cenderung meragukan wacana pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Di sisi lain, *Media Indonesia* menunjukkan persetujuan atas diberlakukannya tahapan normal baru karena berdampak positif terhadap pasar modal. Konsep ideologis dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia* berdasarkan interpretasinya atas peristiwa yang terjadi dan diolah sebagai model mental dan direproduksi menjadi wacana yang merepresentasikan konsep ideologis yang dianutnya. Selain analisis mengenai bentuk temporal, data (208) dan (209) berikut merupakan analisis struktur ideologis koherensi kondisional bentuk kausalitas.

- (208) Kita tak ingin pilkada hanya sekadar dilangsungkan karena sudah merupakan agenda konstitusional dan kompromi elite politik. Namun, dalam pelaksanaannya, kesehatan publik dan kesehatan demokrasi tidak terjaga. Kesehatan demokrasi akan ditentukan dengan tingkat partisipasi politik dari rakyat yang akan menggelar pilkada di 270 daerah. Memaksakan pilkada pada era pandemi selain mempunyai risiko bagi kesehatan publik, juga tak sehat bagi demokrasi **karena** petahana bisa memanfaatkan pandemi untuk meningkatkan keterpilihannya. (43/K/10062020/P7/K1-4/Koherensi Kondisional)
- (209) Normal baru **akibat** covid-19 mutlak dijalankan meski pilkada sebagai instrumen demokrasi membutuhkan partisipasi sebesar-besarnya pemilih. Keselamatan nyawa pemilih tetap diutamakan di atas pelaksanaan demokrasi. (74/MI/11052020/P5/K1-2/Koherensi Kondisional)

Data lain yang memuat struktur ideologis berupa koherensi kondisional adalah data (208) dan (209). Data (208) merupakan data yang berasal dari koran *Kompas*, sedangkan data (209) merupakan data dari koran *Media Indonesia*. Jenis koherensi kondisional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk kausalitas. Bentuk kausal tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat terkait peristiwa yang berhubungan dengan pandemi, yaitu agenda pemilihan kepala daerah.

Kompas menghadirkan bentuk kausalitas pada data (208) sebagai penanda sebab-akibat antara pilkada sebagai agenda konstitusional yang dilakukan di era pandemi dan risiko buruknya, baik dari segi kesehatan maupun demokrasi. Paragraf pada data (208) memuat informasi terkait pelaksanaan pilkada yang tidak seharusnya hanya menjadi agenda politik saja, terlebih di masa pandemi. Selain itu, terdapat informasi terkait dampak buruk yang terjadi apabila pilkada tetap dilangsungkan pada bulan Desember 2020, beberapa di antaranya adalah kesehatan masyarakat dan kesehatan demokrasi menjadi rentan. *Kompas* menyampaikan bahwa kesehatan demokrasi pada pilkada ditentukan oleh partisipasi publik.

Konsep ideologis yang terkandung pada data (208) adalah adanya pertautan antarfakta terkait pilkada pada masa pandemi Covid-19 dan dampak buruk yang menyertainya. Hal tersebut ditampilkan redaktur *Kompas* pada proposisi terakhir dalam data (208). Hubungan yang terbentuk atasnya adalah adanya pilkada di masa pandemi Covid-19 berujung pada rentannya penularan virus dan riskannya demokrasi apabila minim partisipasi publik dan petahana

yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk meraih simpati rakyat. Poin tersebut diinterpretasikan *Kompas* sebagai ketidakteraturan pemerintahan negara Indonesia yang tetap memaksakan pilkada di tengah pandemi, padahal risiko yang tampak begitu besar. Interpretasi tersebut dibentuk oleh *Kompas* atas munculnya peristiwa yang ditampilkan pada proposisi terakhir terkait dampak-dampak pelaksanaan pilkada. Secara implisit, *Kompas* menyisipkan konsep ideologis bahwa *Kompas* tidak menyetujui rencana pemerintah yang akan melangsungkan pilkada di masa pandemi Covid-19 .

Bentuk kausalitas lain dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* sebagaimana tampak pada data (209). Bentuk kausalitas yang ditampilkan pada data tersebut merupakan penanda sebab-akibat atas normal baru yang diterapkan karena pandemi Covid-19. Konsep ideologis yang ditampilkan *Media Indonesia* pada data (209) adalah pertautan antarfakta terkait pandemi dengan munculnya penerapan tatanan hidup normal baru, khususnya pada agenda pilkada yang dilaksanakan pada Desember 2020. Redaktur *Media Indonesia* menginterpretasikan kedua hal tersebut sebagai sebuah hal yang bertautan dan saling memengaruhi satu sama lain. *Media Indonesia* menyisipkan konsep ideologis dan interpretasi atas perlunya penerapan tatanan hidup baru pada saat pemilihan kepala daerah untuk tujuan keamanan dan keselamatan nyawa pemilih.

Analisis data (208) dan (209) yang dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia* tersebut menghasilkan inti sari, bahwa tendensi antara kedua media tersebut saling bertentangan. *Kompas* cenderung tidak mendukung adanya agenda konstitusional, yaitu pilkada di tengah pandemi dengan alasan keselamatan rakyat

dan demokrasi tetap terjaga. Di sisi lain, *Media Indonesia* menunjukkan dukungan atas kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pilkada di tahun 2020 saat pandemi masih berlangsung, dengan tetap menerapkan tatanan hidup normal baru untuk mencegah penularan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa orientasi ideologis *Kompas* berkaitan dengan perihal kesehatan, sedangkan *Media Indonesia* pada keberlangsungan proses demokrasi.

Kemudian, pada data (210) dan (211) berikut termuat koherensi kondisional berupa bentuk kausalitas. Bentuk kausalitas tersebut juga menunjukkan bagaimana perbedaan antara *Kompas* dan *Media Indonesia*. Berikut merupakan analisisnya.

- (210) Jumlah orang yang terinfeksi virus Covid-19 tiap hari masih berada di atas angka 1.000. Puncak pandemi belum dicapai. Berdasarkan laporan Gugus Tugas per 15 Juni 2020, tercatat 39.294 orang terkonfirmasi positif. Oleh **karena** itu, diskursus soal serangan gelombang kedua sebaiknya dikesampingkan. Fokuslah pada ancaman menanggulangi pandemi. (47/K/16062020/P2/K1-5/Koherensi Kondisional)
- (211) Tatanan normal baru atau *new normal* ialah pilihan rasional. Ia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalani **karena** sampai detik ini belum diketahui kapan ekspansi covid-19 akan usai. Kita jelas tidak mungkin terus menunggu dalam ketidakpastian, sementara ekonomi harus kembali menggeliat demi menopang kehidupan rakyat. (100/MI/28052020/P2/K1-3/Koherensi Kondisional)

Data (210) dan data (211) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi kondisional. Data (210) merupakan data yang berasal dari koran *Kompas*, sedangkan data (211) merupakan data dari koran *Media Indonesia*. Jenis koherensi kondisional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk kausalitas. Bentuk kausal tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat terkait

peristiwa yang berhubungan dengan pandemi, yaitu fokus utama pada sektor-sektor tertentu yang perlu ditangani.

Kompas menghadirkan bentuk kausalitas pada data (210) sebagai penanda sebab-akibat antara jumlah kasus positif dan penanggulangan pandemi Covid-19. Paragraf pada data (210) memuat informasi terkait angka orang terinfeksi virus yang mencapai 1000 kasus setiap harinya. *Kompas* juga mengutip laporan Gugus Tugas terkait total kasus terkonfirmasi sebanyak 39.294 orang. Selain itu, informasi lain yang termuat di dalamnya adalah adanya wacana terjadinya pandemi gelombang kedua, padahal kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tren turun. Oleh karenanya, hal pertama yang perlu ditangani adalah penanggulangan penularan Covid-19.

Konsep ideologis yang terkandung pada data (210) adalah adanya pertautan antarfakta terkait banyaknya kasus positif dan fokus terhadap pencegahan dan penanggulangan pandemi. Hal tersebut ditampilkan redaktur *Kompas* pada proposisi kedua dan keempat dalam data (210). Hubungan yang terbentuk atasnya adalah adanya lonjakan kasus seharusnya menjadi titik mula fokus penanganan Covid-19 agar tidak menyebabkan kasus yang lebih banyak, bukan menciptakan wacana pandemi gelombang kedua. Poin tersebut diinterpretasikan *Kompas* sebagai kesalahan fokus yang menjadi tindakan pemerintah. Secara implisit, *Kompas* menyisipkan konsep ideologis bahwa penanganan kasus positif Covid-19 merupakan hal yang lebih krusial untuk diperhatikan, dibandingkan memperhatikan perihal yang belum terjadi dan masih menjadi prediksi.

Bentuk kausalitas lain dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* sebagaimana tampak pada data (211). Bentuk kausalitas yang ditampilkan pada data tersebut merupakan penanda sebab-akibat atas normal baru dan ekspansi Covid-19. Konsep ideologis yang ditampilkan *Media Indonesia* pada data (211) adalah pertautan antarfakta terkait pemberlakuan normal baru dan penularan Covid-19. Normal baru harus dilakukan karena penularan Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan berakhir dan bagaimana laju gerak penularannya. Hal tersebut dipandang *Media Indonesia* demi pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk menopang kehidupan masyarakat. Redaktur *Media Indonesia* menginterpretasikan kedua hal tersebut sebagai sebuah hal yang bertautan dan saling memengaruhi satu sama lain. *Media Indonesia* menyisipkan konsep ideologis dan interpretasi atas terselamatkannya perekonomian Indonesia dengan dilaksanakannya normal baru.

Atas analisis data (210) dan (211) yang dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia* tersebut, diketahui bahwa tendensi antara kedua media tersebut saling bertentangan. *Kompas* cenderung mendorong agar pemerintah fokus pada penanganan kasus Covid-19. Di sisi lain, *Media Indonesia* menunjukkan dukungan diberlakukannya normal baru untuk menyelamatkan perekonomian rakyat di masa pandemi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa orientasi ideologis *Kompas* berkaitan dengan penanggulangan Covid-19, sedangkan *Media Indonesia* pada perihal pemulihan ekonomi.

Terakhir, koherensi kondisional ditemukan dalam editorial *Kompas* dan *Media Indonesia*, ditunjukkan pada data (212) dan (213) berikut.

- (212) **Oleh karena keputusan pelanggaran aktivitas ekonomi telah dibuka**, ketika ruang publik dibuka dalam batasan tertentu, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan orang terinfeksi Covid-19. Pelayanan kesehatan harus siap menampung jika terjadi lonjakan. (52/K/16062020/P7/K1-2/Koherensi Kondisional)
- (213) **Karena itu**, kita mendorong seluruh kalangan agar benar-benar patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa transisi. Di sektor transportasi yang rawan penularan, misalnya, kita mendesak agar protokol yang sama benar-benar konsisten dijalankan. (155/MI/06062020/P9/K1-2/Koherensi Kondisional)

Data (212) dan data (213) adalah data yang memuat struktur ideologis berupa koherensi kondisional. Data (212) merupakan data yang berasal dari koran *Kompas*, sedangkan data (213) merupakan data dari koran *Media Indonesia*. Jenis koherensi kondisional yang ditampilkan pada kedua data tersebut adalah bentuk kausalitas. Bentuk kausal tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat terkait peristiwa yang berhubungan dengan pandemi, yaitu pelanggaran aktivitas ekonomi di masa transisi menuju normal baru.

Kompas menghadirkan bentuk kausalitas pada data (212) sebagai penanda sebab-akibat antara keputusan pelanggaran aktivitas ekonomi dan keharusan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19. Paragraf pada data (212) memuat informasi terkait perlunya perhitungan yang matang oleh pemerintah untuk menghindari adanya kenaikan kurva kasus. Selain itu, informasi lain yang termuat di dalamnya adalah perlunya kesiapan dari fasilitas layanan kesehatan untuk menampung jika kasus infeksi Covid-19 naik setelah pelanggaran aktivitas ekonomi.

Konsep ideologis yang terkandung pada data (212) adalah adanya pertautan antarfakta terkait keputusan pelanggaran aktivitas ekonomi dengan

kesigapan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Hal tersebut ditampilkan redaktur *Kompas* pada proposisi pertama dalam data (212). Hubungan yang terbentuk atasnya adalah adanya kebijakan pemerintah dalam melonggarkan aktivitas ekonomi, pada akhirnya menjadi keharusan pemerintah juga dalam melakukan antisipasi terjadinya lonjakan akibat keputusan tersebut. Poin tersebut diinterpretasikan *Kompas* sebagai bentuk timbal balik antara dua hal yang berkelindan. Interpretasi tersebut dibentuk oleh *Kompas* atas adanya pemunculan proposisi kedua terkait upaya persiapan pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan. Secara implisit, *Kompas* menyisipkan prediksi bahwa aktivitas ekonomi yang telah dibuka oleh pemerintah akan berdampak pada lonjakan kasus Covid-19. Maka, konsep ideologis yang tersirat pada data (212) oleh *Kompas*, bahwa aspek keselamatan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Bentuk kausalitas lain dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* sebagaimana tampak pada data (213). Bentuk kausalitas yang ditampilkan pada data tersebut merupakan penanda sebab-akibat atas perlunya kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat karena periode transisi menuju normal baru sudah dimulai. Konsep ideologis yang ditampilkan *Media Indonesia* pada data (213) adalah pertautan antarfakta terkait pembukaan masa transisi dengan kedisiplinan masyarakat. Redaktur *Media Indonesia* menginterpretasikan kedua hal tersebut sebagai sebuah hal yang bertautan dan saling memengaruhi satu sama lain. *Media Indonesia* menyisipkan konsep ideologis dan interpretasi atas perlunya sikap

patuh dan konsistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di masa transisi menuju normal baru untuk menekan angka penularan.

Analisis data (212) dan (213) yang dimunculkan oleh *Kompas* dan *Media Indonesia* tersebut menunjukkan bahwa tendensi antara kedua media tersebut saling bertentangan. *Kompas* cenderung mendorong agar kesehatan dan keselamatan rakyat diutamakan dan menjadikannya sebagai tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain, *Media Indonesia* menunjukkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait masa transisi menuju normal baru dan menjadikan aspek keselamatan masyarakat sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa orientasi ideologis kesehatan dan keselamatan masyarakat oleh *Kompas* adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan *Media Indonesia* adalah tanggung jawab setiap individu.

Perbedaan antara *Kompas* dan *Media Indonesia* dalam menanggapi wacana normal baru yang diketahui dari analisis struktur ideologis koherensi kondisional menunjukkan bahwa kedua media tersebut memiliki tendensi yang berbeda dalam menunjukkan dukungan atau tidaknya pada suatu kelompok dan/atau pandangan kelompok yang merepresentasikan citra diri. Atas analisis tersebut, secara general dapat disimpulkan bahwa *Kompas* cenderung menunjukkan ketidaksetujuan wacana normal baru sebab ketidaksiapan masyarakat dan pemerintah, khususnya pada aspek kesehatan yang belum ditangani dengan baik. Di sisi lain, *Media Indonesia* menunjukkan dukungan pada pemerintah, terutama mengenai tujuan normal baru yang mengarah pada perbaikan ekonomi negara Indonesia.

F. Praanggapan

Struktur ideologis lain yang berkaitan dengan makna adalah praanggapan. Praanggapan merupakan bentuk pengandaian yang diciptakan dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Di dalam teks editorial, praanggapan diwujudkan dengan penyusunan proposisi yang diatur oleh media. Penyusunan proposisi-proposisi tersebut memungkinkan media untuk membentuk praanggapan dan memutuskan informasi apa saja yang perlu ditampilkan atau disembunyikan untuk mensugesti pembaca terkait hal yang telah diterima secara umum tetapi kebenarannya belum diketahui. Berikut merupakan analisis dan pembahasan struktur ideologis praanggapan yang termuat dalam data (214) di bawah ini.

(214) Penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas. **Jika kesehatan tidak ditangani baik, perbaikan ekonomi sulit mengikuti kurva V.** Bahkan, walaupun mengikuti kurva U, kecepatan kurva naik yang menunjukkan membaiknya perekonomian sangat tergantung dari kemampuan Indonesia menangani penularan virus. Penanganan kesehatan juga menyangkut kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. (9/K/03062020/P6/K1-4/Praanggapan)

Struktur ideologis yang termuat pada data (214) adalah praanggapan. Data tersebut memuat praanggapan yang dimunculkan oleh redaktur *Kompas*. Proposisi-proposisi pembentuk struktur ideologis praanggapan yang ditampilkan oleh redaktur tersusun atas pengandaian yaitu *jika kesehatan tidak ditangani baik, perbaikan ekonomi sulit mengikuti kurva V*. Proposisi tersebut menandai konsep ideologis *Kompas* yang memilih informasi terkait penanganan kesehatan perlu difokuskan terlebih dahulu di atas perihal lain seperti ekonomi. Hal tersebut

commit to user

didasarkan atas adanya proposisi pertama pada data (214) yang menyatakan bahwa penanganan Covid-19 diharuskan menjadi prioritas utama.

Praanggapan dimunculkan oleh redaktur *Kompas* pada proposisi kedua sebagai proposisi penjelas dari proposisi pertama. Informasi yang ditampilkan tersebut menunjukkan kecenderungan *Kompas* terkait dengan hubungan timbal balik antara penanganan Covid-19 dan ekonomi. Data (214) menunjukkan dengan terang tendensi *Kompas* bahwa penanganan Covid-19 merupakan hal yang perlu ditangani dengan sigap. Hal tersebut dimunculkan karena praanggapan bahwa hal-hal di luar kesehatan akan turut membaik dan pulih. Proposisi tersebut juga memuat praanggapan ekonomi dapat mengikuti kurva V apabila penanganan atas kasus Covid-19 didahulukan dan diatasi dengan baik sampai rampung dan tuntas.

Pada praanggapan yang dimunculkan, terdapat informasi yang disembunyikan *Kompas* dan secara implisit hadir di dalam proposisi praanggapan. Informasi yang disembunyikan tersebut adalah bentuk ketidaksetujuan pelanggaran ekonomi yang diwacanakan Pemerintah Indonesia. *Kompas* cenderung tidak mendukung pelanggaran ekonomi di masa sulit manakala perihal kesehatan masyarakat belum dapat ditangani dengan baik dan stabil. Oleh karenanya, *Kompas* memasukkan informasi tentang ketidaksetujuan tersebut di dalam proposisi praanggapan, agar khalayak pembaca memahami pentingnya mendahulukan penanganan penularan virus Covid-19 untuk mendapat kesiapan membuka sektor perekonomian di tengah pandemi.

Praanggapan yang dipaparkan pada data (214) yang menjadi tendensi *Kompas* tersebut diputuskan untuk ditampilkan di dalam wacana editorial normal

baru. Hal tersebut ditujukan untuk mensugesti pembaca agar menjadi sejalan dengan *Kompas*. Selain itu, penggiringan opini publik atas wacana tersebut berpotensi kuat menjadikan khalayak tidak melakukan pertentangan atas opini *Kompas*, yaitu memprioritaskan penanganan Covid-19, dengan cara memunculkan struktur ideologis berupa praanggapan. Secara tidak langsung, *Kompas* menanamkan opini untuk dipercaya dan diyakini oleh publik. Bentuk praanggapan yang dimunculkan oleh *Kompas* perihal Covid-19 dengan perekonomian dapat dibandingkan dengan praanggapan yang dicetuskan oleh *Media Indonesia* sebagaimana analisis pada data (215) berikut.

(215) Jangan membuat celah terjadinya gelombang kedua penyebaran covid-19. **Jika itu sampai terjadi, roda perekonomian bisa kembali terhenti dan aliran modal akan keluar lagi dari Indonesia, buntutnya rupiah berisiko terjerembap seperti Maret lalu.** (141/MI/05062020/P13/K1-2/Praanggapan)

Struktur ideologis pada data (215) adalah praanggapan. Praanggapan yang dimunculkan pada data tersebut ditampilkan oleh redaktur *Media Indonesia*. Proposisi-proposisi pembentuk struktur ideologis praanggapan yang ditampilkan oleh redaktur tersusun atas pengandaian yaitu *jika itu sampai terjadi, roda perekonomian bisa kembali terhenti dan aliran modal akan keluar lagi dari Indonesia, buntutnya rupiah berisiko terjerembap seperti Maret lalu*. Proposisi tersebut menandai konsep ideologis *Media Indonesia* yang memilih informasi terkait perlunya pencegahan agar terhindar dari gelombang kedua pandemi Covid-19. Hal tersebut didasarkan atas adanya proposisi pertama pada data (215) yang

menyatakan agar tidak membuat celah yang berpeluang membuka jalan bagi pandemi Covid-19 di Indonesia mengalami gelombang kedua.

Praanggapan dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* pada proposisi kedua sebagai proposisi penjelas dari proposisi pertama. Informasi yang ditampilkan tersebut menunjukkan kecenderungan *Media Indonesia* terkait dengan hubungan timbal balik antara gelombang kedua Covid-19 dan perekonomian, khususnya nasib nilai kurs rupiah. Data (215) menunjukkan dengan terang tendensi *Media Indonesia* bahwa perlu melakukan tindakan agar tidak terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19. Hal tersebut dimunculkan karena praanggapan bahwa perekonomian Indonesia akan terhenti, salah satunya ditandai dengan keluarnya aliran modal investor pasar modal dari Indonesia. Bahkan, *Media Indonesia* memunculkan latar belakang untuk menguatkan opininya dengan menampilkan penjelas, yaitu terkait terjerembapnya nilai tukar rupiah pada bulan Maret 2020.

Pada realitasnya, bulan Maret tahun 2020, merupakan masa ketika rupiah mengalami pelemahan drastis terhadap dolar AS sebanyak 1,04% menjadi Rp16.337 per dolar AS. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut disebabkan oleh terjadinya banyak infeksi Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia. Persebaran Covid-19 di Indonesia yang terus meluas dan menaikkan kurva positif menjadikan investor mengalihkan investasinya kepada negara yang lebih stabil dan lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia. Oleh karenanya, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat. *Media Indonesia* menampilkan informasi terjerembapnya nilai rupiah pada bulan Maret tahun 2020 agar khalayak pembaca memahami

perlunya pencegahan terjadinya gelombang kedua Covid-19 agar perekonomian Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Praanggapan yang dipaparkan pada data (215) sebagai bentuk tendensi *Media Indonesia* tersebut diputuskan untuk ditampilkan di dalam wacana editorial normal baru. Hal tersebut ditujukan untuk mensugesti pembaca agar menjadi sejalan dengan *Media Indonesia*. Selain itu, penggiringan opini publik atas wacana tersebut berpotensi kuat menjadikan khalayak tidak melakukan pertentangan atas opini *Media Indonesia*, yaitu melakukan pencegahan terjadinya gelombang kedua Covid-19, dengan cara memunculkan struktur ideologis berupa praanggapan. *Media Indonesia*, secara tidak langsung menanamkan opini untuk dipercaya dan diyakini oleh publik.

Inti sari atas analisis data (214) dan (215) berupa struktur ideologis praanggapan yang ditampilkan *Kompas* dan *Media Indonesia* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara kedua media tersebut adalah strategi yang digunakan adalah penggiringan opini secara tidak langsung terkait wacana tentang Covid-19 dan hubungannya dengan perekonomian. Sementara itu, perbedaan antara *Kompas* dan *Media Indonesia* adalah bentuk tendensi yang berlainan sebagaimana tampak pada proposisi yang tersusun. *Kompas* lebih menekankan pada aspek kesehatan yang perlu diprioritaskan, sedangkan *Media Indonesia* lebih condong terhadap aspek perekonomian. *Kompas* meyakinkan publik bahwa kurva ekonomi akan membaik apabila penanganan Covid-19 juga digarap dengan baik, sedangkan *Media Indonesia* mengkhawatirkan keluarnya investor pasar modal dan anjloknya rupiah karena gelombang kedua Covid-19.

G. Paralelisme

Struktur ideologis selanjutnya adalah paralelisme. Wujud paralelisme adalah pengulangan suatu bentuk lingual di dalam teks. Paralelisme yang dapat disebut sebagai repetisi, merupakan strategi ideologis yang berkaitan dengan gaya retorik yang digunakan untuk menekankan (*emphasized*) ‘hal baik tentang kita’ dan ‘hal buruk tentang mereka’. Secara khusus, paralelisme digunakan untuk meningkatkan atensi terhadap informasi yang disajikan media di dalam teks wacana. Berikut merupakan analisis dan pembahasan struktur ideologis paralelisme yang tertera pada data (216) di bawah ini.

(216) Hasil jajak pendapat *Kompas* 15 Juni 2020 menunjukkan 40,3 persen memahami langkah pemerintah melonggarkan aktivitas perekonomian di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Organisasi Kesehatan Dunia (**WHO**) menilai Indonesia belum memenuhi syarat untuk menuju ke tahapan normal baru. **WHO** membeberkan sejumlah prasyarat yang belum dipenuhi Indonesia. Situasi dan kondisi setiap provinsi tentunya sangat berbeda-beda. Apa pun, penilaian **WHO** haruslah diterima sebagai bahan introspeksi dan perbaikan. (51/K/16062020/P6/K1-5/Paralelisme)

Data (216) merupakan data yang memuat struktur ideologis berupa paralelisme. Paralelisme pada data tersebut dimunculkan oleh redaktur *Kompas* berupa pengulangan satuan lingual *WHO* sebanyak tiga kali di dalam satu paragraf. *WHO* merupakan singkatan dari World Health Organization atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Organisasi Kesehatan Dunia. *WHO* menjadi koordinator kesehatan selama pandemi Covid-19 berlangsung yang mencakup negara-negara di seluruh dunia. *WHO* memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesehatan masyarakat secara global.

WHO juga bertujuan untuk mengkoordinasi kewenangan otoritas lokal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat di masa pandemi agar selaras dan tidak bertentangan dengan kebijakan WHO yang berlaku secara universal. Apabila dikaitkan dengan data (216), *Kompas* menyatakan dukungan atas peran WHO sebagai organisasi kesehatan yang mencakup seluruh wilayah di dunia. Dukungan *Kompas* ditampilkan oleh redaktur di dalam kalimat pada data (216) yaitu “*Apa pun, penilaian WHO haruslah diterima sebagai bahan introspeksi dan perbaikan*”. Pernyataan tersebut dimaknai sebagai saran *Kompas* terhadap Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kebijakan yang dibuat terkait normal baru.

Data (216) menunjukkan bahwa *Kompas* menyertakan hasil jajak pendapat oleh khalayak pembaca terkait dengan upaya pelonggaran ekonomi oleh pemerintah di masa pandemi. Namun, WHO, selaku koordinator kesehatan menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadikan Indonesia mengalami ketidaksiapan untuk melakukan pelonggaran ekonomi, terlebih normal baru. Hal tersebut dinyatakan secara objektif sesuai dengan penilaian yang didasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh WHO. Selain itu, kondisi yang dialami setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, tentunya, kebijakan normal baru tidak seharusnya diterapkan secara serempak dan bersamaan mengingat kasus per daerah tidak sama.

Demikian pula, terkait pengulangan satuan lingual WHO secara repetitif di dalam paragraf oleh redaktur *Kompas*, bertujuan untuk meningkatkan atensi publik atas organisasi kesehatan tersebut dan segala hal yang menjadi

kebijakannya terkait dengan Covid-19. Konsep ideologis yang diusung oleh *Kompas* adalah bentuk penekanan (*emphasized*) terhadap WHO. WHO, pada konteks tersebut, menjadi persona yang perlu mendapat sorotan atas kuasa dan aksesnya sebagai organisasi kesehatan dunia. Oleh karena itu, *Kompas* menampilkannya ke dalam wacana editorial normal baru. Tendensi *Kompas* tampak pada struktur ideologis paralelisme tersebut berupa dukungan atas penundaan normal baru yang didasarkan pada pernyataan organisasi kesehatan dunia, WHO. Tendensi *Kompas* dapat dibandingkan dengan *Media Indonesia* yang sama-sama beropini tentang kebijakan Pemerintah Indonesia terkait normal baru. Data (217) berikut memuat paralelisme dan dilanjutkan analisis struktur ideologis paralelisme *Media Indonesia*.

- (217) Pemerintah pusat dan daerah harus seiring dan selaras dalam melaksanakan kebijakan penanganan **COVID-19**. Apalagi, pergerakan kasus **COVID-19** yang masih tergolong dinamis dengan angka kasus terkonfirmasi masih terus bertambah setiap harinya di sejumlah daerah. Penanganan **COVID-19** masih menjadi salah satu pertimbangan investor dalam memercayakan investasinya di Indonesia. Keduanya berjalan bersamaan dan memengaruhi satu sama lain. Pemerintah perlu mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk *new normal* dengan matang. (139/MI/05062020/P11-12/K1-2;K1-3/Paralelisme)

Data (217) merupakan data yang memuat struktur ideologis berupa paralelisme. Paralelisme pada data tersebut dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* berupa pengulangan satuan lingual *COVID-19* sebanyak tiga kali di dalam gabungan paragraf. Covid-19 merupakan singkatan dari coronavirus disease 2019. Penyakit tersebut disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebar ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai sebuah pandemi karena persebarannya yang cepat

dan luas. Covid-19 mulai menyebar di Indonesia dan menyebabkan kekalutan di berbagai sektor nasional. Penularan Covid-19 yang masif di Indonesia mengakibatkan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan.

Degradasi ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan imbas dari keberadaan pandemi Covid-19. Pandemi telah menekan kegiatan dan aktivitas perekonomian masyarakat dari berbagai kalangan. Oleh karenanya, muncul korelasi antara Covid-19 dan perekonomian. Apabila dikaitkan dengan data (217), *Media Indonesia* menyatakan kesetujuan atas kebijakan penanganan Covid-19 yang perlu dilakukan secara beriringan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Data (217) menunjukkan bahwa *Media Indonesia* menyertakan opini terkait persebaran Covid-19 di Indonesia dan penanganannya. Penanganan Covid yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, disampaikan oleh redaktur, sebagai bentuk pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan modal di Indonesia. *Media Indonesia* menyampaikan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan wacana normal baru yang akan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya penyelamatan ekonomi.

Pengulangan satuan lingual *covid-19* secara repetitif di dalam paragraf oleh redaktur *Media Indonesia* bertujuan untuk meningkatkan atensi publik terkait dengan Covid-19 dan penanggulangannya, serta segala hal yang terkait dengan persiapan normal baru. Konsep ideologis yang diusung oleh *Media Indonesia* adalah bentuk penekanan (*emphasized*) terhadap Covid-19. Covid-19, pada konteks tersebut, adalah peristiwa yang perlu mendapat sorotan atas

keberadaannya. Oleh karena itu, *Media Indonesia* menampilkannya ke dalam wacana editorial normal baru. Tendensi *Media Indonesia* tampak pada struktur ideologis paralelisme tersebut berupa dukungan atas penanggulangan Covid-19 yang dibarengi dengan perencanaan penerapan normal baru yang didasarkan atas dampak degradasi ekonomi akibat Covid-19.

Pokok pemikiran yang dapat ditarik atas analisis struktur ideologis paralelisme pada koran kedua tersebut adalah adanya perbedaan tendensi antara *Kompas* dan *Media Indonesia* terkait dengan kesetujuan atas wacana normal baru. *Kompas* menekankan peran WHO sebagai organisasi kesehatan dunia untuk menjadi acuan dalam perencanaan normal baru, sedangkan *Media Indonesia* menekankan pada penanggulangan Covid-19 dan pemulihan Covid-19 yang diiringi dengan persiapan normal baru. Atas kedua kecenderungan tersebut, diketahui bahwa *Kompas* belum menyetujui adanya wacana normal baru karena tidak dianjurkan oleh WHO. Sebaliknya, *Media Indonesia* condong menyetujui adanya normal baru dengan mendorong pemerintah agar lekas menangani Covid-19 kemudian fokus pada persiapan menuju normal baru, khususnya di sektor perekonomian.

H. Perbandingan

Perbandingan merupakan strategi ideologis yang diwujudkan dengan mempertentangkan dua hal sehingga kedua hal tersebut tampak kontras. Perbandingan juga berkaitan dengan penekanan ‘hal baik tentang kita’ dan ‘hal buruk tentang mereka’ sehingga informasi yang disampaikan di dalam teks dapat

membentuk polarisasi *ingroup-outgroup*. Data di bawah ini adalah data struktur ideologis perbandingan yang ditemukan pada koran *Media Indonesia*, sedangkan pada koran *Kompas* tidak ditemukan data perbandingan. Berikut merupakan analisis dan pembahasan atas perbandingan pada data (218).

(218) **Meski begitu, harus diakui bahwa pemerintah memasuki perang itu dengan kondisi yang berbeda bila dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat.** (85/MI/27052020/P4/K1/Perbandingan)

Data (218) merupakan data yang mengandung struktur ideologis perbandingan yang dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* dalam wacana editorial normal baru. Perbandingan tersebut adalah satuan lingual berupa kalimat yaitu, *meski begitu, harus diakui bahwa pemerintah memasuki perang itu dengan kondisi yang berbeda bila dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat* yang mengindikasikan komparasi antara dua hal. Dua hal yang dikomparasikan oleh redaktur *Media Indonesia* adalah negara Indonesia dengan Inggris dan Amerika Serikat terkait dengan penerapan normal baru.

Pada realitasnya, penganan normal baru oleh Pemerintah Indonesia memang sedang dalam kondisi yang belum stabil dan kurva kasus yang masih menanjak dan terkadang naik-turun. Penganan normal baru tersebut berkenaan dengan upaya penyelamatan ekonomi. Di sisi lain, kondisi kasus penularan Covid-19 di Inggris dan Amerika Serikat sudah sedikit mereda jika dibandingkan dengan situasi di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa *start* normal baru yang diterapkan antara negara-negara tersebut berbeda satu sama lain. Singkatnya, Indonesia memulai normal baru manakala penularan Covid-19 masih tinggi dan

kurva positif masih naik-turun, sedangkan Inggris dan Amerika Serikat memulai normal baru ketika kurva kasus sudah melandai.

Berdasarkan proposisi yang disusun oleh redaktur tersebut, diketahui bahwa Indonesia tidak menerapkan tatanan hidup normal baru di masa pandemi Covid-19 sendirian, melainkan dibarengi dengan negara-negara yang lain. Namun, dimulainya normal baru dengan *timeline* yang hampir bersamaan, tidak dimaknai bahwa kasus yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara tersebut bertumpu pada kondisi yang sama. Hal tersebut telah ditekankan oleh redaktur *Media Indonesia* di dalam data (218). Penekanan (*emphasized*) yang dilakukan oleh redaktur memunculkan suatu konsep ideologis berupa keberpihakan media.

Keberpihakan media dapat diinterpretasikan sebagai bentuk polarisasi berdasarkan struktur ideologis perbandingan yang dimunculkan. Atas perbandingan yang dibentuk oleh redaktur *Media Indonesia*, dapat diketahui bahwa *Media Indonesia* cenderung berpihak kepada negara Indonesia terkait dengan dimulainya normal baru. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya satuan lingual *perang* pada data (218) yang menunjukkan perjuangan Pemerintah Indonesia dalam upaya penyelamatan ekonomi di tengah naik-turunnya kurva kasus Covid-19 di Indonesia. Upaya tersebut dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat yang memulai normal baru ketika sudah melandai sehingga tidak tampak perjuangan yang berat atasnya.

I. Metafora

Struktur ideologis terakhir adalah metafora. Metafora merupakan penyampaian informasi dengan bentuk lain yang dicirikan dengan gaya. Penggunaan metafora, secara ideologis, dapat membentuk penekanan atau penghilangan makna sebagai fungsi dari opini ideologis. Hal tersebut disebabkan karena gaya yang dimunculkan metafora dapat mengaburkan kecondongan media di dalam teks wacana sehingga analisis ideologis terhadap metafora perlu dilakukan untuk membuka informasi implisit di dalamnya. Metafora juga digunakan untuk menandai penekanan sehingga metafora berujung pada polarisasi *ingroup-outgroup*. Berikut merupakan analisis dan pembahasan struktur ideologis metafora pada data (219) dan (220).

- (219) **Bak makan buah simalakama**, di tengah upaya penerapan normal baru, justru banyak yang abai protokol kesehatan. Kasus positif Covid-19 pun naik signifikan. (55/K/23062020/P1/K1-2/Metafora)
- (220) Asumsi pemerintah bahwa puncak penularan Covid-19 berlangsung pada bulan Mei ternyata harus direvisi. Hari-hari ini, penambahan angka kasus baru bahkan seperti berkejaran, **“berlomba” untuk memecahkan “rekor”**. (58/K/23062020/P2/K1-2/Metafora)

Data (219) dan (220) merupakan contoh struktur ideologis berupa metafora dalam teks editorial tentang normal baru pada koran *Kompas*. Data (219) merupakan bentuk peribahasa, sedangkan data (220) adalah bentuk perumpamaan. Data (219) memuat peribahasa *bak makan buah simalakama*. Peribahasa tersebut pada umumnya digunakan manakala berada pada situasi dan kondisi yang dilematis untuk memilih satu di antara dua opsi. Demikian halnya dengan kondisi

yang digambarkan oleh redaktur *Kompas* terkait dengan penerapan kebijakan normal baru.

Redaktur *Kompas* menyatakan bahwa penerapan normal baru, justru menimbulkan banyaknya pelanggaran akibat sikap abai dari masyarakat. Realitasnya, pembukaan jalan menuju normal baru telah melewati proses yang rumit dan membutuhkan banyak pertimbangan, baik dari kesehatan, sosial, dan ekonomi. Atas dasar ekonomi, tatanan kehidupan normal baru dijalankan. Namun, pelanggar protokol kesehatan semakin marak yang menganggap bahwa normal baru merupakan kehidupan normal sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Bentuk metafora peribahasa pada data (219) tersebut merupakan bentuk kiasan yang digunakan untuk mengekspresikan pemikiran redaktur *Kompas* dalam menanggapi fenomena normal baru yang tidak sesuai dengan asas kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pada konteks kalimat tersebut, terdapat penekanan (*emphasized*) bahwa penerapan normal baru merupakan sebuah kegagalan karena ketidakpatuhan masyarakat akan protokol kesehatan di masa normal baru. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Konsep ideologis yang ditampilkan oleh *Kompas* adalah bentuk polarisasi *outgroup* dengan Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan wacana normal baru. Penggambaran tersebut menunjukkan tendensi ideologis koran *Kompas* mengenai keraguan diterapkannya normal baru. *Kompas* menyorot penerapan normal baru sebagai upaya penyelamatan ekonomi, tetapi protokol kesehatan diabaikan sehingga berdampak pada lonjakan kasus Covid-19.

Kemudian pada data (220), terdapat struktur ideologis metafora berupa perumpamaan. Perumpamaan atau pengibaratan yang ditampilkan oleh redaktur adalah *berlomba untuk memecahkan rekor*. Perumpamaan tersebut merupakan penggambaran atas lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pada masa normal baru yang diterapkan pada bulan Juni 2020. *Kompas* menyatakan bahwa asumsi pemerintah perlu direvisi, karena sebelumnya, pemerintah berasumsi bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir pada bulan Mei 2020. Asumsi tersebut merupakan dasar direncanakannya normal baru pada bulan Juni 2020. Namun, tidak seperti yang diharapkan, penerapan normal baru di bulan Juni 2020 justru menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

Selain sebuah perumpamaan, data (220) tersebut juga mengandung sindiran. Sindiran tersebut ditujukan redaktur kepada seluruh penduduk Indonesia, baik jajaran pemerintah maupun masyarakat sipil terkait kasus Covid-19 yang diibaratkan sebagai sebuah ajang perlombaan yang mengejar rekor tertinggi. Data (220) tersebut dimunculkan oleh redaktur *Kompas* karena didasarkan atas fakta yang berkebalikan dari asumsi yang dipaparkan Pemerintah Indonesia bahwa pandemi dapat berakhir di bulan Mei 2020. Konsep Ideologis yang dimunculkan oleh redaktur *Kompas* pada data (220) tersebut adalah polarisasi *outgroup* dengan Pemerintah Indonesia yang memaksakan pelaksanaan normal baru ketika kasus belum mereda dan kurva belum melandai.

Senada dengan konsep ideologis yang terdapat pada data (219), data 220 juga menunjukkan tendensi ideologis koran *Kompas* mengenai keraguan diterapkannya normal baru. *Kompas* menyorot pada lonjakan kasus Covid-19

karena ketergesaan penerapan normal baru. Pemaknaan atas struktur ideologis teks editorial koran *Kompas* tersebut dapat dibandingkan dengan struktur ideologis metafora pada teks editorial koran *Media Indonesia* sebagaimana analisis data (221) dan (222) berikut.

- (221) Salah satu **penyakit** dalam mengelola negara ini ialah buruknya komunikasi dan kurangnya sosialisasi kebijakan kepada rakyat. Penyakit itu tentu tak boleh menulari kebijakan tatanan normal baru karena yang dihadapi ialah penyakit berbahaya bernama covid-19. (111/MI/28052020/P11/K1-2/Metafora)
- (222) Dalam konteks Indonesia, pemerintah daerah memegang kuasa tak kalah penting dengan pusat. Merekalah yang pegang **kunci** syarat dan tahapan, sudah layak atau belumlah setiap daerah menerapkan *new normal*. Sembarangan membuka **kunci** itu, taruhannya besar, risikonya tinggi. (172/MI/11062020/P10/K1-3/Metafora)

Data (221) dan (222) merupakan contoh struktur ideologis berupa metafora dalam teks editorial tentang normal baru pada koran *Media Indonesia*. Data (221) merupakan bentuk sindiran, sedangkan data (222) merupakan bentuk perumpamaan. Data (221) memuat sindiran berupa satuan lingual berbentuk kata, yaitu *penyakit*. Kata *penyakit* dikaitkan dengan pengelolaan negara oleh Pemerintah Indonesia. Sindiran *penyakit* merupakan representasi atas buruknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan miskomunikasi terkait hal-hal penting, yang pada konteks ini adalah Covid-19. Selain itu, buruknya tindak sosialisasi atas kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia mengenai pencegahan penularan Covid-19 yang tidak dikomunikasikan dengan baik, mengakibatkan mispersepsi di antara masyarakat.

Walaupun demikian, *Media Indonesia* tetap mendukung adanya normal baru, hal tersebut ditunjukkan pada proposisi *penyakit itu tentu tak boleh*

menulari kebijakan tatanan normal baru karena yang dihadapi ialah penyakit berbahaya bernama covid-19. Meskipun tidak menyatakan secara eksplisit bahwa *Media Indonesia* mendukung normal baru, akan tetapi pernyataan tersebut menandakan bahwa *Media Indonesia* tetap menyetujui penerapan normal baru di Indonesia. Namun, penggunaan sindiran pada data (221) dapat dimaknai sebagai sebuah ekspresi yang menunjukkan bahwa *Media Indonesia* menyayangkan tata kelola pemerintah dan masyarakat dalam hal saling berkomunikasi.

Sementara itu, konsep ideologis yang terkandung dalam data (221) adalah bentuk penekanan pada buruknya tata kelola negara, sedangkan untuk polarisasi, *Media Indonesia* tetap berpegang pada kesetujuan atas pelaksanaan normal baru di Indonesia. *Media Indonesia* juga menyembunyikan informasi atas kesetujuannya terhadap penerapan normal baru dengan tidak menampilkannya secara eksplisit di dalam paragraf. Sindiran yang dilakukan oleh *Media Indonesia*, juga dimaknai sebagai sebuah kritik agar pemerintah segera memperbaiki komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan normal baru kepada masyarakat agar normal baru dapat segera dijalankan. Hal tersebut tetap menunjukkan tendensi ideologis *Media Indonesia* sebagai pendukung kebijakan normal baru.

Kemudian, pada data (222), *Media Indonesia* menampilkan struktur ideologis berupa metafora berbentuk perumpamaan. Perumpamaan yang dimunculkan oleh redaktur *Media Indonesia* adalah satuan lingual berupa kata, yaitu *kunci*. Kata *kunci* ditakrifkan sebagai bentuk pengibaratan atas kuasa dan akses yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai pemangku wewenang dalam

hal pembukaan tatanan kehidupan normal baru. *Media Indonesia* menunjukkan kecenderungan ideologisnya dengan menempatkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kenaikan kasus Covid-19 manakala akses menuju normal baru dibuka. Secara tidak langsung, *Media Indonesia* mengkritik pemerintah sebagai pihak yang bersalah apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 atas wilayah yang dipimpin.

Berdasar analisis tersebut, terdapat beberapa pandangan yang berbeda antara *Kompas* dan *Media Indonesia*. Perbandingan antara keduanya, *Kompas* tidak menyatakan kesetujuan atas rencana penerapan normal baru. Selain itu, *Kompas* sedikit menyudutkan pemerintah dalam hal kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di masa normal baru, karena mengutamakan pembukaan normal baru di saat kurva positif belum melandai. Hal tersebut menyebabkan terjadinya lonjakan kasus yang signifikan.

Di sisi lain, *Media Indonesia* mendukung rencana pemerintah terkait penerapan normal baru. Namun, *Media Indonesia* tetap menampilkan kritik pada pemerintah terkait buruknya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, *Media Indonesia* juga menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki kuasa dalam merencanakan waktu yang tepat untuk normal baru diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Pola pengekspresian metafora sebagai struktur ideologis yang berlainan antara kedua media tersebut menunjukkan bahwa *Kompas* dan *Media Indonesia* memiliki tendensi yang berlainan.

Atas analisis struktur ideologis teks editorial normal baru, secara general, tendensi antara *Kompas* dan *Media Indonesia* berkebalikan. Tendensi tersebut hadir sebagai sebuah cerminan dari perspektif media atas praksis sosial yang terjadi di masyarakat. Praksis sosial pada konteks tersebut adalah wacana normal baru di masa pandemi Covid-19 dan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan normal baru, baik segi pendidikan, perekonomian, pariwisata, dan lain-lain. Praksis sosial tersebut kemudian dipandang sesuai perspektif media dan direproduksi menjadi produk wacana. Hasil reproduksi praksis sosial tersebut mengandung representasi ideologi media. Berdasarkan analisis struktur ideologis, dapat diketahui bahwa ideologi yang direfleksikan melalui produk wacana dari *Kompas* adalah objektivisme, sedangkan *Media Indonesia* merefleksikan idealisme.